

JURNAL PUSDIKLAT KESOS

Relasi Kerusakan Ekologis dan Paradigma Kesejahteraan Sosial

Living Spirituality in Social Work Practice in Indonesia

*Digital Pathways to Financial Literacy: Enhancing Social Welfare
for Indonesian Migrant Workers Through Free Learning Apps*

*Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial:
Konteks Indonesia dan Pembelajaran dari New Zealand*

*Pengaturan Pengasuhan Alternatif bagi Anak (Komparasi, Indonesia,
Malaysia, Turki, dan Tunisia)*

*Model Dukungan Holistik untuk Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus di Kota Bontang: Sinergi antara Sekolah,
Keluarga, dan Pekerja Sosial*

*Strategi Graduasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
di Kota Surakarta*

*Implikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow terhadap Budaya Organisasi,
Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pegawai*

PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Jl. Margaguna Raya No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan



(021) 7511721



(021) 7661664



humas.pusdiklatkesos@kemosos.go.id



jurnal.pusdiklat@kemosos.go.id



pusdiklat.kemosos.go.id



@pusdiklatbangprof

JURNAL PUSDIKLAT KESOS

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab
Hasim

Redaktur
Baiq Endang Dwi Handayani

Editor
Sri Tjahjorini
Toton Witono
Evy Flamboyen Minanda
Bambang Tjahjono
Bonnie Isramirania

Layout & Desain Grafis
Bina Adi Prakosa

Sekretariat
Anisa Retno Febriyanti
Jamilah

Alamat Redaksi

Pusdiklatbangprof Kemensos RI
Jl. Margaguna No. 1 Radio Dalam
Jakarta Selatan
021-7511721
e-mail: jurnal.pusdiklat@kemensos.go.id

ISSN: 1907-5677

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Redaksi</i>	i - iv
<i>Relasi Kerusakan Ekologis dan Paradigma Kesejahteraan Sosial</i> A. Muh. Agil Mahasin	115-126
<i>Living Spirituality in Social Work Practice in Indonesia</i> Toton Witono	127-139
<i>Digital Pathways to Financial Literacy: Enhancing Social Welfare for Indonesian Migrant Workers Through Free Learning Apps</i> Mansurni Abadi & Wulandari	141-156
<i>Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Konteks Indonesia dan Pembelajaran dari New Zealand</i> Rido Aprianda & Khusnul Khotimah	157-169
<i>Pengaturan Pengasuhan Alternatif bagi Anak (Komparasi, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Tunisia)</i> Evy Flamboyen Minanda	171-184
<i>Model Dukungan Holistik untuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kota Bontang: Sinergi antara Sekolah, Keluarga, dan Pekerja Sosial</i> Yudithia Hiawati	185-193
<i>Strategi Graduasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kota Surakarta</i> Muhtar, Syofiyurrahman, & Muhammad Alfaridzi	195-208
<i>Implikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow terhadap Budaya Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pegawai</i> Sri Tjahjorini Sugiharto	209-229

Pengantar Redaksi

Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas terbitnya Jurnal Pusdiklat kesos Edisi 24, November 2024. Melalui delapan artikel, edisi ini menyajikan sejumlah ragam tema yang menarik dan relatif baru. Tema-tema dimaksud meliputi: hubungan bidang ilmu kesejahteraan sosial dengan kerusakan lingkungan; spiritualitas dalam praktik pekerjaan sosial; literasi finansial dan *good governance* untuk peningkatan kesejahteraan sosial; pengasuhan alternatif anak dan model dukungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); strategi graduasi Program Keluarga Harapan (PKH); dan penerapan teori Maslow.

Artikel pembuka yang ditulis oleh A. Muh. Agil Mahasin mengupas dinamika konsep pembangunan berkelanjutan, dengan gagasannya yang memuat perpaduan penting antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penurunan kemiskinan dalam kebijakan sosial. Di samping melihat bagaimana pendekatan kebijakan sosial yang menggunakan pendekatan antroposentris dengan perdebatan antara teori *social contract* dan *natural contract* telah memberikan implikasi yang tidak ringan. Selanjutnya didalami bagaimana konsep kesejahteraan dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan. Tanpa memahami ide kesejahteraan, sulit menetralsisir hubungan antara manusia dengan alam. Tulisan ini menjadi menarik karena melihat dinamika konsep pembangunan berkelanjutan dalam menyeimbangkan unsur-unsur yang ada didalamnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Artikel kedua yang disusun Toton Witono merupakan kajian konseptual yang diperkuat hasil penelitian lapangan. Artikelnya menggaungkan ide integrasi spiritualitas dalam pekerjaan sosial. Penulis hendak menunjukkan bahwa sampai tingkat tertentu spiritualitas yang khas masyarakat Indonesia sebenarnya telah mewarnai praktik pekerjaan sosial. Bukan secara eksplisit ketika dimensi tersebut turut menjadi salah satu aspek dalam praktik. Bukan pula berdasarkan spiritualitas yang dipahami praktisi/klien dalam interaksi mereka dan dalam *setting* pelayanan sosial. Akan tetapi, wujud kentalnya berupa spiritualitas yang dialami atau dijalani yang sebetulnya sudah sering digunakan dalam praktik pekerjaan sosial. Artikel ini memberi istilah berupa *living spirituality*. Spiritualitas seperti ini dapat bersumber dari agama maupun non agama, baik yang dialami/dijalani secara personal maupun berjamaah. Dimensi penting ini belum begitu familiar di kalangan praktisi karena tidak diajarkan dalam

pendidikan maupun pelatihan. Untuk itu, penulis mendorong para akademisi dan peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih cermat berbagai bentuk dan model pekerjaan sosial yang sensitif spiritual, kemudian mempublikasikan hasilnya agar lebih dikenal dan mampu memperkaya ragam pendekatan dan model pelayanan sosial.

Artikel berikutnya yang disusun Mansurni Abadi dan Wulandari mengeksplorasi cara meningkatkan literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia melalui aplikasi digital "Savers Learning" dan "Smart Digital Indonesia". Dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara semi-terstruktur berdasarkan Jakob Nielsen's Ten Usability Heuristics, penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang pengalaman pengguna. Kombinasi prinsip teori permainan dan pembelajaran eksperimental dari Kolb memberikan kerangka kerja yang inovatif untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi ini dalam memberikan pendidikan keuangan interaktif. Substansi penelitian menekankan bagaimana teknologi dapat mengubah pendekatan tradisional, memberikan pembelajaran yang relevan, personal, dan berbasis kebutuhan nyata pengguna. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua aplikasi memiliki kelebihan unik. "Savers Learning" menonjol dengan alat-alat praktis seperti kalkulator penghematan dan perbandingan remitansi, sementara "Smart Digital Indonesia" memanfaatkan gamifikasi dan narasi interaktif untuk menjelaskan konsep keuangan yang kompleks. Kedua aplikasi ini berhasil meningkatkan literasi keuangan, memberdayakan pekerja migran untuk membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi mereka dari risiko keuangan. Penelitian ini juga menyoroti tantangan seperti kendala bahasa dan akses internet, serta menyarankan perbaikan fitur untuk menjangkau pengguna yang lebih luas.

Artikel keempat ditulis oleh Rido Aprianda dalam rangka memahami praktik baik penerapan konsep *good governance* di New Zealand dan apa yang bisa dipetik untuk konteks Indonesia. Implementasi *good governance* terbukti menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di berbagai negara. Pembelajaran dari praktik *good governance* di New Zealand memberikan inspirasi yang relevan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi pendekatan pengendalian intern seperti audit internal yang transparan, teknologi untuk pengelolaan data yang akurat, alokasi anggaran berbasis risiko, bahkan manajemen risiko yang diterapkan di pemerintahan pada semua lini. Disamping peningkatan keterlibatan publik dalam proses kebijakan. Diharapkan dengan hal ini Indonesia dapat memperkuat sistem kesejahteraan sosialnya. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sosial, tetapi juga

membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tuisan ini memberi gambaran, bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi melalui reformasi *good governance* yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Artikel karya Evy Flamboyan Minanda mengkaji konsep pengasuhan alternatif (*foster care*) bagi anak, yakni terkait sistem dimana anak yang tidak bisa tinggal bersama orang tua biologis mereka ditempatkan di bawah pengasuhan dan perawatan keluarga lain. Penulis melakukan perbandingan konsep dan praktik di Indonesia dengan tiga negara lain: Malaysia, Turki, dan Tunisia. Selain konsep pengasuhan alternatif di empat negara tersebut, penulis juga menyelipkan konsep Islam, yang pada intinya bahwa setiap anak yatim yang ditinggal ayahnya, merupakan kewajiban kakek, paman, atau kakak untuk merawat dan memelihara termasuk menjaga hartanya. Sedangkan keempat negara tersebut memiliki konsep yang hampir mirip karena sama-sama mengadopsi pengasuhan alternatif untuk anak melalui lembaga sebagai alternatif terakhir apabila tidak ada pengasuhan dalam keluarga dan keluarga pengganti. Namun, dibanding tiga negara lain, Tunisia dianggap sebagai yang terdepan dalam penerapan pendekatan lembaga sebagai tempat pengasuhan alternatif.

Artikel keenam yang ditulis oleh Yudithia Hiawati merupakan hasil penelitian dengan judul “Model Dukungan Holistik untuk AMPK di Bontang: Sinergi antara Sekolah, Keluarga, dan Pekerja Sosial.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sekolah dalam mendukung AMPK di Kota Bontang melalui kolaborasi antara guru, keluarga, dan pekerja sosial. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kebutuhan pelatihan guru, mekanisme pelaporan yang efektif, dan kerja sama lintas lembaga yang lebih terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan holistik, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi guru dan keterlibatan pekerja sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial AMPK. Implementasi sistem dukungan yang terstruktur berpotensi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak di sekolah, serta mendukung perkembangan akademis, sosial, dan emosional mereka secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, dan efektif secara konsisten.

Artikel karya Muhtar, Syofiyurrahman, dan Muhammad Alfaridzi membahas strategi percepatan graduasi penerima manfaat PKH di Kota Surakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam kaji cepat selama empat hari, para penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Mereka berhasil mengidentifikasi empat strategi utama: pendekatan personal, sinergi dengan perangkat lokal, pemanfaatan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), dan penyelenggaraan wisuda graduasi oleh walikota/wakil walikota. Strategi ini bertujuan mendorong penerima manfaat mencapai kemandirian secara ekonomi dan sosial. Substansi artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti Gojek, Tokopedia, dan dinas terkait untuk pengembangan usaha penerima manfaat. Artikel ini juga mengungkap tantangan seperti ketidakinginan penerima manfaat untuk graduasi akibat kenyamanan menerima bantuan. Temuan ini memberikan panduan praktis yang dapat diadaptasi oleh daerah lain dalam melaksanakan strategi serupa untuk mengurangi kemiskinan. Artikel ini berhasil memberikan perspektif yang terintegrasi antara pendekatan kebijakan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Artikel terakhir berjudul “Implikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow terhadap Budaya Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pegawai” disusun oleh Sri Tjahjorini Sugiharto. Teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow digunakan sebagai pijakan bagaimana membangun budaya organisasi dan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki suatu instansi untuk meningkatkan kinerja mereka. Teori Maslow dianggap begitu sentral dalam artikel ini karena menurut penulis teori tersebut masih sangat relevan bagi kemajuan suatu organisasi. Menurutnya, teori ini sesungguhnya menyentuh pada kerangka pengembangan organisasi dengan penekanan pada pemberian kepercayaan yang lebih kepada sumber daya manusia yang dimiliki, yang akhirnya organisasi akan berkembang dan berinovasi secara dinamis karena organisasi akan terus diwarnai oleh dinamika yang menjadi ciri organisasi modern. Selain itu, dalam artikel ini dibahas berbagai manfaat dan kegunaan teori hirarki kebutuhan Maslow terhadap pembentukan budaya organisasi dan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Semoga sejumlah tema yang diangkat pada edisi ini dapat memperluas horison pengetahuan para pembaca dan berkontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang kesejahteraan sosial.

Selamat membaca.

Relasi Kerusakan Ekologis dan Paradigma Kesejahteraan Sosial

A. Muh. Agil Mahasin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No. 4, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Email: agilmahasiin@gmail.com

Abstrak

Kerusakan ekologis yang terjadi saat ini merupakan *resultante* berbagai faktor kompleks yang berkelindan dengan aktivitas manusia. Salah satu bagian utama dari kompleksitas tersebut ialah paradigma kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi problem kompleks akibat pendekatannya berupa pencarian kemakmuran materil. Paradigma ini akhirnya menimbulkan problematika mendalam dengan gagasan keberlanjutan lingkungan, sebab kebijakan sosial menerjemahkan dirinya dalam bentuk dominasi manusia terhadap alam. Situasi tersebut berujung pada terpinggirkannya lingkungan akibat relasi kepentingan ekonomi manusia yang senantiasa menggencarkan pertumbuhan dan kepentingan sosial untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran. Artikel ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai implikasi paradigma kesejahteraan terhadap gagasan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut nantinya secara implisit akan memperlihatkan bagaimana ide pembangunan berkelanjutan sesungguhnya tidak lain merupakan keberlanjutan dari gagasan dominasi manusia terhadap alam. Perubahan paradigma dalam memandang kesejahteraan merupakan salah satu upaya untuk memulihkan hubungan manusia dengan alam.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Antroposen, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

The ecological damage that is occurring today is the result of various complex factors that are intertwined with human activities. One of the main parts of this complexity is the welfare paradigm. Welfare becomes a complex problem due to its material approach model, namely the search for material prosperity. This conception eventually causes deep problems with the idea of environmental sustainability, because social policy eventually translates itself into the interests of human domination over nature. This situation leads to the marginalization of the environment due to the relationship between human economic interests that continue to boost growth and social interests to continuously increase prosperity. This article will elaborate further on the implications of the welfare paradigm for the idea of sustainable development. This will implicitly show how the idea of sustainable development is actually nothing but the continuation of the idea of human domination over nature. A paradigm shift in viewing welfare is one of the efforts to restore the relationship between humans and nature.

Keywords: Welfare, Anthropocene, Sustainable Development.

A. PENDAHULUAN

Berbagai kerusakan ekologis yang terjadi seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, polusi, krisis keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan kelangkaan air selama ini dipahami berasal dari peningkatan aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia. Memang seperti diketahui, industri telah bertindak sebagai tulang punggung atas berbagai kemajuan ekonomi yang diperoleh oleh berbagai negara. Kemajuan industri pula menjadi penyebab terciptanya garis imajiner antara negara maju dan negara berkembang, dimana negara maju terciptakan sebagai negara dengan progres industrialisasi yang masif. Dengan demikian, apabila aktivitas industrialisasi dinyatakan sebagai penyebab utama kerusakan ekologis, maka kesimpulan sederhana yang bisa ditarik adalah kontributor terbesar tekanan ekologis ialah negara maju (Sugandi & Najah, 2018).

Akan tetapi tidak adil untuk serta merta menyudutkan negara, tanpa memahami motif yang sesungguhnya sedang bekerja. Hal ini disebabkan adanya situasi kompleks yang ‘tidak terhindarkan’ bagi setiap negara untuk menggenjot aktivitas industri. Pandangan Johan Nordensvärd sepertinya cukup relevan menggambarkan hal ini, ketika ia mengemukakan bahwa industri sejatinya merupakan landasan utama dari eksistensi negara kesejahteraan modern (Nordensvärd *et al*, 2022). Paling tidak berdasarkan argumen tersebut,

dipahami bahwa agresivitas negara dalam melakukan industrialisasi berangkat atas tuntutan negara kesejahteraan.

Tanpa mengurangi esensinya, berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa prinsip Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sejukurnya telah mendorong berbagai implikasi yang cukup kritis. Selama ini prinsip *welfare state* memang dikenali secara populis, yakni bertumbuhnya tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Akan tetapi bagian yang luput disadari secara teknis adalah gagasan tersebut telah berimplikasi pada ‘kebutuhan’ negara untuk meningkatkan kapasitas ‘ekonominya’ demi memenuhi kebutuhan warga negaranya. Alur inilah yang nantinya membawa ide kesejahteraan akan berinteraksi pelik dengan tumbuhnya tekanan yang hebat pada tatanan ekologis. Problem utamanya, negara memaknai prinsip tersebut dengan meningkatkan agresivitas ekonomi demi memperoleh *resource* yang memadai.

Oleh karena itu, upaya mengurai problematika ekologis menempatkan paradigma mengenai kesejahteraan sebagai perhatian penting. Hal ini disebabkan beberapa aspek. *Pertama*, terdapat risiko ekologis ketika manusia memandang kesejahteraan. Teori kontrak sosial pada titik ini menjadi sasaran utama, sebab meskipun teori ini berkontribusi dalam membentuk cara pandang mengenai hak dasar warga negara, sebagian kritikusny

menganggap para eksponen pembentuk teori kontrak sosial luput untuk menempatkan individu sebagai komponen yang setara dengan alam. Hal itu berujung pada pertumbuhan ide kesejahteraan yang semakin identik dengan prospek kemakmuran material, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi sebagai fokusnya (Hirvilammi & Helne, 2014).

Alasan *kedua*. Mengidentikkan ide kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi mengandung risiko tinggi sebab pendekatan yang digunakannya terhadap alam cenderung destruktif. Manifestasi dari similitas tersebut ialah lahirnya cara pandang eksploitatif terhadap alam yang sering dinyatakan menjadi bagian penting dari gagasan antroposen. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia seringkali memahami lingkungan sebagai entitas yang tidak saling berkaitan, dimana lingkungan seringkali ditempatkan sebagai objek dalam aktivitas manusia (Biermann, 2021).

Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mencerminkan situasi anomali tersebut. Konsep tersebut secara spesifik menunjukkan bahwa lingkungan telah berubah menjadi risiko yang mengancam kesejahteraan manusia. Konsepsi pembangunan berkelanjutan menggambarkan bahwa tekanan yang berlangsung atas nama penguasaan manusia terhadap alam, menghasilkan kontradiksi pelik persis sebagaimana dinyatakan Bateson, “(t)he creature that wins against

its environment destroys itself” (Hirvilammi & Helne, 2014).

Oleh karena itu, berbagai riset akademik telah mendalilkan bahwa upaya memulihkan hubungan dengan alam membutuhkan adanya perubahan mendasar dalam persoalan paradigma memandang lingkungan (Biermann, 2021; Hirvilammi & Helne, 2014; Nordensvärd *et al.*, 2022). Hal ini menjadi poin penting sebab, kebijakan teknis semacam pembangunan berkelanjutan, bahkan gagal memberikan pengaruh positif. Berbagai data menunjukkan bahwa batasan-batasan yang tercantum dalam konsep *planetary boundaries* telah hampir terlampaui oleh aktivitas manusia seperti konsentrasi CO₂ yang pada Februari Tahun 2024 telah mencapai 425 ppm dari jumlah batas yang direkomendasikan agar tidak memicu kenaikan suhu global sebesar 450 ppm (NASA, 2024).

Berkenaan dengan paradoks tersebut, artikel ini berupaya untuk melakukan penelitian dengan tipologi diagnostik untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi sengkabut problematika ekologis. Fokus utama dalam artikel ini ialah menjelaskan betapa paradigma kesejahteraan sosial yang sangat antroposentris, telah berimplikasi luar biasa terhadap lingkungan. Salah satu implikasi mendasar ialah semakin lebarnya jarak antara manusia dengan lingkungan. Gaya hidup semakin meningkat dan eksploitasi lingkungan terus menerus dilakukan.

Bagian pertama tulisan ini mengupas dinamika konsep pembangunan berkelanjutan. Poin ini meskipun telah banyak diuraikan dalam berbagai kajian akademik, tetap menjadi bagian penting untuk dibahas sebab pembangunan berkelanjutan merupakan gagasan yang memuat perpaduan penting antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penurunan kemiskinan dalam kebijakan sosial. Dengan beberapa ulasan yang akan disinggung kemudian, menarik untuk melihat dinamika konsep pembangunan berkelanjutan dalam menyeimbangkan ketiga unsur dimaksud.

Selanjutnya artikel ini membahas mengenai dimensi kebijakan sosial yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembahasan ini akan memperlihatkan bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam sebuah kebijakan sosial cenderung menggunakan pendekatan antroposentris dengan perdebatan antara teori *social contract* dan *natural contract* telah memberikan implikasi yang tidak ringan. Adapun bagian akhir dalam tulisan ini akan mendalami bagaimana konsep kesejahteraan dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan. Pemahaman mengenai bagaimana kesejahteraan dipahami merupakan salah satu upaya untuk menemukan alur berpikir dari gagasan antroposentrisme. Tanpa memahami ide kesejahteraan, sulit untuk menetralkan hubungan antara manusia dengan alam.

B. DINAMIKA KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Secara historis, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bermula dari Konferensi PBB yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972. Gagasan pembangunan berkelanjutan muncul seiring tingginya intensitas pertumbuhan ekonomi sementara kapasitas sumber daya alam terbatas (Ogryzek, 2023). Terminologi ‘keberlanjutan’ sendiri jika dilacak muasalnya berasal dari sebuah konsep ekologi yang berhubungan dengan integritas ekosistem (Kristianto, 2022).

Meskipun demikian terminologi pembangunan berkelanjutan baru secara resmi digunakan setelah Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The UN World Commission on Environment and Development*) menggunakannya pada Tahun 1987. Orientasi utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan ialah menciptakan konsep keadilan antargenerasi sebagaimana termuat dalam definisi berikut, “*Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs*” (Paparang & Sinaulan, 2022).

Jeffrey Sachs (2015) memberikan kerangka pikir untuk mengontekstualisasi konsep pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, sebagai gagasan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan di masa mendatang, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan instrumen normatif

maupun etis yang perlu digunakan dalam merumuskan tujuan pembangunan. *Kedua*, konsep pembangunan berkelanjutan secara ringkas mengintegrasikan tiga unsur utama dalam sebuah pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlangsungan lingkungan hidup. *Ketiga*, konsep pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen normatif dan etis perlu dilengkapi dengan penerapan prinsip pembangunan *good governance* (Kristianto, 2022).

Meskipun paradigma pembangunan berkelanjutan telah diterima sebagai agenda politik internasional, implementasi konsep tersebut diakui belum cukup efektif menekan arus pembangunan global. Beberapa pihak menilai kegagalan konsep tersebut disebabkan oleh motif pertumbuhan ekonomi yang kental di dalamnya. Kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tidak lain merupakan sebuah bentuk pengunggulan kembali dimensi pembangunan, secara khusus terkait dengan paradigma pertumbuhan ekonomi. (Paparang & Sinaulan, 2022)

Hal ini pun dikemukakan oleh Sonny Keraf (2010), bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan sebetulnya tidak lain adalah kompromi politik yang tanpa disadari mengukuhkan kembali dominasi pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonominya sebagai fokus utama. Wolfgang Sachs sebagaimana dikutip oleh Keraf (2010), memberikan sebuah kesimpulan

tandas, bahwa ide pembangunan berkelanjutan sesungguhnya berfokus pada ekonomi, bukan ekologi.

Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan sejatinya belum memperbaiki hubungan antara manusia dengan lingkungan. Alih-alih memberikan hubungan yang ideal antara manusia dan alam, konsep pembangunan berkelanjutan justru memberikan jalan baru bagi ‘manusia’ untuk mengeksploitasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan masih mempertahankan posisi lingkungan sebagai entitas yang terpisah dari manusia dan ditempatkan sebagai objek yang ‘perlu’ mendapatkan perlindungan dari aktivitas manusia.

Akibatnya, pasca diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan tidak terdapat perubahan signifikan dari metode pembangunan yang diterapkan. Cara pandang antroposentris, dengan konsep manusia sebagai subjek yang superior terhadap alam, tetap dipertahankan dengan gagasan ‘simpatik’ terhadap lingkungan. Akan tetapi meskipun demikian, fakta tentang peningkatan standar hidup global ditambah dengan perkembangan populasi global berimbas pada penggunaan sumber daya alam yang semakin agresif. Kenyataan ini lalu ditanggapi pesimistik oleh Jackson (2009), yang menyatakan “*tidak ada skenario yang kredibel, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis dari pendapatan yang terus meningkat untuk dunia yang terdiri dari sembilan miliar orang.*”

C. MEMAHAMI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Jika sebelumnya dipaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan paradoks utama di balik terhambatnya gagasan pembangunan berkelanjutan, di sisi lain perlu dipahami bahwa kebijakan sosial pun turut menyumbang kerumitan dalam mengaplikasikan paradigma pembangunan berkelanjutan. Ini disebabkan hilir dari pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan.

Kesejahteraan sebagai basis inti kebijakan sosial, bertransformasi menjadi misi global pasca meletusnya Perang Dunia II. Berbagai negara segera melakukan restrukturisasi dalam berbagai kebijakan sosialnya, salah satunya merestrukturisasi upah pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi dan pajak yang akan didistribusi untuk pembiayaan kebijakan sosial meliputi asuransi, pembiayaan kesehatan, maupun perlindungan hari tua (Koch, 2022).

Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab kebijakan sosial disadari esensial sebagai instrumen pemenuhan standar hidup minimum. Melalui penerapan kebijakan sosial, negara kesejahteraan dapat melindungi warga negaranya dari dampak paling berbahaya sebuah pasar bebas. Gagasan ini berakar dari teori kontrak sosial, yang memberikan landasan hak dan kewajiban sosial antara negara dan warganya. Landasan inilah menjadikan negara

melakukan penyelenggaraan kebijakan sosial dengan pemberlakuan pajak serta kontribusi sosial sebagai instrumen utamanya (Nordensvärd *et al.*, 2022).

Kebijakan tersebut diterapkan dengan secara berbeda di masing-masing negara. Esping-Andersen (1990), mempunyai tiga permodelan rezim kesejahteraan yang dilakukan berdasarkan pola pelayanan sosial, tingkat perpajakan, dan stratifikasi sosialnya. Ketiganya yaitu: rezim *sosial-demokrat* yang menerapkan konsep universalisme dalam kebijakan sosialnya, rezim *liberal* yang menerapkan dekomodifikasi terendah dan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan sosialnya, serta rezim *konservatif* yang menggunakan pendekatan dekomodifikasi terendah dan stratifikasi menengah.

Model kesejahteraan di atas menunjukkan bahwa konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Negara yang menjalankan fungsi pelayanan sosial memerlukan kemampuan ekonomi yang memadai. Hal inilah yang berujung pada pandangan yang menyatakan bahwa semakin kaya suatu negara, semakin buruk kinerjanya dalam indeks yang menunjukkan performa perlindungan lingkungan (Koch, 2022). Negara berpendapatan tinggi tercatat memiliki dampak ekologis tinggi seperti Qatar dengan 14,3 hektar global per kapita, Luxemburg dengan 13 hektar per kapita, Bahrain dengan 8,2 hektar, diikuti dengan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan

Kanada dengan 8,1 hektar global per kapita (Network, 2022).

Bukan hanya itu persoalannya. Komposisi kebijakan sosial bila diurai satu per satu, seperti 'kesejahteraan', 'kebutuhan dasar', dan 'hak-hak sosial' memang memuat definisi yang sangat antroposentris (Nordensvård *et al.*, 2022). Karena itu, kebijakan sosial harus diakui masih berpusat pada manusia sebagai titik sentral. Meskipun dalam diskursus yang berkembang, telah terdapat berbagai gagasan untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara yang lebih bijak, adil, dan proporsional. Oleh karena itu, untuk mengembangkan hubungan antara lingkungan dengan kebijakan sosial, penting menciptakan sebuah hubungan simbiosis antara kebijakan sosial dengan lingkungan, bukan lagi pendekatan parasit seperti yang selama ini berjalan (Nordensvård *et al.*, 2022).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ide utama dari pelaksanaan kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari teori kontrak sosial yang melekatkan sejumlah hak dan kewajiban sosial antara Negara dan Warga Negaranya. Akan tetapi, teori kontrak sosial sendiri sejatinya merupakan konsep yang tidak sepenuhnya seragam, sebab masing-masing filsuf yang menguraikan teori ini memiliki sudut pandangnya masing-masing mengenai dimensi kontrak sosial. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, para pemikir kontrak sosial ini

memiliki kesamaan yakni mereka mencoba menjelaskan masyarakat manusia berdasarkan gagasan bahwa manusia pernah hidup dalam suatu keadaan alam tanpa aturan dan dengan kebebasan yang tidak terbatas (Huntjens, 2021).

Teori kontrak sosial harus diakui telah berkontribusi penting dalam memberikan nilai mendasar bagi masyarakat dengan hubungannya terhadap negara. Meskipun demikian, di mata pakar lingkungan, teori ini memiliki sebuah lubang besar yang menyebabkan timbulnya kompleksitas antara manusia dengan lingkungan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Michael Sandel (1985), yang menyatakan bahwa meskipun teori kontrak sosial telah memberikan posisi sentral terhadap individu, ia gagal untuk menghargai bahwa setiap individu merupakan bagian dari komunitas tertentu. Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh O'Brien (2012), yang mengkritik teori kontrak sosial dengan kegagalan para pemikirnya untuk memberikan nilai intrinsik terhadap alam.

Paradigma dari teori kontrak sosial kemudian coba digeser dengan adanya kontrak alam (*nature contract*). Salah satu yang menggagas ide ini ialah Michel Serres (1995) dalam bukunya *Natural Contract*. Ia sebelumnya turut mempersoalkan kontrak sosial dengan menganggap bahwa eksistensi kontrak sosial telah membentuk hubungan parasitisme manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ia mengajukan sebuah

rekonseptualisasi dengan tujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan alam dengan sebuah kontrak yang disebutnya sebagai kontrak alamiah. Melalui teori ini ia berusaha untuk mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan langkah awal memberikan predikat subjek hukum terhadap benda-benda komoditas lingkungan sehingga mereka setara dengan manusia (Nordensvärd *et al.*, 2022). Melalui penerapan konsep tersebut, ia mengharapkan munculnya sebuah hubungan simbiosis dengan pemberian hak-hak yang setara.

D. MENGULIK PARADIGMA KESEJAHTERAAN

Secara umum dilematika yang dihadapi dalam konteks pemenuhan kesejahteraan ialah bahwa di satu sisi untuk memenuhi standar kebutuhan hidup manusia yang meningkat, penggerusan pada sumber daya alam merupakan hal yang tidak terhindarkan. Ini berimbas pada transformasi ekosistem secara cepat dan tidak terprediksi. Hal ini dengan tanpa sadar justru secara radikal berbalik mengancam kesejahteraan manusia dengan sejumlah risiko lingkungan yang dapat memberikan dampak terhadap eksistensi kehidupan manusia. Berbagai ancaman ekologi secara nyata telah memberikan resistensi dalam kehidupan manusia, seperti terjadinya bencana alam, perubahan iklim ekstrim, dan meningkatnya risiko penyakit menular.

Kondisi ini menunjukkan bahwa apa yang dipahami sebagai kerentanan ekologis telah berubah wujud menjadi kerentanan sosial dan ekonomi (Huntjens, 2021).

Kerentanan sosial dan ekonomi merupakan dua unsur penting dalam tatanan kesejahteraan. Semakin tinggi resistensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi, maka eksistensi kehidupan manusia semakin tidak stabil. Perspektif ini setidaknya merupakan urgensi yang cukup, bahwa diperlukan sebuah perubahan paradigma mendasar dalam memandang konsep kesejahteraan. Merupakan sesuatu yang tidak diinginkan apabila atas nama kesejahteraan segala aktivitas ekonomi dan sosial terus dipertahankan, sementara di saat bersamaan aktivitas itu pula yang justru meningkatkan ancaman terhadap kesejahteraan manusia sendiri.

Mengapa paradigma menjadi poin penting dalam proyek ini? Diungkapkan oleh Thomas Kuhn (1962), dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions*, bahwa titik sentral dalam diskursus mengenai keberlanjutan ialah perhatian terhadap mental antroposen manusia. Selama ini, mentalitas antroposen yang telah diterima kebenarannya secara umum, telah mewujud dalam setiap kebijakan teknis yang diterapkan dalam menangani kehidupan umum. Paradigma tersebut secara ringkas bahkan telah menjadi ‘*conceptual blindfold*’ yang mengganggu para pembuat kebijakan dalam memaha-

mi krisis ekologi (Hirvilammi & Helne, 2014). Melalui suatu perubahan paradigma, hasil yang diharapkan ialah adanya sebuah alternatif ide/gagasan yang akan muncul untuk menantang gagasan yang saat ini telah mapan akan tetapi gagal dalam memberikan keseimbangan antara manusia dan alam.

Salah satu asumsi mendasar yang perlu ditantang ialah paradigma eksepsionalisme manusia. Berbekal paradigma ini, terdapat sebuah pandangan keliru yang menjustifikasi manusia untuk membebaskan diri dari prinsip-prinsip ekologi dan tanggung jawab lingkungan. Beberapa pernyataan teknis dari paradigma ini dapat dilihat sebagai berikut mengutip dari Tuuli Hirvilammi dan Tuula Helne (2014):

1. Manusia terpisah dari alam, dominasi sepihak terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang selayaknya dapat dilakukan.
2. Alam merupakan persediaan sumber daya yang dapat dikonversi untuk keperluan manusia.
3. Manusia merupakan spesies yang lebih unggul daripada spesies lain, sehingga menjustifikasi manusia untuk mengeksploitasi mereka.
4. Nilai hanya diberikan pada individu atau bangsa.
5. Manfaat hanya diperhitungkan atas tindakan yang dilakukan oleh kepentingan manusia.

6. Kemajuan dipersepsikan sama dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak ada habisnya dan kesejahteraan sebagian besar dikaitkan dengan standar hidup material.
7. Masalah yang dihadapi diselesaikan dengan perkembangan teknologi.
8. Pertimbangan ekonomi sangat penting dalam pengambilan keputusan.
9. Kemampuan rasional dianggap lebih unggul dibandingkan kemampuan intuitif dan afektif (Hirvilammi & Helne, 2014).

Berbagai gagasan di atas merupakan kumpulan konsep yang selama ini telah dipercayai dan merupakan fondasi dalam mengatur kebijakan sosial dan kesejahteraan manusia secara khusus. Dalam kebijakan kesejahteraan misalnya, dengan asumsi bahwa kemajuan dihitung setara dengan pertumbuhan materi maka konsep kesejahteraan juga secara linier dipahami dengan gagasan mengenai kemakmuran (*prosperity*) (Hirvilammi & Helne, 2014). Resistensi terhadap perspektif tersebut terlihat ketika pandemi Covid-19 merebak.

Covid-19 harus dipandang sebagai tidak hanya krisis kesehatan. Di balik fenomena kesehatan yang demikian luas, Covid-19 memuat relasi rumit antara pola interaksi ekonomi global, transformasi lingkungan yang radikal, dan dampak sosial yang berskala besar (Huntjens, 2021). Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa geliat eko-

nomi manusia yang begitu tinggi untuk mencapai tingkat kemakmuran telah berimplikasi pada meningkatnya kerentanan ekologis. Sayangnya, apa yang dimaksud kerentanan ekologis dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, meluas pula ke dalam kerentanan sosial dan ekonomi.

Pendekatan materiil dalam memahami kesejahteraan merupakan bagian utama yang perlu dikoreksi. Hal ini dikarenakan pendekatan materialisme dalam memandang kesejahteraan merupakan simplifikasi terhadap apa yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai kesejahteraan. Pendekatan materialisme telah membawa konsep kesejahteraan untuk melupakan berbagai aspek esensial yang seharusnya menjadi bagian daripada konsep kesejahteraan seperti, tingkat stress yang tinggi, depresi, kesepian, dan penyalahgunaan obat-obatan. Pemahaman kesejahteraan yang lebih luas sejatinya merujuk pada tercapainya kondisi aktualitas diri manusia atau sebagaimana dikatakan oleh Abraham Maslow (2011) sebagai menjadi ‘manusia seutuhnya’. Sekilas jika membaca pernyataan Maslow tersebut, kesan antroposennya sangat dominan, akan tetapi bagian penting yang ditekankan oleh Maslow tersebut ialah aktualisasi diri bukanlah merupakan keuntungan individual belaka melainkan altruisme, dedikasi, hubungan dengan orang lain dan masyarakat, tidak egois, dan transendensi diri.

Kontribusi Maslow yang cukup efektif untuk menambal paradigma material dalam konteks kesejahteraan ialah dengan kategorisasi antara kebutuhan dan sarana pemenuhan kebutuhan. Sebagai contoh, makanan dan tempat tinggal secara umum bukanlah merupakan kebutuhan, melainkan sarana pemenuhan kebutuhan. Asumsi yang bisa diperoleh dari kategori tersebut ialah, bahwa apa yang disebut sebagai kebutuhan sejatinya merupakan sesuatu yang bersifat universal, sedangkan sarana pemenuhan kebutuhanlah yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam konteks menuju target ‘keberlanjutan’ upaya yang perlu dilakukan ialah untuk mampu menghasilkan kebutuhan sebanyak mungkin dengan distribusi yang adil (pemenuhan tujuan), sementara sarana pemenuhan kebutuhan diupayakan seminimal mungkin (Hirvilammi & Helne, 2014).

E. PENUTUP

Gagasan pembangunan berkelanjutan yang dicapai oleh komunitas global untuk menyikapi meningkatnya resistensi ekologis menemui jalan terjal dalam penerapannya. Faktor penting yang menjadi penyebab hal tersebut ialah masih kentalnya paradigma antroposen dalam berbagai kebijakan teknis yang menjadi turunan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Implikasi dari pengaruh antroposentrisme tersebut ialah terciptanya kondisi *quo* antara manusia dan ekosistemnya, lingkungan

masih dipersepsikan sebagai objek dan manusia tidak mengurangi intensitas produksi dan konsumsinya.

Paradigma antroposen juga melekat erat dengan gagasan manusia tentang kesejahteraan. Ketika manusia memahami kesejahteraan selalu sebagai pemenuhan kemakmuran material, segala kebijakan sosial yang menjadi turunan dari paradigma tersebut akan senantiasa berujung pada penggerusan sumber daya alam. Implikasinya, kebijakan sosial menguras lingkungan untuk memenuhi kebutuhan material manusia sedangkan lingkungan yang tergerus bertransformasi menjadi ancaman baru bagi kehidupan manusia. Anomali kesejahteraan seperti ini memerlukan pendekatan paradigma baru, yang berupaya untuk mengoreksi gagasan mapan yang tidak relevan dalam konteks hubungan manusia dan alam.

Referensi

- Biermann, F. (2021). The Future of 'Environmental' Policy in the Anthropocene: Time for a Paradigm Shift. *Environmental Politics*, 30(1–2), 61–80. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1846958>.
- Kristianto, E.P. (2022). Perjalanan Maraton Menuju 2030: Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme. *Dekonstruksi*, 6(01), 233–266. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v6i01.97>.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Polity.
- Hirvilammi, T., & Helne, T. (2014). Changing Paradigms: A Sketch For Sustainable Wellbeing and Ecosocial Policy. *Sustainability (Switzerland)*, 6(4), 2160–2175. <https://doi.org/10.3390/su6042160>.
- Huntjens, P. (2021). Towards a Natural Social Contract. In *Springer*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67130-3_3.
- Jackson, T. (2009). *Prosperity without Growth*. Earthscan.
- Keraf, A.S.. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Koch, M. (2022). Social Policy Without Growth: Moving Towards Sustainable Welfare States. *Social Policy and Society*, 21(3), 447–459. <https://doi.org/10.1017/S1474746421000361>.
- Kuhn, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Maslow, A. (2011). *Toward a Psychology of Being* (1st Ed (ed.)). Wilder Publications.
- NASA. (2024). *Carbon Dioxide*. Retrieved March 30, 2024, from <https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/?intent=121>.
- Network, G. F. (2022). *National Footprint and Biocapacity Accounts 2022*. 2022. <https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/>.
- Nordensvärd, J., Ketola, M., & Urban, F. (2022). The River Runs Through It:

- Naturalising Social Policy and Welfare. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16). <https://doi.org/10.3390/su141610415>.
- O'Brien, K. (2012). Global environmental change II: From Adaptation to Deliberate Transformation. *Progress in Human Geography*, 36, 667–676.
- Ogryzek, M. (2023). The Sustainable Development Paradigm. *Geomatics and Environmental Engineering*, 17 (1), 5–18. <https://doi.org/10.7494/geom.2023.17.1.5>.
- Paparang, S. T., & Sinaulan, R. L. (2022). Telaah Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Pencemaran. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 1681. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.1681-1694.2022>.
- Sachs, J.D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sandel, M., Macintyre, A., Barber, B., & Taylor, C. (1985). Liberalism and the Limits of Justice. *Philosophy and Public Affairs*, 14(3), 308–322.
- Serres, M. (1995). *Natural Contract*. Michigan University Press.
- Sugandi, A. T., & Najah, A. H. (2018). Panggung Megah Itu akan Roboh Di Ambang Batas Paradigma. *BALAI-RUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(1), 20–39.

Living Spirituality in Social Work Practice in Indonesia¹

Toton Witono

Widyaiswara Ahli Madya, Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI

E-mail: totonwitono@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4652-9359>

Scopus ID: 59484613100

Abstract

Spirituality is defined variously in relation to the search for meaning, life purpose, values, inner experiences, transcendence, and connectedness with others and God. In the context of social service, the term spiritual or spirituality is often understood in relation to concepts such as mental piety, morals, vertical relationship with God, the inner aspect of human, etc. However, spirituality is difficult to define. Rather, it is more often experienced through practice in daily life. This article calls it as living spirituality. Such spirituality is not clearly expressed in social work practice, especially in the interaction between welfare practitioners and clients. To what extent the living spirituality is implemented in practice depends both on the practitioners' ability to understand spirituality held by the clients and by themselves and on their initiative to articulate. Their living spirituality that comes from either religious or non-religious beliefs, teachings, and traditions may illuminate their practices. Unfortunately, these practices have not been widely explored yet, nor written and published. So it is a big challenge for scholars and researchers to explore.

Keywords: Spirituality, living spirituality, social work, welfare practitioners.

Abstrak

Spiritualitas didefinisikan secara beragam yang terkait pengertian seputar pencarian makna, tujuan hidup, nilai, sesuatu yang bersifat batiniah, transendensi, atau keterhubungan dengan yang lain dan dengan Tuhan. Khusus dalam konteks pelayanan sosial, istilah spiritual atau sipiritualitas dipahami seputar konsep mental, kesalehan, moral, hubungan vertikal dengan Tuhan, aspek batin manusia, dan lain-lain. Meskipun begitu, spiritualitas sulit didefinisikan. Namun, spiritualitas lebih banyak dijalani atau dialami dalam praktik dan kehidupan sehari-hari. Di sini disebut sebagai *living spirituality*. Spiritualitas seperti ini tidak diungkapkan secara jelas dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam interaksi antara praktisi dan klien. Sejauh mana *living spirituality* diimplementasikan dalam praktik tergantung pada kemampuan praktisi memahami spiritualitas dirinya dan yang dipegang oleh klien, serta pada inisiatif mereka untuk mengartikulasikan. Sebetulnya, *living spirituality* yang mereka miliki yang bersumber dari keyakinan, ajaran, dan tradisi agama/non-agama sering kali

¹ Artikel ini pernah dipresentasikan dalam format PowerPoint pada The 5th ARIISW - Shukutoku University International Academic Forum 18-19 February 2021

mampu menerangi dan mengilhami praktik mereka. Sayangnya, praktik-praktik seperti ini belum banyak digali, ditulis, dan dipublikasikan. Jadi ini merupakan tantangan besar bagi para sarjana dan peneliti untuk menggali spiritualitas secara lebih mendalam.

Kata kunci: Spiritualitas, *living spirituality*, pekerjaan sosial, tenaga kesejahteraan sosial.

A. INTRODUCTION

Indonesia is an archipelago state with around 17.491 islands and 281,6 millions population in 2024. This country has not only high population, but also rich in local language and culture. There are approximately 718 local languages, 300 ethnic groups, and 1340 ethnics. Moreover, besides six formal religion, there are about 187 indigenous beliefs. With such an enormous treasure of this country, it is interesting to explore spirituality embedded in Indonesian traditions and culture, including in the formal religions.

For Indonesian people, the term spirituality is interchangeably used with religion or religiousity. It is well known as *ruhani* or *ruhaniah* (an Arabic term), as opposed to everything beyond physical. It is the inner aspect or the unseen faculty of human as well as inspiration from the inner side. Some people acknowledge spirituality as much more concerned with religious rituals and is reflected in a number of components, i.e., religious affiliations and practices, beliefs, values, the way they respond to sufferings, fear, and hopes. These aspects are also much expressed in religious teachings and traditions that are

conducted either individually or communally with groups.

Unfortunately, spirituality is not an issue and also not taught in schools or training. It is not surprising if social workers or welfare practitioners are unfamiliar with this dimension and scarcely use, for instance, forms of spirituality-based assessment and intervention developed by Western scholars or its modified versions. In particular, this paper is an effort to disclose how spirituality is comprehended and lived. Furthermore, it also discusses how it is used in helping profession practice.

B. SPIRITUALITY IN SOCIAL WORK LITERATURES

Spirituality has no fixed definition and is understood variously in terms of time and place. This term is not the same with religion, but is interchangeably used with religiousness. According to Gall et al. (2011), the factors shaping the understanding of spirituality as well as religiousness are religious heritage, culture, generation, and nationality. In social work literatures, this dimension is comprehended around the search for meaning, life purposes, intimacy,

connectedness, relationship with God, transcendence, the sacred, etc.

Some experts who include spirituality in social work, like Sue Spencer (in Hugen, 2001), Max Siporin, and Edward Canda (in Canda, 1986), perceive that spirituality can be expressed in both religious and non-religious traditions. Such understanding is also still handled by a number of experts and authors of social work in years after. To name a few, Sheridan (2009), Canda (1986), Swinton and Pattison (2001) in Gilbert (2007), and Canda and Furman (1999/2010) propose that spirituality can be articulated in both religious and non-religious contexts. Some experts from out of social work area that are frequently quoted also have the same conception, e.g., Atchley (1997); Koenig, McCullough, and Larson (2001) in Lydon-Lam (2012); Hill and Pargament (2003) in Lavretsky (2010); Pargament (2007); and Huguélet and Koenig (2009).

In literatures, many definitions of spirituality have various components that emerge at most, i.e. the search for meaning and life purpose, relationships or connectedness, and the sacred (Sheridan, 2009; Canda & Furman, 1999 & 2010; Miley, 1992 in Zastrow, 2017; Hodge, 2001; Reed, 1992 in Lydon-Lam, 2012; Swinton & Pattison, 2001 in Gilbert, 2007; and Lindsay, 2002 in Healy, 2005). Other features in relation to spirituality are transcendence, mission in life, material values, altruism,

awareness of the tragic, fruits of spirituality (Loue, 2017), spirit, values, and existence. Zastrow (2017, p.96) includes a sense of identity and a value system together with the personal search for meaning as the key component of spirituality. Kirst-Ashman and Hull, Jr. (2006) note that meaning, purpose, and values are related to something beyond physical boundaries and connecting individuals to something higher than themselves. While, the sacred is partly referred to “ideas of God, higher powers, divinity, and transcendent reality” (Pargament, 2007, p. 32). The concept of the sacred can also be taken from non-deistic ideas; personified concepts of God in Judaism, Christianity, and Islam; as well as naturalistic concepts of indigenous people (Atchley, 2008, p.12).

C. SPIRITUALITY IN INDONESIAN PERSPECTIVE

The term spirituality is not pretty acknowledged in Indonesians’ thinking horizon. However, they are more familiar with the original terms of spirituality, i.e. *ruhani/ruhaniah* and *batin/batiniah*. Their spirituality was not only explored from their perspectives, or say, how far they comprehend and explain its meaning, but also from how it is conducted in daily life, in forms of faith and beliefs, behaviours, manners, deeds, or symbols.

The exploration results show that common perception handled by society

colours practitioners' and clients' perspective of spirituality. It is understood by most of them as not so far from the concept of mental, religion or religiousness, piety, morals, and vertical relationship with God. Some others recognize this dimension as the inner aspect of human and intrinsic motivation, though it seems that this recognition was the result from informants' interaction with interviewers at which they want an example or illustration in relation to spirituality. In brief, spirituality is everything opposed to something physical (*jasmani/jasmaniah*)

In the context of social service, education/training, regulation, and agency policies in which they work for are supposed to shape and colour their perspective on spirituality. Nevertheless, the finding results show the other way around that there is no significant difference with the above commonsense. It is not surprising since spirituality has not yet become an important issue in social work in Indonesia. That is why this research was not adequate to construct a conceptualization of practitioners' spirituality, like Prof. Edward Canda (1986) conducted for social workers in North America.

Other expression of spirituality in Indonesian perspective is drawn from regulation of social service for the aged, for instance. It is stated that one of the efforts to improve the vulnerable elders' well-being is religious and mental-spiritual

service, eg. in forms of religious guidance and providing supporting means for religious activities. Briefly, spirituality that is comprehended by practitioners refers much to religious rituals and several expressions of spirituality. It seems that policies of social service for the aged has some impacts, though a little.

From the above explanations, there is a tendency that the term spiritual is an equivalent word with mental or psychological aspect. Besides, the spiritual aspect is frequently exemplified with range of eksternal expressions of religion. Furthermore, spirituality and religion (religiousness/religiousity) are interchangeably used in practice of helping profession, in regulations, even in academic discourse and publication. Indonesian scholars prefer to use the term religiousity or religiousness rather than spirituality.

D. LIVING SPIRITUALITY

Although their comprehension is not appropriate with the universal understanding, that is the search for meaning and life purpose (Hinnels, 1995), that is not to say that Indonesians have no concept of spirituality. It is just the matter of terms and/or definition. They might not understand or define the spirituality that they live both in daily life and in interaction between practitioners and clients. Hinnels classifies it in the level of praxis or experience. In brief, for Indonesian people, including in

the context of social service delivery, spirituality is not comprehended, nor defined. It is lived and done. In this paper, this kind of spirituality can be called as living spirituality.

In the context of Indonesian society, living spirituality is much manifested in religious teachings and traditions/rituals, either individually or collectively with community. The source of their spirituality are from religion and non-religion. Such living spirituality is not clearly expressed in the context of social work practice, especially in interaction between practitioners and clients. Manifestations/expressions of living spirituality are quite different between practitioners and the clients.

1. Living Spirituality of Welfare Practitioners

Welfare practitioners' living spirituality is reflected by a number of following themes: motivation to take care of clients; religious affiliations and practice; belief and values; meaning-making and benefits or wisdom-finding; and some other components of spirituality. To illustrate, the first theme will be articulated here in brief.

In general, living spirituality is influential to shape how the welfare practitioners are motivated to deliver services. Practitioners' motivation to serve clients revolves around dedication to work, concerned with humanity and social care, religious drive, i.e., for the sake of God without expecting

rewards and/or entitlement (Arabic term: *lillahi ta'ala*), and personal motivation. In relation to the personal motivation, almost all informants regard the clients as their own parents or grand-mothers/fathers. Such relationship can hopefully create a better quality of social service. Regarding clients as relatives will exactly intensify the interaction of the practitioners-clients, amplify the clients' trust to practitioners, and in turn make the service provision more effectively. However, probably this can be accused as a violation that such personal and subjective feeling could be contradictory to professional values. As informed by Shulman (1991), the dichotomy dictates that a worker should behave differently as an individual compared to when he/she is dealing with the client that is supposed to perform professional attitudes.

2. Living Spirituality of the Clients

Clients' spirituality were explored from their life experiences or sufferings and the way they respond. This article takes elderly clients as the case example. Their living spirituality is expressed by some features as follows: religious affiliation, practice, beliefs; hope and fear; existential problems; connectedness (relationship and intimacy); spiritual tasks or needs; and religious coping. The following passage enlists the feature of connectedness, as one example.

Connectedness involves vertical relationship with God and horizontal relationship with others. Within this feature, it consists of relationship, intimacy, isolation, and prayer (Arabic term: *doa*). These elements are interwoven each other.

Most older persons feel that the vertical relationship with God presents when they are praying (*shalat*). Moreover, in midnight praying (*shalat Tahajud*) they feel closely the presence of God. Additionally, *doa* can be such a means for gripping and complaining about their problems. Some of them really believe that whether their *doa* will be answered or not depends on perception of their intimacy with God. *Doa* is also actually related with the feature of hope and fear, especially regarding their life end and their relationships with relat-

ives who are still alive and those who had passed away.

Meanwhile, horizontal relationships refer to the elders' connection with family or significant others around them both directly and indirectly. In terms of indirect connection, their connectedness is shown by way of recalling others or feeling them through the inner contact, including with the deceased (Arabic term: *almarhum*).

Themes/categories of the elders' spirituality can be the basis of spiritual tasks of ageing. Spiritual tasks/needs of ageing refer to MacKinlay (2006) adopting Erikson's theory of psychosocial development. Spiritual task doesnot mean a phase or task that should be completed before leaving this world. Besides, the tasks must not be sequential, but can be overlapped. One

Table 1. Spiritual tasks of ageing

Theme	Spiritual tasks of ageing (Connectedness)
Relationships, intimacy, and isolation	- Realize the importance of relationships and intimacy with God and the others - Preserve vertical relationships with God through worshipping and praying - Build positive horizontal relationships with others (beloved persons, family, or others) - Reserve relationships with relatives (including those who have passed away) - Avoid negative relationships or dispute with other clients - Cope with feelings of isolated, disconnected with family by doing positive activities, hobbies, or creativities individually or together with others
Prayer	- Ask hopes and desires to God by praying for self goodness. - Pray for good and honoured end of life (<i>husnul khotimah</i>) - Pray for the goodness of close persons, both those who are still alive and have passed away - Always pray for the close persons with the purpose of having the inner attachment and connection (<i>continuing bonds</i>)

Source: Witono (2017, p.55)

phase can occur again or, even, be revised in some chances and life events (Mathews, 2009). MacKinlay (2006, p. 22) says that "... the 'tasks' are not simply tasks that the person completes and then moves on." She calls it as "the process of becoming." Table 1 shows spiritual tasks retrieved from the feature of connectedness that contributes to the elderly well-being.

3. Living Spirituality in Practice

In field, it was hard to find that practitioners use forms of spirituality-based assessment and/or intervention developed by Western scholars. That is because they were not taught either in school or in training so that they are unfamiliar with the spiritual models. To what extent the living spirituality is applied in practice, it depends both on the capability of practitioners to understand the spirituality held by the clients and by themselves and on their initiative how it is articulated in interaction (Witono & Fahrudin, 2020).

There were minimum records or documentation concerning spiritual assessment. It was found a bit superficial identification of clients' formal religion and religious living, such as rituals, prayers, scripture reading, and the way they conduct rituals. Most practitioners are also unfamiliar with well-known methods of spiritual assessment from the Western practice setting. In accordance, in the phase of spiritual intervention, most practitioners realize not

to employ particular techniques. On the contrary, they make use of common ways like reminding, asking or inviting, giving advices, accompanying, and teaching the elderly clients in doing praying, prayers, or reciting the name and attributes of God (Arabic term: *dzikir*). However, there are several methods or approaches that seems to be like the initiatives of some practitioners that are shaped by their knowledge of religion and personal capability. For example, a practitioner promotes a 'humane' or 'genuine' approach for the purpose of raising the elders' awareness regarding death and dying (Witono & Fahrudin, 2020).

Spiritual assessment conducted by most practitioners is just based on common-sense. They did not make use of particular techniques like several methods introduced by Hodge or a number of methods for certain contexts and clients. To mention some, a method developed by Mohr and Huguelet (2009) is fairly relevant for clients with severe illness. Nichols and Hunt (2011) exemplify some explorative questions to dig the spirituality of chronic illness sufferers.

Despite unsistematic, to some extent it looks suitable with a model scheme of spiritual assessment offered by Moore (2003, p. 560). In the same way, one of the principles of evidence-based practice *a la* Hodge (2011) speaks of how to practice spirituality-based intervention in ethical

and professional way. The first thing to do is to make sure, by means of assessment, whether spirituality is relevant for clients and they show their interest. It should be convinced with an informed consent understood as a continuous process that can be cancelled by the client at any time (p. 150-51).

The suitability is related to the relevance of spirituality for clients by way of considering whether it is the practitioner who ask to client about religion and spirituality or the other way around. In short, the fit between the practitioners' methods and the experts' can create new modifications of spiritual assessment that are better to implement for the Indonesian context.

All techniques previously explained, whether or not the practitioners considered them as religious-spiritual based methods, might be included in spiritual intervention. As Canda and Furman (1999 & 2010) note that indeed any type of intervention in social work can be used in spiritual practice as long as it is done in the frames of values and helping profession context that are spiritually sensitive. The most important thing is that the practitioners have to be conscious and intentional of spirituality in doing practice, although it should not explicitly start speaking with clients.

In line with the above explanation, David Hodge, as quoted in Hodge (2011), defines spiritual intervention as “therapeu-

tic strategies that incorporate a spiritual or religious dimension as a central of the intervention” (p. 149). A lot of techniques and therapeutic methods using spiritual intervention have been made by many experts. Among experts, Holloway (2007) considers that the work of Canda and Furman is the most complete and detail. In their book, *Spiritual Diversity in Social Work Practice* (published in 1999 and had been revised in 2010), Canda and Furman do elaborate complete examples of helping techniques that are spiritually oriented, varying from practice with individual, family, group, to organization and community.

E. REVISIONING PERSON-IN-ENVIRONMENT THEORY

The following passage actually explains one of some contributions of living spirituality to social work, especially the concept of person in environment (PIE), as the most prominent approach in social work. The idea of revisioning PIE theory was promoted by some experts: Besthorn & Canda (2002); Zapf (2007, 2008); Canda and Furman (2010); and Robbins et al. (2012). Zapf (2007) urges that the area of the person is not only limited to the self, but also extended toward relationships between individuals and between the individual and the environment. Meanwhile, the concept of the environment is not supposed to be restricted to solely social environment, but

it should be expanded to involve the universe. Canda and Furman (2010) also recommend that the person is not exclusively focused on the ego and the environment is not merely social relationships. On the contrary, the two concepts must be revised by way of broadening individual needs towards the need of self-transcendence and the social work goals of social support and social justice should be extended toward harmony and global justice for the universe.

Besthorn and Canda (2002) use the perspective of deep ecology to revise the concept of PIE. They insist that person/human and nature/environment are inseparable. Accordingly, the opposition between person and environment should be changed into a complementary relationship, and even a unity between the two. Zapf (2008) is also in line with Besthorn and Canda (2002) in applying deep ecology to broaden the PIE concept. All things considered, deep ecology, ecofeminism, and new perspectives of dynamic systems theory are useful to help to revise the metatheories of social work practice. Therefore, social work can address global issues of system transformation, mutuality, and global ecological well-being toward justice for the global society and harmony between the local and the global natural environment (Robbins et al., 2012).

In Indonesian context, the idea to integrate spirituality into the concept of PIE

by broadening the concept of person and environment is applicable for one of spirituality features, that is connectedness. Broadening the concept of person is possible by expanding the elders' concept of self. Their capability of self-transcendence through a series of negative life events, eg., endless suffering and illness and disability because of ageing factors. These hardships for them are such a test, reminder, or fate from God that should be accepted with patience and even thankful. Their self-transcendence was also revealed through the way they stop wishing something more in their life. They feel that they are done with themselves or their worldly needs (Witono, 2017).

Connectedness with the loved ones who have passed away is manifested through prayer, local traditions of praying or religious rituals (*tahlilan*, *yasinan*, *haul*), hanging their pictures on the wall, keeping their inheritances, and remembering or memorizing the deceased (reminiscence). These manifests create a strong and endless connectivity of the inner with the deceased. Allan (2005) calls it as 'continuing bonds'. Such beautiful bonds can be the source of motivation, preserve hopes, and a way to fulfill spiritual needs.

Revisioning the concept of (social) environment is also applicable for relationships. This spirituality component should be perceived not only with persons surrounding them (family, relatives, and people who

are still alive), but also preserving the inner connection with relatives who never see them by praying and with the beloved persons who have passed away (Witono, 2017). This is in accordance with the concept regarding continuing bonds (Allan, 2005). In addition, vertical relationship with God is a real proof for the possibility of expanding the concept of the environment beyond the narrow concept of social connectivity.

F. CONCLUDING REMARKS

In Indonesian context, spirituality is understood as a concept of mental, religion or religiousity, piety, morals, and vertical relationship with God. Living spirituality is like a gemstone, which is still in forms of raw materials, as stones or boulder. In the contexts of Indonesia in which indigenous beliefs/cultures preserved and religious traditions/rituals lived, it is like a hidden treasure to mine, to discover. The results will be a huge resource to enrich social work practice and even to construct spiritually sensitive social work models appropriate for the local context.

In fact, beside professional social workers, Indonesia have so many state-owned human resources in delivering social service. They may unconsciously use living spirituality in practice. By unconsciously, it means that they do not realize or, say, not on purpose, that actually they use it. Their spirituality may, in fact, illuminate their

practice, which might not be taught or trained in school/university or training centers because of no curriculum/syllabus concerning spirituality and/or religiousity. But, there are so many practices, both in institutional settings and in community, which are actually spiritually sensitive social work practices. Unfortunately, such practices are not explored yet, not written, nor published.

These days, many worrying phenomena are encountered in practicing religion. For example, there is a tendency among religious adherents that they emphasis more on religious expressions rather than spirituality. It seems that they are more passionate with extrinsic aspects than intrinsic ones. Rituals and religious symbols are perceived more valuable than spiritual things. Besides, a strong polarisation due to different personal/world-view, faith/beliefs, and political choice is also sustaining. Attitudes of intolerance, fundamentalism, and radicalism is increasing. Furthermore, people is also ignorant to save the future of the world and to address the environmental crisis. It is not surprising if there are many questions exposed on the surface. Where to go to address these phenomena? How can social workers and/or practitioners play their roles, especially for those who care with spiritually sensitive practice? In a nutshell, practitioners, scholars, trainers, and researchers are

facing many challenges. They have a lot of homeworks to do.

References

- Allan, J. (2005). The Role of Meaning Construction in Living with Grief. In Tuula Heinonen & Anna Metteri (Eds.). *Social Work in Health and Mental Health: Issues, Developments, and Actions* (pp. 282-99). Canadian Scholars' Press Inc. Toronto.
- Atchley, R. C. (1997). Everyday Mysticism: Spiritual development in Later Adulthood. *Journal of Adult Development* 4 (2), 123-134.
- Atchley, R. C. (2008). Spirituality, Meaning, and the Experience of Aging. *Generations* 32 (2), 12-16.
- Besthorn, F.H. & Canda, E.R. (2002). Revisioning Environment, *Journal of Teaching in Social Work*, 22:1-2, 79-101, DOI: 10.1300/J067v22n01_07
- Canda, E. R. & Furman, L. D. (2010). *Spiritual Diversity in Social Work Practice: The Heart of Helping*. 2nd Edition. New York: Oxford University Press, Inc.
- Canda, E. R. & Furman, L. D. (1999). *Spiritual Diversity in Social Work Practice: The Heart of Helping*. New York: The Free Press.
- Canda, E. R. (1986). *A Conceptualization of Spirituality for Social Work: Its Issues and Implications*. Unpublished. Dissertation at Ohio State University.
- Gall, T. L., Malette, J., & Guirguis-Younger, M. (2011). Spirituality and Religiousness: A Diversity of Definitions. *Journal of Spirituality in Mental Health*, 13 (3), 158-181.
- Gilbert, G. (2007). The Spiritual Foundation: Awareness and Context for People's Lives Today. In M. E. Coyte, P. Gilbert & V. Nicholls (Eds.). *Spirituality, Values and Mental Health* (pp. 19-44). London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Healy, K. (2005). *Social Work Theories in Context: Creating Frameworks for Practice*. New York: Palgrave MacMillan.
- Hinnells, J. R. (1995). *The Penguin Dictionary of Religions*, 2nd edition. Penguin Books. England.
- Hodge, D. R. (2011). Using Spiritual Interventions in Practice: Developing Some Guidelines from Evidence-based Practice. *Social Work* 56 (2), 149-58.
- Hodge, D.R. (2001). Spiritual Assessment. A Review of Major Qualitative Methods and a New Framework for Assessing Spirituality. *Social Work*, 46 (3), 203-14.
- Holloway (2007). Spiritual Need and the Core Business of Social Work. *British Journal of Social Work* (2007) 37, 265-280.
- Hugen, B. (2001). Spirituality and Religion in Social Work Practice: A Conceptual Model. In M. van Hook, B. Hugen, & M. Aguilar (Eds.), *Spirituality within Religious Traditions in Social Work Practice* (pp. 9-17). Canada: Brooks/Cole.

- Huguelet, P. & Koenig, P. G. (2009). Introduction: Key Concepts. In P. Huguelet & P. G. Koenig (Eds.), *Religion and Spirituality in Psychiatry* (pp. 1-5). New York: Cambridge University Press.
- Kirst-Ashman, K. K. & Hull, Jr., G. H. (2006). *Generalist Practice with Organizations and Communities*. 3rd Edition. USA: Thomson Brooks/Cole.
- Lavretsky, H. (2010). Spirituality and Aging. *Aging Health* 6 (6), 749-69.
- Lydon-Lam, J. (2012). Models of Spirituality and Consideration of Spiritual Assessment. *International Journal of Childbirth Education* 27 (1), 18-22.
- Loue, S. (2017). *Handbook of Religion and Spirituality in Social Work Practice and Research*. New York: Springer.
- MacKinlay, E. (2006). *Spiritual Growth and Care in the Fourth Age of Life*. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Mathews, I. (2009). *Social Work and Spirituality (Transforming Social Work Practice)*. Learning Matters. Glasgow.
- Mohr, S. & Huguelet, P. (2009). Religious and Spiritual Assessment in Clinical Practice. In P. Huguelet & H.G. Koenig (Eds), *Religion and Spirituality in Psychiatry* (pp. 232-43). New York: Cambridge University Press.
- Moore, R.J. (2003). Spiritual Assessment. *Social Work* 48 (4), 558-61.
- Nichols, L.M. & Hunt, B. (2011). The Significance of Spirituality for Individuals with Chronic Illness. Implications for Mental Health Counseling. *Journal of Mental Health Counseling*, 33 (1), 51-66.
- Pargament, K.I. (2007). *Spiritually Integrated Psychotherapy: Understanding and Addressing the Sacred*. New York-London: The Guilford Press.
- Robbins, S.P., Chatterjee, P. & Canda, E.R. (2012). *Contemporary Human Behavior Theory: A Critical Perspective for Social Work*. 3rd Edition. NJ: Pearson Education, Inc.
- Sheridan, M. J. (2009). Isu Spiritual dan Keagamaan dalam Praktik. In A.R. Roberts & G.J. Greene (Eds.), *Buku Pintar Pekerja Sosial: Social Workers' Desk Reference*. Jilid 2 (pp. 278-87). (Trans. Juda Damanik & Cynthia Pattiasina). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Shulman, L. (1991). *Interactional Social Work Practice: Toward an Empirical Theory*. Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Witono, T. (2017). Kontribusi Keterhubungan terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia dan Implikasinya bagi Pekerjaan Sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7 No. 01, 47-61. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1100>
- Witono, T. & Fahrudin, A. (2020). The Spirituality of Welfare Practitioners in Social Service for the Elderly in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, Vol. 12, No. 2s, 2608-2624.
- Zapf, M.K. (2007). *Profound Connections between Person and Place: Exploring*

- Location, Spirituality, and Social Work. In John Coates, John R. Graham, Barbara Swartzentruber, & Brian Ouellette (Eds.). *Spirituality and Social Work: Selected Canadian Readings* (pp. 229-42). Canadian Scholars' Press Inc. Toronto.
- Zapf, M.K. (2008). Transforming Social Work's Understanding of Person and Environment: Spirituality and the "Common Ground". *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, 27:1-2, 171-181. DOI: 10.1080/15426430802114200
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. 8th Edition. Brooks/Cole-Thomson Learning. Belmont, CA.

Digital Pathways to Financial Literacy: Enhancing Social Welfare for Indonesian Migrant Workers Through Free Learning Apps

Mansurni Abadi ¹ & Wulandari ²

¹) Institute of ethnics Studies, UKM Malaysia and social media coordinator for Savers Asia
Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia

Abadimansur25@gmail.com

²) Faculty of Sociology, Open University of Indonesia in Kuala Lumpur, Malaysia
Wulandari06052001@gmail.com

Abstract

Financial literacy is essential for Indonesian migrant workers, who often encounter unique financial challenges while managing their finances abroad. This research explores innovative methods to enhance financial literacy through digital tools, focusing on two free applications—Savers Learning, developed by the Australian startup Savers Global, and Smart Digital Indonesia, developed by Indonesia’s Financial Services Authority (OJK). Both apps are accessible on Google Play and the Apple App Store. To examine the usability and effectiveness of these applications, the study employs a qualitative approach. It uses snowball sampling and semi-structured interviews guided by Jakob Nielsen's Ten Usability Heuristics, combined with game theory principles. The findings indicate that these applications transform traditional financial literacy education by offering interactive and personalized learning experiences tailored to users' individual needs. These tools leverage advanced educational technology and machine learning to present financial education in a relevant and engaging manner. By emphasizing practical applications, such as budgeting, saving, and investing, the apps enable users to apply financial concepts in real-life scenarios. This practical approach not only improves concept retention but also empowers migrant workers to make informed financial decisions, ultimately contributing to their long-term economic stability. Furthermore, the research highlights the scalability of these platforms as a significant advantage in addressing financial literacy gaps. By fostering empowerment and financial resilience, the applications support the diverse needs and experiences of Indonesian migrant workers. In conclusion, this study underscores the importance of tailored digital financial education tools in helping migrant workers navigate the complexities of today’s globalized and digital world.

Kata Kunci: Savers Learning apps, financial literacy apps, Indonesia migrant workers.

A. INTRODUCTION

According to Isomidinova & Singh (2017) Financial literacy is becoming increasingly crucial in today's complex

financial world, as highlighted by numerous studies worldwide. Moreover, currently the financial landscape has changed significantly and become more complex with the

introduction of several financial services and products that require us to increase our financial knowledge. Therefore, financial literacy is currently and will be an international policy agenda related to efforts to increase financial inclusion, which will influence appropriate financial decisions for financial well-being at the micro level (Khan et al., 2022). Individuals with financial literacy make informed financial decisions, comprehend the world, and become responsible citizens (Khan et al., 2022; Lusardi & Messy, 2023).

In Indonesia, migrant workers are often referred to as "foreign exchange heroes" due to their significant economic contributions. However, improving their financial literacy is essential to achieve sustainable economic empowerment. Remittances from migrant workers are a major source of income that play a critical role in reducing poverty, especially in households and communities in many developing countries. Therefore, it is important to ensure these funds are managed effectively (Ghimire et al., 2023; Lusardi & Messy, 2023). At the same time, migrant workers often face limited access to social security benefits both in their host countries and when they return home. This lack of support highlights the need for careful planning for retirement and unexpected emergencies. Financial literacy equips migrant workers with the knowledge to save, invest, and secure their future. It helps them understand

the importance of savings, insurance, and pension schemes, as well as choose reliable remittance services. Additionally, it empowers workers to educate their families on managing remittances responsibly, ensuring financial stability beyond immediate needs (Chen & Lemieux, 2016; Ghimire et al., 2023; Kim et al., 2022).

There are several ways to improve financial literacy among Indonesian migrant workers, such as outreach program financial education activities, Ex- Migrant Workers and Families (Juddi et al., 2020) or those who are still working as migrant workers as was done by the Financial Services Authority (OJK) in Tawau, Malaysia (Suarni et al., 2023), Collaboration between state and Non-state actors (Utami et al., 2022), and involving and strengthening the role of digital inclusion (Bakhsh et al., 2024; Notley & Aziz, 2024).

In this research, the author examines how digital inclusion can enhance financial literacy among Indonesian migrant workers. The focus is on the innovation of free applications designed for this purpose, specifically Savers Learning, a financial literacy app developed by the Australian start-up Savers Global in 2024, and Smart Digital Indonesia, created by the Financial Services Authority (OJ) in 2023. These applications offer courses, tools, and games that help migrant workers engage with their finances and unlock their potential for financial mastery. By using the application,

digital literacy learning can be in line with the development of the times where currently smartphones have become a necessity and can be used as an effective learning medium (Malik, 2023), amidst the busy lives of migrant workers.

B. LITERATURE REVIEW

1. Financial Literacy

Financial literacy has become an important topic for policymakers and academics alike. Studies have shown that financial education often leads to significant improvements in financial literacy (Kaiser et al., 2022). While individuals around the world face diverse financial situations, as noted by Estrada-Mejia et al (2023), this diversity should not discourage efforts to address financial literacy challenges.

Improving financial literacy is essential because it empowers individuals to make better financial decisions at all levels—personal, household, and even broader economic contexts. By equipping people with the knowledge to manage their finances effectively, financial literacy contributes to greater financial stability, poverty reduction, and long-term economic well-being. Therefore, integrating financial education into various societal and institutional programs is a practical step toward building more resilient and financially capable communities.

2. Experiential learning

Experiential learning, as defined by Kolb (2007), involves learning through direct experiences and taking action within a specific context, often referred to as "*learning by doing*." According to Experiential Learning Theory (ELT), learning is a continuous process that includes experiencing, reflecting, thinking, and acting, which ultimately leads to changes in behaviour (Cherry, 2019). Kolb's model identifies four key stages in the learning cycle: experiencing concrete situations, reflecting on those experiences, thinking abstractly, and applying new strategies (Cherry, 2019; David A Kolb, 2007) structured process allows learners to gain practical knowledge and skills through active engagement.

3. Saver learning apps

Savers Learning is an interactive learning app developed by Savers Global, an Australian startup (non-state actors) with 60 years of experience in the industry, consulting on workforce mobility programs and writing financial literacy curricula; the team has built an incredible online service that helps migrants based on SDGs (sustainable development goals) value such as Reduced inequalities (Sdgs 10),



Figure 1. Savers Learning apps

Quality education (Sdgs 4), Gender equality (Sdgs 5), Decent work / economic growth (Sdgs 8), and Partnership with the goals (Sdgs 17). As new product, Savers Learning have a goal to Elevate migrant workers financial literacy with personalised courses, with practical knowledge to support for a lifetime of financial wellbeing. Through interactive lessons and user-friendly content, Savers Learning strives to bridge the

financial literacy gap for migrants, equipping them with the skills to navigate both their personal finances and the digital landscape with confidence.

“*Making finance fun*” is the prominent tagline they created to attract a digital generation that becomes migrant workers. Some of the advantages of their main features are shown in the image below

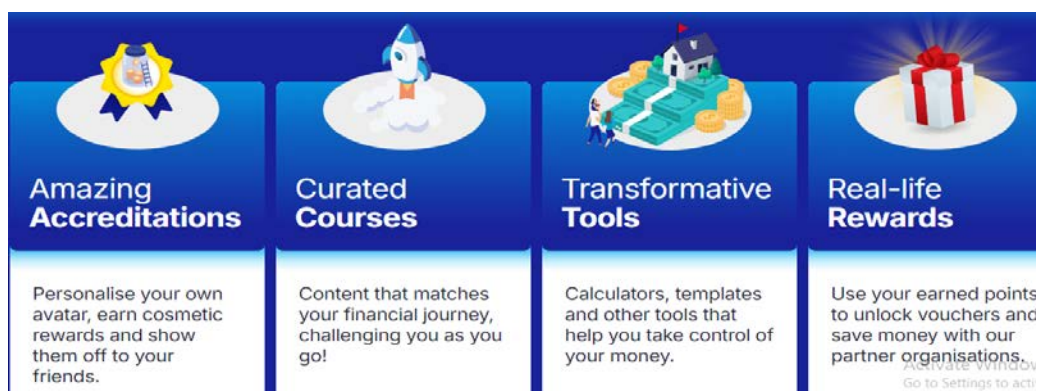


Figure 2. Savers Learning advantage future

The Savers Learning application is available for free download on both the Apple Store and Google Store. However, it is still in development when it comes to language support, as it is currently only offered in English. This limitation makes it challenging for many Indonesian migrant workers to understand the content. Before creating Savers Learning, Savers Global successfully developed the Savers Asia application, which supports the Indonesian language. Unlike Savers Learning, which is an interactive learning tool, Savers Asia serves as an informational platform focused on remittance services and various aspects of financial literacy. The Savers Asia application can also be downloaded for free on the Google Store and Apple Store, and it features an Indonesian-language website at www.saverasia.com.

4. Smart Digital Indonesia

The Smart Digital Indonesia application was developed by the Financial Services Authority (Otoritas jasa keuangan) in 2023, OJK or Financial service Authority

itself is an independent institution formed in 2011 to regulate and supervise the financial services sector in Indonesia. Its main task is to supervise banking, capital markets, and non-bank financial industries such as insurance, pension funds, and finance companies. Currently, the Smart Digital Indonesia service offers four digital financial literacy modules in a game format: financial product selection, cyber ninja (online criminal), fintech lending, and consumer complaint channels (Antara news, 2023). Although these applications do not specifically target migrant workers, but the availability of locally developed apps in Indonesia adds a unique touch to the field of interactive financial literacy. According to OJK Public Relations representative Darmansyah, "The initiative to develop this digital literacy game was undertaken by OJK to build a strong and responsible digital financial ecosystem, with a focus on consumer protection, especially given the still low level of digital financial service literacy in Indonesian society"(Antara news, 2023).



Figure 3. The Smart digital Indonesia app display

C. METHODOLOGY

We used a qualitative descriptive design to learn about the impact of savers' learning apps created by Savers Global, a start-up from Australia (a non-state actor), and *smart digital Indonesia* applications by the Financial Services Authority (OJK) (a state actor) on financial literacy learning among Indonesian Migrant workers. Informant for study were recruited from Indonesian migrant worker communities in Malaysia and Indonesia, primarily through social media, especially Facebook. Semi-structured interviews using an interview guide based on Jakob Nielsen's Ten Usability Heuristics. 16 Indonesian migrant workers from Malaysia, Singapore, Hong-kong, and Saudi Arabia were chosen. All informant is part of digital generation with consist of 8 millennials cohort and 8 Generation Z- cohort. To analysis result, we used uses Jakob Nielsen's Ten Usability Heuristics to evaluate app interactions, and game theory to know experiential learning in Financial literacy education that have three interconnected elements of game design.

First is game mechanics, which is all the objects and actions in the game that the player interacts with in a system. Second is the gameplay—the processes of players interacting with game mechanics. Third is player experience, which is very subjective after player involvement in the gameplay

(Mazarakis & Bräuer, 2023; Sailer et al., 2017).

D. RESULT AND DISCUSSION

1. Qualitative interpretation based on Jakob Nielsen Ten Usability Heuristics

Based on Jakob Nielsen's Ten Usability Heuristics, we developed ten targeted questions to explore the experiences of Indonesian migrant workers using Savers Asia's financial literacy applications, specifically Savers Learning and Smart Digital Indonesia. These questions were carefully crafted to capture insights into various aspects of usability, including how the design, navigation, and functionality of the apps impact user engagement and learning outcomes. Through these questions, we gathered detailed insights into the workers' interactions with the applications, assessing their ease of use, ability to navigate features, and overall satisfaction with the learning experience. A detailed breakdown of each usability question and the findings from this evaluation are presented in Table 1.

The analysis revealed key findings regarding user satisfaction, ease of use, and the overall impact of these digital tools on the financial literacy of Indonesian migrant workers. It also highlighted the role of fintech solutions in empowering this community.

Table 1. Question based on Jakob Nielsen Ten Usability Heuristics

No	Aspect	Question
1.	Visibility of System Status	When using the app, do you feel informed about the progress or status of your tasks?
2.	Match Between System and the Real World	Do you find the language and icons used in the app to be familiar and easy to understand? Are they consistent with what you're used to in other apps or daily life?
3.	User Control and Freedom	Have you ever made a mistake while using the app? If so, did you feel you could easily undo or go back and correct it?
4	Consistency and Standards	Do you notice that similar functions in the app (like buttons, menus, or icons) work the same way every time you use them? Are there any areas where you felt the design was inconsistent?
5	Error Prevention	Have you encountered any situations where the app helped prevent you from making mistakes,? Did you find these features helpful?
6	Recognition Rather Than Recall	Does the app make it easy for you to find information or tools without having to remember where they are? For example, do you see recent activities or suggestions that help you quickly access what you need?
7	Flexibility and Efficiency of Use	Do you feel that the app provides shortcuts or easier ways for you to complete frequent tasks? How well do these features work for you as a beginner or more experienced user?
8	Aesthetic & Minimalist Design	Do you find the app's design simple and straightforward, or does it feel cluttered with too much information? Are the most important features easy to focus on?
9	Help Users Recognize, Diagnose, & Recover from Errors	When you experience problems with the app, are the error messages clear and helpful in understanding what went wrong? Do they suggest how you can fix the issue?
10	Help and Documentation	Have you used the app's help or tutorial features? If so, did you find them easy to access and useful for understanding how to use the app?

Table 2. Qualitative interpretation

Usability Concept	Interpretation for Savers Learning	Interpretation for Smart Digital Indonesia	Impact on Financial Literacy	Impact on Social Welfare for Migrant Workers
User Control and Freedom	Users feel empowered to undo mistakes; language barriers cause some confusion	Users experience challenges with redoing actions and additional downloads	Facilitates financial task engagement; mistakes hinder learning	Builds trust in financial tools, aiding remittance and savings management
Consistency and Standards	Design consistency needs improvement; language issues affect navigation	Predictable design aids user experience	Prevents misunderstandings in financial functions	Familiarity aids understanding of financial landscape
Visibility of System Status	Provides immediate feedback on actions	Feedback on actions is slower	Real-time updates boost financial management	Real-time feedback enhances financial security understanding
Error Prevention	Preventative measures help reduce mistakes, though improvements needed	Clear confirmation steps add user satisfaction	Promotes confidence in making financial choices	Prevents costly errors during financial learning
Match to Real World	Aligns well with real financial concepts, aiding practical application	Similar to Savers; aligns with real-world financial scenarios	Real-world relevance aids experiential learning	Real-world context fosters positive financial habits
Recognition vs. Recall	Simple navigation reduces cognitive load	Accessible features ease memory demands	Reduces cognitive load, allowing focus on financial concepts	Quick access to information aids prompt financial decisions
Flexibility & Efficiency	Shortcuts support efficient task completion	More efficiency needed for frequent tasks	Efficient interactions enhance financial engagement	Streamlined processes free time for work and personal

Aesthetic & Minimalist Design	Clean design helps focus on important features	Excessive information can be overwhelming	Prevents overwhelm, encouraging exploration of financial tools	Simple interface lowers anxiety, promoting financial literacy engagement
Error Recognition & Recovery	Clear error messages aid in problem resolution	Similar, clear explanations support user recovery	Promotes resilience and learning through errors	Enables migrant workers to rectify financial errors promptly
Help & Documentation	Accessible help features, though relevance could improve	Quick access to well-organized help	Supports ongoing financial literacy development	Essential for users with limited financial education to navigate tools

The findings reveal notable differences in how the two apps influence the financial literacy and overall welfare of migrant workers. For instance, Savers Learning's focus on remittances and practical tools like savings calculators has a direct impact on empowering users with actionable knowledge for financial management. In contrast, Smart Digital Indonesia, with its gamified storytelling approach, helps users grasp complex financial concepts through engaging narratives, fostering a broader understanding of financial services. These differences suggest that Savers Learning is better suited for users who seek straightforward, practical applications, while Smart Digital Indonesia caters to those who benefit from interactive and visual learning methods. Thus, the apps serve complementary purposes, addressing diverse needs within the migrant worker community.

2. Qualitative interpretation based on game theory

a. Mechanism of Savers Learning and The Smart digital apps

To influence player experience learn financial literacy, there are several key elements of the game and their mechanics to reflect dynamics in financial. These are based on the science with the generalization process for gamification.

- 1) Both apps designed for single players to enhance experience learning. From a game theory perspective, the single-player mode of both apps focuses on individual learning journeys. Savers Learning prioritizes functional tools, while Smart Digital Indonesia fosters engagement through gamification. Together, these

approaches cater to diverse learning preferences, maximizing the impact on financial literacy.

- 2) Both applications highlight financial literacy from different perspectives, if savers learning focuses more on financial literacy for migrant workers complete with knowledge about remittances, then Smart digital Indonesia focuses on financial products and services provided by OJK such as reporting and handling financial crimes. The Savers Learning course offers a straightforward approach, focusing on serious content without interactive games but this apps provide case studies with explanation. In contrast, Smart Digital Indonesia presents a story about the friendship between Finn and Nitty, who help each other make financial decisions. This story is enriched with interactive games to illustrate financial services endorsed by the Financial Services Authority (OJK) and the OJK's efforts to protect consumers. Savers Learning, however, includes practical financial tools, such as income calculators, remittance comparisons, and savings calculators, and provides a resourceful, practical format for financial management and future planning.
- 3) The common goal of the both application to increasing awareness regarding financial literacy, by (a). Inform the importance of being careful in managing finances including choosing financial products, (b)

teach how to manage finances properly, and (c) improve critical thinking regarding finances.

b. Experiential learning landscape

Both apps is designed to facilitate the experiential learning cycle. There are three phases of the game in each turn .The first phase is "Reveal Phase," where the game will tell the key information before the player can do their actions, such as term of financial literacy, as well as general instructions for the action (saving, spending, and investment). The Reveal Phase reflects two stages of Kolb's cycle (abstract conceptualization and active experimentation), where it helps to bridge players from the concept understanding and planning for action. The next phase is the "action phase," which reflects the active experimentation that led to concrete experience based on Kolb's theory. The action phase is where the players are forced to make financial decisions.

ELT is particularly relevant for financial literacy education. Financial literacy is often challenging to teach due to its complex and multifaceted nature. By focusing on practical application and real-life experiences, ELT provides an effective framework to simplify these challenges and make learning more accessible and impactful. This transition toward experiential methods not only enhances understanding but also equips learners with the ability to

make better financial decisions in real-world situations.

3. Challenges Faced by Users

Despite their benefits, users face challenges in accessing and utilizing these tools effectively. Limited internet access, language barriers, and varying levels of technical literacy were identified as significant obstacles. Many migrant workers, particularly those in remote areas, struggle with inconsistent connectivity, which limits their ability to use the apps' features. Furthermore, the apps' reliance on Indonesian and English restricts usability for workers less proficient in these languages. These challenges intersect with the experiential learning landscape, as connectivity issues disrupt the Reveal Phase—where users receive key financial information—and the Action Phase, where users make financial decisions. Language barriers also hinder users' ability to fully engage in Kolb's experiential learning cycle, particularly in abstract conceptualization and active experimentation.

To address these issues, both apps should incorporate offline functionality, allowing users to access key features without constant internet connectivity. Introducing multilingual support with simplified language options can bridge language gaps and make the tools accessible to a broader audience. Additionally, interactive tutorials and in-app guidance should be enhanced to

support users with varying levels of technical literacy, ensuring they can fully benefit from the apps' features.

The study also applies game theory principles to understand how the apps' mechanics influence learning outcomes. Both apps adopt single-player modes to focus on individual learning journeys. Savers Learning's practical tools and straightforward format emphasize functional financial management, while Smart Digital Indonesia's gamified storytelling enriches the user experience by illustrating financial concepts through relatable scenarios. These strategies align with Kolb's experiential learning cycle, encompassing phases like abstract conceptualization, active experimentation, and concrete experience. Improvements addressing usability challenges will further enhance these experiential learning cycles, enabling users to transition seamlessly between learning phases and achieve greater financial empowerment.

4. The Impact of Savers Learning and Smart Digital Indonesia on Indonesian Migrant Workers (PMI)

a. Impact of Savers Learning on Indonesia migrant workers

- 1) Practical Financial Management Tools - Savers Learning provides PMI with essential tools such as income calculators, remittance comparisons, and savings calculators, which enable them to manage their

finances effectively. By offering practical solutions, the app helps users organize their expenses and savings, making it easier to achieve long-term financial goals. For PMI, who often have limited time and resources, these tools are invaluable for ensuring financial stability.

- 2) Increased Awareness of Remittance Services - The app offers detailed information about remittance services, including fees and transfer times, empowering PMI to choose cost-effective options. This feature not only saves money but also enhances the efficiency of the remittance process, ensuring that more funds reach their families back home.
- 3) Ease in Financial Planning - Savers Learning's straightforward and practical approach makes it ideal for PMI who seek simple yet effective methods for financial planning. Its focus on usability ensures that users with minimal digital literacy can navigate the app with ease, thereby reducing the barriers to financial education.

b. Impact of Smart Digital Indonesia on Indonesia migrant workers

- 1) Improved Understanding of Financial Products and Services Through its gamified narratives, such as the story of Finn and Nitty, Smart Digital Indonesia helps PMI grasp complex financial concepts like investment, consumer protection, and financial reporting and also OJK product. This

interactive approach is particularly beneficial for PMI unfamiliar with formal financial terminology, enabling them to learn in a more engaging and relatable manner.

- 2) Consumer Protection and Fraud Prevention The app emphasizes the importance of reporting financial crimes and understanding consumer rights, aligning with the services provided by the Financial Services Authority (OJK). By raising awareness of financial fraud prevention, the app equips PMI with the knowledge to protect themselves from unfair practices.
- 3) Development of Critical Thinking Skills Smart Digital Indonesia's interactive games encourage users to think critically when making financial decisions. This skill is crucial for PMI in managing debt, choosing safe investment products, and navigating financial services responsibly.

c. Differences in Context of Use Between the Two Apps

- 1) Purpose of Use - Savers Learning is tailored for PMI who need simple tools for daily financial management and remittance optimization. In contrast, Smart Digital Indonesia targets users seeking to understand broader financial concepts and consumer protection measures. These differing purposes make each app uniquely suited to specific user needs.
- 1) Level of Interaction - Savers Learning adopts a straightforward and

practical design, making it suitable for users who prefer direct information and functionality. Meanwhile, Smart Digital Indonesia's gamified and narrative-driven approach appeals to users who enjoy interactive and immersive learning experiences.

- 2) Accessibility and Simplicity - While Savers Learning's minimalist design reduces cognitive load for PMI with lower digital literacy, Smart Digital Indonesia's diverse features and interactive elements may require a higher level of familiarity with digital tools. This difference highlights the importance of tailoring app features to the user's technological proficiency.

d. Impact on Financial Literacy Improvement

Both applications significantly contribute to improving financial literacy among PMI. Savers Learning enhances financial literacy by focusing on practical implementation, such as saving and remittance optimization. On the other hand, Smart Digital Indonesia broadens users' understanding of financial services and fosters critical thinking, enabling them to navigate financial systems with confidence.

e. Impact on PMI's Social Welfare

The social welfare of PMI is directly influenced by their financial literacy levels. Savers Learning empowers PMI to manage their income effectively, fostering financial

stability for their families in Indonesia. Smart Digital Indonesia complements this by teaching users to make informed financial decisions and protect their assets from potential risks, thus enhancing their overall economic security. According to Savers Global internal survey with qualitative method in three countries (Hongkong, Saudi Arabia, and Malaysia) in 2024 (Personal interview with Savers global public relation, 2024) with 150 Indonesia respondent, 80% of the respondents stated that the application was very helpful, while 20% found it complicated due to its use of English. As for OJK, there has been no official release regarding the number of users who benefited from the application. However, qualitative data obtained by the researcher indicated that all respondents found the application to be quite interactive. Nevertheless, they also considered it too simplistic. Almost all responses noted that the application only provided recommendations for financial products without offering access to the recommended products or placing sufficient emphasis on the needs of migrant workers.

E. CONCLUSION

In conclusion, this study underscores the effectiveness of digital financial literacy tools, specifically Savers Learning and Smart Digital Indonesia, in enhancing the financial knowledge and skills of Indonesian migrant workers. These tools leverage Kolb's experiential learning model

to guide users through the stages of economic understanding, from conceptualization to practical application. The findings demonstrate that Savers Learning excels in providing straightforward, valuable tools for managing finances, such as savings calculators and remittance comparisons, which directly support financial stability and long-term planning. Conversely, Smart Digital Indonesia's gamified storytelling and interactive elements enhance engagement and help users grasp complex financial concepts, including consumer protection and investment.

Despite these strengths, challenges remain regarding accessibility, particularly regarding language barriers and internet connectivity. Both apps would benefit from incorporating multilingual support, offline functionality, and enhanced user guidance to ensure inclusivity and improved engagement. Moreover, while Savers Learning is more suited for users seeking immediate, practical financial management tools, Smart Digital Indonesia offers broader financial education and critical thinking development, making the two tools complementary in addressing the diverse needs of the migrant worker community.

Ultimately, these culturally relevant digital tools empower Indonesian migrant workers with the financial literacy necessary to safeguard their economic well-being, avoid financial pitfalls, and contribute to their social welfare. As the tools evolve, their potential to enhance migrant workers' financial security, protect against abuse, and foster long-term stability will only increase, further underscoring the

importance of accessible financial education in promoting sustainable socio-economic development.

Further studies should explore the longitudinal impact of digital financial literacy tools, assessing how these tools influence financial behavior over time. Expanding research to include migrant workers from various industries and regions would provide a broader understanding of the challenges and opportunities facing this population. It is also crucial to delve into the role of language and localization in tool effectiveness, as this can significantly impact the reach and usability of these tools. Additionally, the potential for offline functionality, particularly in areas with limited connectivity, warrants further exploration.

Referensi

- Antara news. (2023). *OJK luncurkan games Smart Digital tingkatkan literasi keuangan digital*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3355497/ojk-luncurkan-games-smart-digital-tingkatkan-literasi-keuangan-digital>
- Bakhsh, S., Zhang, W., Ali, K., & Anas, M. (2024). Transition towards environmental sustainability through financial inclusion, and digitalization in China: Evidence from novel quantile-on-quantile regression and wavelet coherence approach. *Technological Forecasting and Social Change*, 198. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123013>
- Chen, Z., & Lemieux, C. M. (2016). Finan-

- cial Knowledge and Behaviors of Chinese Migrant Workers: An International Perspective on a Financially Vulnerable Population. *Journal of Community Practice*, 24(4). <https://doi.org/10.1080/10705422.2016.1233475>
- Cherry, K. (2019). The experiential learning theory of David Kolb. *Experiential Learning*.
- David A Kolb. (2007). Experiential Learning (Kolb) - Learning Theories. February 13.
- Estrada-Mejia, C., Mejía, D., & Córdoba, P. (2023). Financial literacy and financial wellbeing: Evidence from Peru and Uruguay. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(2). <https://doi.org/10.1017/flw.2023.15>
- Ghimire, A., Danuwar, R. K., Gurung, B. K., Dhakal, A., Timalsina, D. P., & Baral, D. K. (2023). Financial Literacy and Personal Financial Planning among the Households of Migrant Workers in Rainas Municipality, Lamjung, Nepal. *Interdisciplinary Journal of Innovation in Nepalese Academia*, 2(2). <https://doi.org/10.3126/idjina.v2i2.59493>
- Isomidinova, G., & Singh, J. S. K. (2017). Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan. In *Electronic Journal of Business & Management* (Vol. 2, Issue 1).
- Juddi, M. F., Perbawasari, S., & Zubair, F. (2020). Financial Literacy Improvement Program for Indonesian Ex-Migrant Workers and Families. *Library Philosophy and Practice*, 2020.
- Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics*, 145(2). <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.022>.
- Khan, F., Siddiqui, M. A., & Imtiaz, S. (2022). Role of financial literacy in achieving financial inclusion: A review, synthesis and research agenda. In *Cogent Business and Management* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2034236>
- Kim, M., Koo, H. G., & Jang, J. (2022). Financial capabilities and financial behavior of overseas Filipino workers in South Korea. *Asian and Pacific Migration Journal*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/01171968221113342>
- Learning-Theories.com. (2007). Experiential Learning (Kolb) - Learning Theories. February 13.
- Lusardi, A., & Messy, F.-A. (2023). The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(1). <https://doi.org/10.1017/flw.2023.8>
- Malik, A. (2023). Assessing the Effectiveness of Financial Literacy Mobile Apps Using the Content Analysis Approach. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 17(23). <https://doi.org/10.3991/IJIM.V17I23.42213>
- Mazarakis, A., & Bräuer, P. (2023). Gamification is Working, but Which One Exactly? Results from an Experiment with Four Game Design Elements.

- International Journal of Human-Computer Interaction*, 39(3). <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2041909>
- Notley, T., & Aziz, A. (2024). The unjust burden of digital inclusion for low-income migrant parents. *Policy and Internet*, 16(2). <https://doi.org/10.1002/poi3.383>
- Phuong, N. Q., & Venkatesh, S. (2015). Does migration make financial sense? The case of domestic workers from Vietnam to Taiwan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 35(11–12). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2014-0080>
- Sailer, M., Hense, J. U., Mayr, S. K., & Mandl, H. (2017). How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. *Computers in Human Behavior*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033>
- Suarni, A., Jam'an, A., Muchran, M., & Sakti, M. R. P. (2023). Financial Literacy and Inclusion of Indonesian Migrant Workers in Tawau Sabah Malaysia. *Proceeding International Conference of Community Service*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.147>
- Taneja, M., Kiran, R., & Bose, S. C. (2022). Critical analysis of kolb experiential learning process. *International Journal of Health Sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.6962>
- Teng, C. I., Huang, T. L., Huang, G. L., Wu, C. N., Cheng, T. C. E., & Liao, G. Y. (2024). Creatability, achievability, and immersibility: New game design elements that increase online game usage. *International Journal of Information Management*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102732>
- Thathsarani, U. S., & Jianguo, W. (2022). Do Digital Finance and the Technology Acceptance Model Strengthen Financial Inclusion and SME Performance? *Information (Switzerland)*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/info13080390>
- Utami, W. A., Rikza, A., Anggresta, P., & Nuryananda, P. F. (2022). The Role of Institutional Collaboration Between Actors in Protecting the Economic Security of Indonesian Migrant Workers With Financial Literacy. *Jurnal Bina Praja*, 14(2). <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.373-383>
- Zhou, H., Dai, H., & Jung, N. (2020). Empowering migrant domestic helpers through financial education. *International Journal of Social Welfare*, 29(2). <https://doi.org/10.1111/ijsw.12385>

Implementasi *Good Governance* dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Konteks Indonesia dan Pembelajaran dari New Zealand

Rido Aprianda¹, Khusnul Khotimah²

¹Auditor Ahli Muda, Kementerian Sosial

²Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: ¹apriandarido@gmail.com; ²khus003@brin.go.id

Abstrak

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu negara. Artikel ini mengkaji implementasi *good governance* oleh Inspektorat Kementerian Sosial di Indonesia. Perbandingannya dengan praktik yang diterapkan di New Zealand. Melalui kajian literatur, artikel ini bertujuan untuk menemukan strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan implementasi *good governance* dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan praktik terbaik dari New Zealand khususnya dalam mengadopsi pendekatan pengendalian intern seperti audit internal dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Good governance*, kesejahteraan sosial, pembelajaran, pengendalian intern

Abstract

Social welfare is one of the key indicators in a country's development. This article examines the implementation of good governance by the Inspectorate of the Ministry of Social Affairs in Indonesia, comparing it with the practices applied in New Zealand. Through a literature review, this article aims to identify strategies that can be adopted to enhance the implementation of good governance in efforts to improve social welfare in Indonesia. The study's findings indicate that adopting best practices from New Zealand, particularly in internal control approaches such as internal audits, can provide valuable insights for Indonesia in improving transparency, accountability, and the effectiveness of social welfare programs.

Keywords: *Good governance, social welfare, learning, internal control*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta

penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024), memiliki potensi besar untuk mencapai kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, dan keadilan diperlu-

kan secara merata bagi semua lapisan Masyarakat (Triono, 2024). Namun, menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Seperti adanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Ketimpangan antara daerah urban dan rural dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga menciptakan kesenjangan dalam kesejahteraan (Triono, 2024; Effendi, 2024).

Tantangan lainnya juga dalam penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat krusial. seperti korupsi, kurangnya transparansi dan ketidakmerataan pembangunan masih menghambat upaya tersebut. Masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan masih menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan dana sosial. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan anggaran untuk program-program kesejahteraan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran anggaran pemerintah untuk program kesejahteraan sosial seringkali menimbulkan keraguan tentang efektivitas dan manfaat dari program tersebut. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pembuatan kebijakan juga menyebabkan kurangnya kesesuaian antara program yang diimplementasikan dan

kebutuhan nyata di lapangan (Maspaiteella *et al.*, 2014; Effendi, 2024).

Sementara itu, New Zealand sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan *good governance* yang sangat baik (Bastian, 2011). Keberhasilannya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan partisipatif melalui reformasi administrasi publik dan kebijakan-kebijakan inovatif (Chang, 2018; Gani & Scrimgeour, 2016; Goldfinch & Halligan, 2024). New Zealand secara konsisten unggul dalam setiap indikator seperti suara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, pengendalian korupsi. yang ditetapkan oleh Bank Dunia melalui *Worldwide Governance Indicators (WGI)* (Gambar 1) (World Bank, 2024). WGI menunjukkan penilaian seberapa baik sebuah negara dikelola dan seberapa baik pemerintah memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat, sekaligus berfungsi sebagai alat pemantauan untuk membantu negara memperbaiki kebijakan tata kelola pemerintahan. (Hawkesby & Bonaparte, 2023; Kostyuk & Tutino, 2019; Shammut & Imran, 2024; Webster & Cheyne, 2017; World Bank, 2024).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang pentingnya kesejahteraan sosial, tantangan dalam mewujudkan *good governance* serta menganalisis praktik *good governance* di New Zealand dan implikasi-



Gambar 1

nya menjadi strategi bagi Indonesia untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menciptakan sistem yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan melalui pendekatan literatur yang komprehensif.

B. HUBUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE

1. Definisi dan Indikator Penting Kesejahteraan Sosial

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya merupakan definisi kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009. Indikator kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan kelompok, serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk hidup yang bermartabat. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial yang mendukung dan

berkelanjutan (Gorahe *et al.*, 2021; Sastrawan *et al.*, 2024).

Indikator penting kesejahteraan sosial mencakup faktor-faktor yang mengukur kualitas kehidupan masyarakat dan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Pengawasan sosial yang baik dan *good governance* yang efektif berperan sentral dalam memastikan keberhasilan kebijakan sosial. Pengawasan sosial melibatkan mekanisme masyarakat untuk mengawasi, mengontrol, dan memastikan kebijakan kesejahteraan berjalan sesuai tujuan. Sedangkan *good governance* adalah fondasi bagi kesejahteraan sosial berkelanjutan. Beberapa prinsip pentingnya meliputi:

- a. Suara dan Akuntabilitas: Masyarakat harus dapat mengekspresikan pendapat mereka dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka;
- b. Stabilitas Politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme: Stabilitas politik diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan;
- c. Efektivitas Pemerintah: Penggunaan sumber daya secara optimal penting agar program kesejahteraan dapat tepat sasaran;
- d. Kualitas Regulasi: Regulasi harus mendukung kesejahteraan sambil melindungi hak-hak masyarakat;

- e. Aturan Hukum: Penerapan aturan hukum yang adil penting untuk menghindari ketidakadilan dalam kebijakan sosial;
- f. Anti Korupsi: Pengendalian korupsi sangat penting karena korupsi dapat menghambat distribusi manfaat kesejahteraan.

Secara keseluruhan, pengawasan sosial dan tata kelola yang baik berperan dalam memastikan keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat (Putra, 2021; Sastrawan *et al.*, 2024).

2. Peran dan Fungsi Kementerian Sosial dalam Pengawasan Sosial dan *Good Governance*

Good governance merujuk pada praktik pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2021; Sari & Maharani, 2024). Di Indonesia, penerapan *good governance* sangat penting mengingat kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi.

Salah satu alat penting dalam menerapkan *good governance* di Indonesia, khususnya Kemensos sebagai Kementerian yang mengelola program kesejahteraan sosial dengan pelaksanaan pengawasan intern. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan *good governance* yang baik (Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, 2023). Sehingga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi maupun berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Implementasi yang efektif dari pengawasan intern menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen organisasi, dengan cara:

- a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial;
- b. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial;
- c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, 2023).

Audit Internal sebagai salah satu kegiatan pengawasan intern memiliki fungsi:

- a. Monitoring Program Sosial. Audit internal memantau efektivitas program-program sosial yang dijalankan pemerintah. Audit juga dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mengevaluasi dampak program;
- b. Partisipasi Masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam proses audit internal dapat meningkatkan partisipasi publik. Masyarakat yang terlibat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran dan kualitas layanan;
- c. Perbaikan Berkelanjutan. Rekomendasi dari hasil audit dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam program-program sosial, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, 2023).

Keterkaitan Pengawasan Sosial dan *Good Governance* dengan kesejahteraan sosial yakni melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Program: Pengawasan sosial yang baik akan memberikan umpan balik bagi pemerintah untuk terus memperbaiki program-program kesejahteraan, sementara

good governance yang efektif memastikan implementasi dan perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas;

- b. Pencegahan Penyelewengan: Dengan adanya sistem pengawasan sosial yang kuat, ditambah tata kelola yang baik, penyelewengan anggaran dan sumber daya publik dapat dicegah. Hal ini memungkinkan distribusi yang adil dari manfaat program kesejahteraan kepada masyarakat yang berhak;
- c. Kepercayaan Publik: Ketika pengawasan sosial dan *good governance* berjalan dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini penting karena kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan mendukung pelaksanaan program-program kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan (Sari & Maharani, 2024).

3. Tantangan Kemensos dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya

Kementerian Sosial menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas sosial, meliputi:

- a. Pendanaan dan Sumber Daya. Banyak program kesejahteraan sosial yang memerlukan dana besar. Keterbatasan anggaran seringkali meng-

hambat pelaksanaan program secara efektif. Dari sisi sumber daya, kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kerja di lapangan dapat mengurangi efektivitas pengawasan;

- b. Birokrasi dan Prosedur. Birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat implementasi program. Prosedur yang tidak efisien sering kali membuat respons terhadap masalah sosial menjadi lambat serta koordinasi antar instansi. Kementerian Sosial harus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain. Ketidakselarasan antar instansi dapat mengakibatkan duplikasi program atau kebijakan yang tidak sinkron;
- c. Pengawasan yang efektif memerlukan data yang akurat dan tepat waktu. Namun, sering kali data yang ada tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Maupun keterbatasan dalam sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data menjadi tantangan besar;
- d. Masyarakat sering kali kurang terlibat dalam proses pengawasan. Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban membuat masyarakat tidak aktif dalam pengawasan sosial, maupun kurangnya program edukasi tentang pentingnya pengawasan sosial bagi masyarakat menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi;

- e. Beberapa masyarakat mungkin masih berpikir bahwa pengawasan sosial adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, sehingga tidak merasa perlu terlibat. Dalam beberapa kasus, terdapat stigma terhadap penerima bantuan sosial, yang dapat menghambat upaya pengawasan dan evaluasi program;
- f. Risiko penyalahgunaan anggaran dan sumber daya untuk kepentingan pribadi dapat mengurangi efektivitas program. Tantangan dalam menegakkan akuntabilitas bagi pejabat yang terlibat dalam pengelolaan program sosial dapat mengurangi kepercayaan masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2020).

C. GOOD GOVERNANCE DI NEW ZEALAND

1. Praktik *Good Governance* yang Efektif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Praktik ini melibatkan berbagai elemen, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan sosial, meliputi: (Bastian, 2011; Gani & Scrimgeour, 2016; Hawkesby & Bonaparte, 2023; Safitri, 2021):

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Pemerintah New Zealand menerapkan kebijakan transparansi yang tinggi, memberikan akses kepada publik untuk informasi yang berkaitan de-

ngan kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah New Zealand menerapkan kebijakan transparansi yang tinggi, memberikan akses kepada publik untuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

- 1) **Penyampaian Informasi Publik:**
Pemerintah New Zealand secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses oleh publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana keputusan diambil.
- 2) **Pengawasan Independen:** Terdapat lembaga pengawas independen, seperti *Office of the Auditor-General*, yang bertugas memastikan bahwa semua pengeluaran pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- b. **Partisipasi Publik:** New Zealand mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum-forum diskusi. Ini memastikan bahwa suara masyarakat

didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan.

- 1) Keterlibatan Warga: Pemerintah New Zealand mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini termasuk konsultasi publik sebelum pengesahan kebijakan penting.
 - 2) Forum dan Komite Konsultatif. Lembaga pemerintah memiliki forum atau komite yang terdiri dari anggota masyarakat yang berfungsi untuk memberikan masukan dan perspektif lokal dalam kebijakan yang akan diimplementasikan.
- a. Pengawasan Sosial
- 1) Peran Masyarakat Sipil: Organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Mereka seringkali melakukan penelitian, memantau implementasi kebijakan, melaporkan temuan kepada pemerintah dan publik.
 - 2) Media sebagai Pengawas: Media di New Zealand berfungsi sebagai *watchdog* yang mengawasi tindakan pemerintah. Mereka sering melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan kesejah-

teraan masyarakat dan menyoroti area di mana pemerintah perlu bertanggung jawab.

- c. Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti
- 1) Riset dan Data: Pemerintah mengandalkan data dan riset untuk merumuskan kebijakan yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Program-program sosial sering dievaluasi secara rutin untuk mengukur efektivitasnya.
 - 2) Kebijakan Responsif: Melalui pengawasan sosial dan umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang ada untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Fokus pada Kesejahteraan Sosial
- 1) Program Sosial Terintegrasi: New Zealand memiliki berbagai program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program ini dirancang untuk saling mendukung dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
 - 2) Pendekatan Berbasis Komunitas: Kebijakan sering kali diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks lokal,

memberikan otonomi lebih kepada komunitas untuk menentukan prioritas mereka sendiri.

2. Contoh Kasus Sukses dan Pembelajaran yang dapat diterapkan

Salah satu contoh sukses dalam praktik *good governance* di New Zealand adalah implementasi sistem audit internal yang efektif di sektor publik (Civil Service Colleges Singapore, 2016; Patterson, 2024). Sistem ini berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya publik (The Office of the Auditor-General, 2014).

- a. Standar Audit yang Tinggi: New Zealand menerapkan standar audit yang ketat melalui *Office of the Auditor-General*. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan audit independen terhadap semua badan publik, memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Pendekatan Berbasis Risiko: Audit internal di New Zealand menggunakan pendekatan berbasis risiko, di mana fokus diarahkan pada area yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan atau ketidakefektifan. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan.

- c. Transparansi Hasil Audit: Hasil audit dipublikasikan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja lembaga publik. Ini meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara tepat.
- d. Peningkatan Berkelanjutan: Audit internal tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Proses ini mendorong lembaga untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi mereka.

Pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, meliputi:

- a. Praktik Audit yang Ketat: Mengadopsi audit independen dan membentuk tim audit internal dengan pelatihan sesuai standar internasional.
- b. Pemetaan Risiko: Mengidentifikasi program kesejahteraan sosial yang berisiko tinggi untuk penyalahgunaan dan menerapkan manajemen risiko. Penggunaan anggaran yang lebih transparan membantu memastikan bahwa bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran;
- c. Audit Berfokus pada Hasil: Melaksanakan audit yang menilai dampak program dan menerapkan transparansi

dalam pelaporan hasil untuk meningkatkan akuntabilitas.

- d. Keterlibatan Penerima Manfaat: Mengumpulkan data dari penerima manfaat melalui survei dan forum diskusi untuk memahami kebutuhan dan tantangan.
- e. Pelaporan Publik: Menerbitkan laporan audit yang jelas dan menindaklanjuti rekomendasi dengan sistem yang transparan, serta melaporkan kemajuan secara berkala.
- f. Kolaborasi dengan LSM: Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.
- g. Kolaborasi Antar-Lembaga: Mendorong kerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk integrasi audit dalam perencanaan dan penganggaran.

D. STRATEGI PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Adapun perumusan strategi untuk meningkatkan fungsi pengawasan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

- a. New Zealand menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan anggaran. Indonesia dapat menggunakan metode serupa dengan mengidentifikasi program yang paling mem-

butuhkan perhatian dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja di lapangan harus diutamakan.

- b. Mengadopsi prinsip transparansi dan efisiensi dari New Zealand dapat membantu Indonesia menyederhanakan prosedur administrasi. Kementerian Sosial dapat mengevaluasi dan memperbaiki proses yang ada, mengurangi hambatan birokrasi dengan membentuk tim audit internal yang mandiri,
- c. New Zealand memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan dan analisis data. Indonesia dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk mengumpulkan data dari lapangan secara *real-time*, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif.
- d. Program edukasi tentang pentingnya pengawasan sosial harus diperkenalkan. New Zealand melibatkan masyarakat dalam proses audit; Indonesia dapat mencontoh ini dengan membangun forum di mana masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan mengenai program-program yang ada.
- e. Menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, serta menjadikan hasil audit publik dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di New Zealand, hasil audit dipublikasikan untuk meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat diadopsi di Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik.

E. PENUTUP

Sebagai penutup, implementasi *good governance* terbukti menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di berbagai negara, termasuk di New Zealand. Pembelajaran dari praktik *good governance* di New Zealand memberikan inspirasi yang relevan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan pengendalian intern seperti audit internal yang transparan, teknologi untuk pengelolaan data yang akurat, alokasi anggaran berbasis risiko, dan peningkatan keterlibatan publik dalam proses kebijakan, Indonesia dapat memperkuat sistem kesejahteraan sosialnya. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sosial, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi melalui reformasi *good governance* yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024, Juni 28). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Bastian, I. (2011). A Learning Of New Zealand: A Step Toward Good Governance For Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(1), 1–19.
- Chang, A. (2018). Analysis on corporate governance compliance standards in New Zealand – a qualitative study on disclosures using content analysis and interviews. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(4), 505–525. <https://doi.org/10.1108/JFRC-12-2017-0115>
- Civil Service Colleges Singapore. (2016). *Lessons from New Zealand's Better Public Services Reforms*. *Ethos Issue* 16. <https://knowledge.csc.gov.sg/ethos-issue-16/lessons-from-new-zealands-better-public-services-reforms/>
- Gani, A., & Scrimgeour, F. (2016). New Zealand's trade with Asia and the role of good governance. *International Review of Economics & Finance*, 42, 36–53. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.10.017>
- Goldfinch, S., & Halligan, J. (2024). Reform, hybridization, and revival: the status of new public management in Australia and New Zealand. *Public Management Review*, 26(9), 2542–2560. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2329770>

- Gorahe, V., Waani, F., & Tasik, F. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Eksekutif*, 1(1), 1–9. <https://www.kemkes.go.id/>,
- Hawkesby, C., & Bonaparte, E. (2023). *Towards good governance in the financial system of Aotearoa A speech delivered online to the Institute of Directors on 7 September 2023 by Christian Hawkesby, Deputy Governor and General Manager Financial Stability Written with Esther Bonaparte*.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. (2023). *Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 103/2/Hk.01/3/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024*.
- Koko Safitri. (2021). Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Moderating the Effect of Environmental Performance on Financial Performance. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(6), 2218–2229. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i6.399>
- Kostyuk, A., & Tutino, M. (2019). *Corporate Ownership and Control: International Trends*. Virtual Interpress.
- Maspaitella, M. J., Rahakbauwi, N., & Sosial, K. (2014). Social Welfare Development: Society Empowerment in Social Worker Approach. *Aspirasi*, 5(2), 1–8.
- Patterson. (2024, August 15). *Lessons from the Qantas governance review for New Zealand directors*. Institute of Directors New Zealand. <https://www.iod.org.nz/news/articles/lessons-from-the-qantas-governance-review-for-new-zealand-directors#>
- Putra, M. D. (2021). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila* (Vol. 23, Issue 2).
- Sari, L. P., & Maharani, S. (2024). Analisis Peran Audit Dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 169–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Goris Seran, G. (2024). *Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1).
- Shammut, M., & Imran, M. (2024). Governance of automated mobilities transition in Aotearoa New Zealand. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 133, 104299. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104299>.
- The Office of the Auditor-General. (2014). *Local Authority Governance of Subsidiary Entities Part 1: Good Governance*. <https://oag.parliament.nz/>
- Triono, T. A. (2024). Systematic literature Review: Membangun Kesejahteraan Sosial Indonesia, Peluang dan Hambatan. *Journal of Society Bridge*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i2.46>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 12. Jakarta: Sekretariat Negara
- Webster, K., & Cheyne, C. (2017). Creating Treaty-based local governance in New Zealand: Māori and Pākehā views. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 12(2), 146–164. <https://doi.org/10.1080/1177083X.2017.1345766>
- World Bank. (2024, September 18). *Worldwide Governance Indicators*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
- Yusuf Effendi. (2024). Genealogi Ilmu Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 11–23. <https://doi.org/10.52423/welvaart.v5i1.2>

**Pengaturan Pengasuhan Alternatif bagi Anak
(Komparasi, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Tunisia)**

Evy Flamboyan Minanda

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
E-mail: evy.flamboyan@kemsos.go.id

Abstrak

Konsep pengasuhan alternatif berasal dari konsep *foster care* yang merupakan sebuah konsep yang memberikan tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak dapat tinggal bersama keluarga biologis mereka. Konsep ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak yang membutuhkan, sambil juga memberikan dukungan dalam hal pengasuhan dan perkembangan anak. Konsep pengasuhan alternatif ini berasal dari negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Bagaimana kemudian negara dengan mayoritas muslim melakukan pengaturan pengasuhan alternatif dengan melakukan komparasi negara Indonesia dan Malaysia serta Turki dan Tunisia. Dalam perkembangannya, konsep *foster care* juga telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, meskipun dengan variasi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio yuridis dan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif.

Kata Kunci: Pengasuhan; Pengasuhan Alternatif; Pengasuhan Dalam Lembaga.

Abstract

The concept of alternative parenting comes from the concept of foster care which is a concept that provides temporary housing for children who cannot live with their biological family. This concept aims to provide a safe and stable environment for children in need, while also providing support in terms of parenting and child development. This concept originated in western countries, such as the United States and the United Kingdom. How then did the Muslim-majority country make alternative parenting arrangements by comparing the countries of Indonesia and Malaysia as well as Turkey and Tunisia. In its development, the concept of foster care has also spread to various countries around the world, albeit with variations in its implementation. This study uses a qualitative research design with a socio-juridical approach and uses the analysis of descriptive legal materials.

Keywords: Parenting; Alternative Parenting; Institutional Parenting.

A. PENDAHULUAN

Konsep pengasuhan alternatif berasal dari konsep *foster care* yang merupakan sebuah konsep yang memberikan tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak dapat tinggal bersama keluarga biologis mereka. Konsep ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak yang membutuhkan, sambil juga memberikan dukungan dalam hal pengasuhan dan perkembangan anak. Konsep ini berasal dari negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris. *Foster care* sendiri merupakan sebuah sistem di mana anak yang tidak bisa tinggal bersama orang tua biologis mereka ditempatkan di bawah pengasuhan dan perawatan keluarga lain yang disebut sebagai *foster family*. Konsep ini telah berkembang selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari sistem perlindungan anak di banyak negara.

Dalam perkembangannya, konsep *foster care* juga telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, meskipun dengan variasi dalam implementasinya. Di Indonesia sendiri, konsep *foster care* juga mulai diperkenalkan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, konsep ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan sementara.

Konsep *foster care* memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam implementasinya. Pertama, konsep

ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sementara. *Foster family* atau keluarga pengganti yang menjadi tempat tinggal sementara bagi anak-anak diharapkan dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Selain itu, konsep *foster care* juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat luas dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak dalam sistem *foster care*.

Paska Indonesia melakukan ratifikasi konvensi hak anak, pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia kemudian mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Sampai saat ini sudah 196 negara meratifikasi konvensi tersebut. Dari sejumlah negara tersebut, terdapat negara muslim yang juga melakukan ratifikasi di antaranya Indonesia, Malaysia, Turki, dan Tunisia.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, terdapat tiga sistem yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu hukum barat, hukum adat, dan hukum agama. Indonesia merupakan suatu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara agama tertentu. Sebagai negara bangsa, Indonesia memiliki

karakteristik tersendiri dalam sistem negaranya. Dimana negara Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler, sehingga norma-norma hukum agama, dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil dalam pembentukan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan nasional (Najib, 2020).

Berdasarkan kajian literatur penulis lakukan melalui yang *google scholar* terdapat beberapa penulisan yang serupa dengan tema komparasi hukum keluarga di negara muslim, namun sebagian besar membahas terkait reformasi hukum keluarga secara umum, isu poligami, *hadhonah* secara umum, namun tidak ada yang membahas pengaturan pengasuhan dalam lembaga/ panti sosial secara khusus. Terkait dengan penulisan yang serupa dengan tema yaitu Perbandingan Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Sholihah, 2018), Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Bahroni, 2019) yang melihat dari aspek dispensasi kawin, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak (Nurjanah, 2017) yang melihat bagaimana hukum Islam memberikan keberpihakan dalam perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengasuhan anak di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengasuhan anak di negara lainnya seperti Malaysia, Turki, dan Tunisia?

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosio yuridis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (Fajar & Achmad, 2010).

B. KOMPARASI BEBERAPA NEGARA

1. Indonesia

Di Indonesia, agama ini dianut oleh sekitar 87,2% dari seluruh jumlah penduduk, sementara Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Negara Republik Indonesia berpenduduk kurang lebih 235 juta jiwa. Ini adalah negara Muslim terbesar di dunia. Agama lain yang diakui adalah Protestan (6,9%), Katolik Roma (2,9%), Hindu (1,7%), Budha (0,7%), Konghuchu (0,05%). Ham-

pir semua orang di Indonesia berbicara dalam bahasa resmi, Bahasa Indonesia, meskipun banyak kelompok etnis di nusantara juga memiliki bahasa mereka sendiri (Badan Pusat Statistik, 2024).

Hukum di Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar sub-sistem hukum yaitu: sistem hukum barat, hukum adat, dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita. Sementara sistem hukum adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (Arab oriented) dan lebih lekat kepada tradisi madzhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab-kitab fiqh Syafi'iyyah (Muthohhar, 2003). Cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri

muslim dan fatwa-fatwa ulama (Mudzadar, 2003).

Sejarah panti asuhan di Indonesia telah berlangsung sejak awal abad ke-17, atau sekitar awal 1600-an. Kala itu panti asuhan yang ada dikelola oleh gereja, keluarga militer Belanda maupun Inggris serta masyarakat. Umumnya mereka menyelamatkan anak-anak yang ayahnya meninggal dunia karena perang atau sebab lainnya. Para anak yatim ini kebanyakan memiliki ibu orang Indonesia

Bagi masyarakat muslim sendiri pada saat itu, poligami berkembang secara tertutup hingga kelahiran anak-anak dari istri kedua dan seterusnya tidak tercatat dan dikhawatirkan terjadinya banyak kemudharatan. Para tokoh Islam mulai memikirkan pendirian panti asuhan. Kemudian berdirilah dua panti asuhan Islam. 'Roemah Piatoe Muslimin' didirikan Juli 1931 oleh Ibu Siti Zahara Gunawan. Sebulan kemudian (Agustus 1931) berdiri Panti Asuhan 'Daaroel Aitam' yang diprakarsai sejumlah habaib dan kiai Ibu Kota. Kedua panti asuhan itu hingga kini masih tetap berdiri. Masing-masing di Kramat Raya No. 11, dekat proyek Senen, dan Jl KH Mas Mansyur, dekat proyek Tanah Abang (Sejarah Panti Yatim Indonesia).

Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak anak pada tahun 1990 dan mengadopsi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002). Dalam

perkembangannya berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Sosial bersama Save The Children pada tahun 2006 dan 2007 di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, termasuk unit pelayanan teknis Kementerian Sosial di Pati Jawa Tengah (Kementerian Sosial, 2011) ditemukan bahwa pengasuhan di dalam lembaga lebih berfungsi sebagai lembaga pendidikan dimana 90% orang tuanya masih hidup dan bukan sebagai lembaga pengasuhan. Selain itu pengurus panti sosial tidak memiliki pengetahuan mengenai konsep pengasuhan.

Adapun hasil penelitian terhadap anak, memberikan gambaran tentang kehidupan keseharian mereka di panti dan luar panti, Sisi kehidupan yang dianggap menyenangkan diantaranya adalah banyak teman sedangkan yang menyedihkan umumnya adalah karena terpisah jauh dari keluarga, makanan yang buruk, keharusan bekerja di panti, dan aturan yang ketat (Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Berdasarkan penelitian tersebut, disadari bahwa pengasuhan dalam lembaga di panti sosial merupakan alternatif terakhir artinya pengasuhan yang utama tetap di dalam keluarga inti atau keluarga pengganti, hal tersebut sesuai dengan konsep *hadhonah* dalam hukum Islam.

Maka dalam perubahan UU 23/2002, dalam pengaturan pasal terkait dengan penetapan kuasa asuh, perwalian, dan pengangkatan anak dalam UU 35/2014 dinyatakan ditetapkan oleh pengadilan. Artinya ranah penetapan tetap menjadi kompetensi/kewenangan pengadilan, namun dalam proses penilaian atau asesmen dalam bentuk rekomendasi dilakukan oleh kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dilakukan oleh pekerja sosial.

Pasal 1 angka 1 PP 44/2017 menyatakan definisi pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks perwalian, hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP 29/2019), dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Adapun wali dapat berasal dari: keluarga anak, saudara anak, orang lain, atau badan hukum. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/ lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Berdasarkan pengaturan PP 44/2017 dan PP 29/2019 pengasuhan dalam lembaga

dapat dilakukan dalam konteks pengasuhan dan perwalian.

2. Malaysia

Malaysia adalah negara federal multi-etnis dengan populasi sekitar 25 juta orang, dimana sekitar 60% adalah Muslim dan 40% adalah non-Muslim. Kelompok non-Muslim terdiri dari umat Buddha (19%), Kristen (9%), Hindu (6,3%), dan Sikh (0,4%). Di Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Konstitusi Federal, “Islam sebagai agama federasi”, yang poin kesepakatannya adalah Malaysia bukan untuk membangun negara Islam, tetapi mengatur tatanan hidup dan hal-hal yang menyangkut seremonial daerah setempat, diatur secara Islam. Tetapi bagi penganut agama lain, tetap melaksanakan prinsip agamanya secara damai dan harmonis di wilayah federasi. Di Malaysia, hukum yang umumnya mengatur umat Islam adalah hukum Islam (Syariah) dalam bentuknya yang biasa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan wacana hukum 4 (empat) madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbal, meskipun dalam praktiknya pengadilan syariah mengikuti doktrin madzhab Syafi'i (Otto, 2010).

Hukum Islam mempunyai peranan penting dalam penerapan hukum sosial, seperti hukum keluarga, hukum politik, dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah

seperti zakat, wakaf, perwalian, perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Sedangkan dalam penerapannya masih dipengaruhi adat. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Dalam segala ketetapan masih kental dipengaruhi dengan adat setempat.

Pengaturan hukum Islam di Malaysia dikodifikasikan dalam beberapa undang-undang berdasarkan masing-masing negara bagian di Malaysia, yang dipelopori oleh Undang-Undang Hukum Islam (wilayah federal) tahun 1984. Permasalahannya adalah hukum pribadi dan keluarga umat Islam termasuk hukum Islam yang berkaitan dengan suksesi, wasiat dan wasiat, pertunangan, perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, pengangkatan anak, legitimasi dan perwalian. Oleh karena itu, setiap negara bagian mempunyai undang-undang tersendiri untuk mengatur Hukum Keluarga Islam.

Selain itu, setiap negara bagian mempunyai pengadilan syariahnya sendiri. Yurisdiksi terbatas pengadilan hanya berlaku bagi umat Islam dan berkaitan dengan hal-hal yang tercantum dalam Daftar II Jadwal Kesembilan Konstitusi Federal. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pengasuhan anak, namun mengatur bahwa seorang laki-laki yang telah menerima seorang anak yang bukan anaknya sebagai anggota keluarga akan dikenakan kewajiban untuk memelihara anak tersebut

Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) tahun 1984.

Malaysia telah meratifikasi konvensi hak anak sejak 17 Februari 1995 (Persekitatan Bangsa-Bangsa, 1995) dan meratifikasi antara lain ketentuan pengasuhan anak yang mengatur bahwa seorang anak yang untuk sementara atau selamanya kehilangan lingkungan keluarga berhak atas perlindungan dan bantuan khusus yang diberikan oleh negara. Anak yang tidak dapat tinggal bersama atau harus dipisahkan dari orang tuanya karena sebab-sebab tertentu seperti kematian orang tuanya, penelantaran, penelantaran atau penganiayaan berhak atas perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Alternatifnya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak tersebut, misalnya melalui penempatan anak asuh, kafalah, adopsi atau jika diperlukan pengasuhan dalam lembaga (Konvensi Hak-Hak Anak). Penempatan pengasuhan alternatif bagi anak dilakukan melalui keputusan pengadilan syariah atau melalui tindakan administratif Departemen Kesejahteraan Sosial.

Untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi hak anak, Malaysia telah memberlakukan Undang-Undang Anak Tahun 2001 untuk memastikan bahwa anak-anak akan diberikan pengasuhan dan perlindungan yang diperlukan, terutama bagi anak-anak yang tidak mendapatkan lingkungan keluarga misalnya, mengatur bahwa bila seorang anak tidak mempunyai

orang tua atau wali atau ditelantarkan, anak tersebut ditempatkan dalam pengasuhan, pengasuhan dan pengawasan orang tua asuh yang sesuai yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk jangka waktu dua tahun atau sampai ia mencapai umur delapan belas tahun. Sambil menunggu penempatan di panti asuhan, anak tersebut akan ditempatkan di tempat yang aman (Pasal 30). Umumnya anak-anak yang dimasukkan ke dalam tempat aman atau panti asuhan adalah anak-anak yatim piatu serta anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau penelantaran oleh orang tua atau walinya. Semua panti asuhan anak telah ditetapkan sebagai tempat aman berdasarkan undang-undang.

Selain itu, penerimaan anak ke panti asuhan adalah untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pengadilan sampai keluarga kandungnya siap menerimanya atau sampai pekerja sosial atau petugas dari Departemen Kesejahteraan Sosial berhasil menemukan keluarga asuh yang cocok untuk mereka. Dalam semua kasus pengasuhan, orang tua kandung atau orang tua angkat, atau wali sah lainnya, untuk sementara waktu menyerahkan hak asuh anak secara sah. Penempatan anak asuh yang dilakukan di lembaga-lembaga kesejahteraan yang dikelola oleh Departemen Kesejahteraan Sosial, lembaga, atau perorangan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak dibiarkan begitu saja ketika membutuhkan perawatan dan perlindungan.

dungan serta rehabilitasi. Senada dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia juga menjalankan konsep pengasuhan alternatif dalam lembaga untuk anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin serta anak-anak terlantar, anak-anak yang dianiaya, dan ditelantarkan.

3. Turki

Turki sebagai negara yang dianggap oleh sebagian orang sebagai jembatan antara Eropa dan dunia Timur Tengah – salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di Timur Tengah, seperti Mesir dan Iran, dan merupakan kursus ideologis selama hampir satu abad. Atatürk mengubah Turki menjadi negara sekuler setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Negara Turki dengan jumlah penduduk 71,2 juta dengan persentase muslim 100% (Otto, 2010).

Penelitian ini mengkaji pengaruh agama terhadap hukum nasional di Turki dari masa Usmani pada abad 19 sampai tahun 2010. Periode sekularisasi hukum, yang dimulai dengan Tanzimat (reorganisasi) pada tahun 1839 sampai dengan deklarasi republik pada saat Atatürk memprakarsai reformasi sekuler, termasuk penghapusan klausul konstitusi yang sebelumnya mengidentifikasi agama negara yaitu Islam. Setelah rezim multipartai pada tahun 1945, terjadi kebijakan yang lebih liberal di bidang kebebasan agama dan hati nurani. Pada tahun 1961 negara memfasili-

tasi organisasi dan ideologi marxis dan sosialis melalui partai demokrasi sebagai Upaya untuk memperluas kebebasan beragama. Selama beberapa dekade terakhir, Islam tidak memberikan sentuhan terhadap hukum, tidak ada referensi agama yang dibuat dalam teks hukum. Perdebatan utama di Turki bukan tentang Islamisasi hukum, melainkan kebebasan beragama dan hati nurani (Otto, 2010).

Masyarakat Turki secara kebudayaan adalah budaya Islam, oleh sebab itu Bangsa Turki terikat dengan agama Islam dan berlangsung dalam rentang waktu cukup lama dan kuat. Bangsa Turki merupakan bangsa yang terkemuka di dunia Islam selama berabad-abad tahun lamanya. Dengan begitu pada masa jayanya Turki menjadi negara kekhalifahan terbesar Islam di dunia (Tohir, 2009).

Republik Turki dibentuk pada tahun 1923 merupakan peninggalan Republik Kekaisaran Ottoman. Etnis terbesar di Turki adalah suku kurdi disusul komunitas Arab, Armenia, dan Yunani. Adapun Bahasa resmi adalah Bahasa Turki, namun Bahasa Arab, Kurdi, Bahasa Armenia, dan Bahasa Yunani juga digunakan. Turki merupakan Negara yang termasuk kepada daratan Eropa Tenggara dan Asia kecil, berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur, Irak, Suriah dan laut tengah di selatan, laut hitam di utara, laut Aegea di Barat, dan Yunani di barat laut. Luas Negara sebesar 779.452

km², diantaranya 755.688 km² di Asia kecil (Semenanjung Anatolia) dan 23.764 km² di Eropa Tenggara. Persinggungan Islam dengan Turki melalui sejarah panjang, terhitung sejak abad pertama hijriah hingga suku-suku Turki menjadi penganut dan pembela Islam (Hoeve, 1994).

Menurut Sami Zubaida dalam bukunya *Law And Power In The Islamic Word* bahwa naiknya kekuasaan Eropa dalam bidang militer dan ekonomi, memaksa beberapa orang yang radikal untuk memikirkan kembali masalah penguasa dan elit di dunia Muslim, terutama di negara Ottoman. Reformasi hukum di Turki dikenal dengan “extra doctriner reform” nampak pada masa-masa awal reformasi Turki ditandai dengan munculnya protes kaum istri yang merasa terkekang oleh madzhab Hanafi, kemudian memunculkan solusi alternatif perceraian dari pihak isteri yang ditinggal suaminya yang lebih mengacu pada madzhab Hambali dan Maliki. Metode *intra doctriner reform* lebih mewarnai reformasi hukum di Turki seperti penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan dengan hanya mengakui perceraian yang terjadi dalam sidang di pengadilan (Zubaida, 2003).

Undang-Undang keluarga yang baru juga menciptakan kesatuan dalam struktur peradilan karena kewenangan di bidang hukum keluarga dihilangkan dari Peradilan Agama. Dalam penyusunan kaidah kekelu-

argaan ini, dipertimbangkan pandangan seluruh madzhab, bukan hanya madzhab Hanafi yang dianut mayoritas umat Islam. Turki merupakan lokomotif hukum keluarga, ketika negara ini menerbitkan *Ottoman Law of Family Right*, kemudian diikuti negara-negara Islam lain. Secara umum, substansi undang-undang hukum keluarga di dunia Islam modern telah beranjak dari konstruksi wacana fikih klasik dan telah mencoba memecahkan persoalan-persoalan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sehingga hak-hak perempuan dalam perkawinan (*marital right*) diakui (Mahmood, 1987).

Turki menandatangani Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) pada tanggal 14 September 1990, Konvensi tersebut diratifikasi melalui keputusan Dewan Menteri tanggal 9 Desember 1994 bernomor 4058, dan selanjutnya mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1995. Dalam sisi pengasuhan alternatif untuk anak, Turki menjalankan pengasuhan oleh orang tua asuh/keluarga asuh pengganti dan kemudian pengasuhan dalam lembaga menjadi alternatif terakhir. Pemerintah Turki membangun kompleks panti asuhan untuk korban pengungsi Suriah. Menurut Kementerian Dalam Negeri sampai terdapat 1,3 juta anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun yang merupakan pengungsi Suriah (EZ/Salam-Online).

4. Tunisia

Terletak di antara Libya di timur dan Aljazair di barat, Tunisia mencakup wilayah seluas 162.155 km² dan memiliki perbatasan sepanjang 1.250 km yang berbatasan dengan Laut Mediterania di utara dan timur. Sebagai bagian integral dari Maghreb dan negara paling utara di Afrika, Tunisia memiliki lokasi strategis yang mendominasi Selat Sisilia, antara Semenanjung Cap Bon dan Italia. Selat yang lebarnya 200 km ini merupakan salah satu jalur yang paling sering dikunjungi di dunia.

Islam menjadi agama resmi negara Tunisia, mayoritas masyarakatnya penganut madzhab Maliki dan sebagian Hanafi. Dalam persoalan perdata kedua madzhab tersebut sama-sama dipergunakan. Namun, banyak di antara berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Tunisia baik asing maupun asli Tunisia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti dinasti Syi'ah Fathimiyah sekitar abad X. Setelah dinasti itu tumbang, praktis kaum Syi'ah menjadi minoritas. Madzhab Hanafi berkembang di Tunisia karena pengaruh kekaisaran Usmani, namun pada akhirnya madzhab Maliki yang memiliki posisi lebih dominan. Semua hukum perkawinan bagi umat Islam seperti pernikahan, perceraian, warisan dan kepemilikan diserahkan pada yuridiksi pengadilan syariah yang diketuai oleh hakim-hakim bermadzhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan

pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga (Izomiddin, 2014).

Pada tanggal 13 Agustus 1956, Kode Status Pribadi diumumkan secara resmi oleh Bourguiba, yang mengakui hak sipil perempuan untuk memilih dan kelayakannya. Untuk itu diperlukan persetujuan wanita untuk menikah; menghapuskan penolakan dan menggantinya dengan prosedur pengadilan untuk perceraian; poligami dilarang; menetapkan usia minimal menikah adalah 18 tahun; dan melegalkan kontrasepsi dan aborsi. Meskipun ada lobi, kesetaraan gender dalam hal warisan tidak diakui.

Minoritas muslim di Tunisia bermadzhab Maliki. Undang-undang hukum keluarga di Tunisia dideklarasikan pada tahun 1956 dan telah mengalami beberapa amandemen. Tahun 2010 merupakan terakhir kali amandemen, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010. Salah satu aspek perkawinan yang diatur dalam Undang-undang ini ialah tentang pengasuhan anak. Ketentuan tentang pemeliharaan dalam Undang-Undang tersebut secara garis besar bersumber dari prinsip-prinsip madzhab Maliki dan Hanafi. Dalam madzhab Maliki, dinyatakan bahwa jika seseorang mentalak istrinya maka pemeliharaan anak menjadi hak seorang ibu. Alasannya karena seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dalam mema-

hami kemaslahatan dan kebutuhan anak daripada ayahnya (Muzhfar, 2003).

Tunisia dalam konstitusinya menyatakan Islam merupakan agama negara seperti halnya negara-negara Arab lainnya. Pasca kolonial, Tunisia melaksanakan law reform, dengan membuat hukum Islam dengan birokrasi modern. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Tunisia adalah negara yang paling radikal dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Kehadiran undang-undang hukum keluarga Tunisia, memicu pro kontra yang cukup sengit di Tunisia dan Dunia Arab saat itu. Di bawah pimpinan Habib Bourgoiba dengan latar belakang pendidikan Prancis, pemerintah Tunisia mengadakan reformasi terhadap sistem hukum yang berlaku.

Sebagian ulama mengatakan bahwa pembaharuan hukum keluarga di Tunisia sebagai upaya kontekstualisasi syariat Islam dalam kehidupan modern. Sebagian lain menganggap sebagai sekulerisasi masyarakat Islam. Seperti tokoh agama Pakistan yang mengkritisi Ordonansi Hukum Keluarga, beberapa ulama Arab juga menganggap pembaharuan hukum keluarga Tunisia sebagai sekulerisasi dan westernisasi hukum secara membabi buta, yang muncul karena perasaan inferior terhadap Barat (Nasution, 2012). Tetapi pemerintah Tunisia lebih memilih pandangan ulama-ulama pembaharu, seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Rifa'ah Tahtawi, dan pemikir Tunisia Tahir al-

Hadad. Menurut mereka syariat selalu berpijak kepada kebaikan dan menolak segala bentuk penindasan.

Dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam, Tunisia termasuk dalam tipologi progresif pluralistik dan ekstradoktrinal reform sebagaimana yang telah dilakukan oleh Turki (Huda, 2018). Progresif dimaknai sebagai aplikasi materi hukum keluarga yang sangat dinamis dan sensitif gender seperti larangan poligami, pernikahan mempelai perempuan tanpa wali, dan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang sama. Pluralistik dimakni bahwa tujuan pemberlakuan hukum keluarga di Tunisia diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan anutan madzhabnya. Sedangkan *extradoktrinal reform* dimaknai bahwa metode yang dipakai adalah dengan melakukan reinterpretasi teks al-Qur'an dan Sunnah dengan berbagai analisis sosial, serta adanya ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan.

Pengadilan yang berlaku di Tunisia adalah satu pengadilan tanpa membedakan agama tertentu yang artinya Tunisia memberlakukan unifikasi hukum. Tunisia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Masyarakat Tunisia menyerahkan laporan awalnya kepada Komite pada tanggal 16 Mei 1994, laporan kedua pada tanggal 16 Maret 1999 (dengan penundaan beberapa bulan), dan laporan ketiga pada tanggal 6 Juni 2008,

yaitu lebih dari empat tahun setelah tanggal jatuh tempo. Observasi Penutup yang terakhir disampaikan oleh Komite setelah sidangnya yang ke-54 pada tanggal 16 Juni 2010. Tidak ada laporan alternatif yang disampaikan sejak CRC diratifikasi oleh Tunisia. Anak (CRC) pada tanggal 30 Januari 1992 beserta Opsional.

Tunisia sudah memiliki regulasi pengaturan anak dalam Kode Perlindungan Anak tahun 1995. Paska meratifikasi konvensi hak anak, Tunisia membentuk Undang-Undang No. 2006-48 tanggal 17 Juli 2006 meninjau Statuta Umum Kota dan membuat undang-undang yang mengatur dewan kota anak-anak, mempercayakan ketua Komisi Urusan Sosial dan Keluarga dan sekretaris jenderal kota untuk membimbing dan membantu manajemen, namun pengaturan yang melaksanakan rekomendasi konvensi hak anak tersebut sampai saat ini belum ditetapkan.

Sebagai negara yang sering dilanda konflik dan saat Tunisia mengadopsi pemeliharaan anak dalam lembaga, bahkan sejak awal krisis Libya hampir 660 ribu warga Libya dan 200 ribu berkebangsaan lain masuk ke Tunisia. Banyak anak pengungsi tiba di Tunisia tanpa identitas atau pun dokumen yang salah. UNICEF memperkirakan pada tahun 2009 sebanyak 130 ribu anak menjadi yatim piatu dan ditempatkan dalam panti asuhan. Kewenangan penempatan anak dalam keluarga asuh sudah dikembangkan dan dilaksana-

kan oleh Kementerian Sosial. Walaupun sudah dilakukan upaya pengembangan konsep pengasuhan alternatif untuk anak melalui keluarga pengganti, namun pendekatan pengasuhan dalam lembaga (panti sosial anak) masih tetap tinggi dan tidak berubah dan lebih mengedepankan proses adopsi (UNICEF, 2011).

E. PENUTUP

Adapun berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan. Dalam sejarah pengasuhan Islam yang dikenal adalah pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga lain dan tidak dikenal konsep pengasuhan dalam lembaga. Konsep pengasuhan Islam, setiap anak yatim yang ditinggal ayahnya, merupakan kewajiban kakek, paman, atau kakak untuk merawat dan memelihara termasuk menjaga hartanya.

Negara Indonesia, Malaysia, Turki, dan Tunisia mengadopsi pengasuhan alternatif untuk anak melalui lembaga sebagai alternatif terakhir apabila tidak ada pengasuhan dalam keluarga dan keluarga pengganti. Walaupun keempat negara sudah mengembangkan pengasuhan alternatif ke keluarga pengganti, namun berdasarkan catatan UNICEF Tunisia pendekatan pengasuhan dalam lembaga di Tunisia masih tetap tinggi.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024). *Agama di Indonesia*, 2024. Diakses dari Agama di Indonesia, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
- Bahroni, A., Sari, A.G., Widayati, S.C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Lincoln: University of Nebraska.
- Ensiklopedi Islam* (1994). Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Fajar, M. ND & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep)*. Depok: Rajawali Pers. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Huda, M. (2018). *Hukum Keluarga: Potret Keberagaman Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Izomiddin. (2014). Tipologi Pemikiran Pembaharuan hukum Islam (Syari'ah) Abdullah Ahmad Al-Na'im, *Intizar*, No.1.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mudzhar, M.A. (1991). Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4, tahun II. Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam. DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7028>
- Mudzhar, M.A. (2012). *Pemberian Sanksi atas Pelanggaran UU Perkawinan di Negara-Negara Islam (Kajian Perbandingan Enam Negara)*. Makassar: IAIN Sultan Maulana Hasanudin.
- Muthohhar, A.H. (2003). Pengaruh Madzhab Syafi'i di Asia Tenggara, Fiqh dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia. (Semarang: Aneka limit) dalam M. Sularno (ed.), *Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Mawardi, Edisi XVI.
- Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020. DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.267
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia.
- Nurjanah, S. (2017). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Al 'Adalah*. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>
- Otto, J.M. (2010). *Sharia Incorporated, A Comparative Overview Of The Legal*

- Systems Of Twelve Muslim Countries In Past And Present*. Leiden: Leiden University.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang *Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Al-Afkar. *Journal for Islamic Studies*. Vol. 1, No.2, July 2018. DOI10.5281/zenodo.3554863
- Tohir, A. (2009). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Zubaida, S. (2003). *Law And Power In The Islamic Word*. London: MPG Books.

Model Dukungan Holistik untuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kota Bontang: Sinergi antara Sekolah, Keluarga, dan Pekerja Sosial

Yudithia Hiawati

Pekerja Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Email: adithahimawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sekolah dalam mendukung Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kota Bontang melalui kolaborasi antara guru, keluarga, dan pekerja sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kebutuhan pelatihan guru, mekanisme pelaporan yang efektif, dan kerja sama lintas lembaga yang lebih terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan holistik, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi guru dan keterlibatan pekerja sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial AMPK. Implementasi sistem dukungan yang terstruktur berpotensi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak di sekolah, serta mendukung perkembangan akademis, sosial, dan emosional mereka secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, dan efektif secara konsisten.

Kata kunci: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), lingkungan pendidikan inklusif, kolaborasi lintas lembaga, dukungan sekolah, pekerja sosial

Abstract

This study aims to examine the role of schools in supporting Children Requiring Special Protection (AMPK) in Bontang through collaboration among teachers, families, and social workers. A qualitative approach is used to understand teacher training needs, effective reporting mechanisms, and a more integrated cross-agency collaboration. Findings show that holistic support, including ongoing teacher training and social worker involvement, can enhance AMPK's psychosocial well-being. Implementing a structured support system can create a safe and inclusive educational environment, optimally protecting children at school and supporting their academic, social, and emotional development comprehensively and consistently.

Keywords: Children requiring special protection (AMPK), inclusive educational environment, interagency collaboration, school support, social workers

A. PENDAHULUAN

Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) menghadapi berbagai

tantangan yang mengancam perkembangan psikososial dan prestasi akademis mereka. Sebagaimana Thompson (2015) mengemu-

kakan bahwa kehidupan yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikososial anak dan mengganggu pencapaian akademis mereka. Kelompok ini mencakup anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau berada dalam situasi keluarga yang tidak stabil (Werner & Smuth, 1992). Dalam konteks ini, sekolah, sebagai institusi yang hampir setiap hari berinteraksi dengan anak-anak, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan (Bronfenbrenner, 1979; UNICEF, 2020). Namun, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (2023) mengemukakan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan AMPK secara optimal. Di Kota Bontang, berdasarkan kajian dari Badan Pusat Statistik Kota Bontang (2024) sebagai wilayah yang berkembang pesat secara sosial-ekonomi, isu ini menjadi semakin relevan. Perkembangan ekonomi yang cepat dan urbanisasi sering kali disertai dengan peningkatan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (BPS, 2023). Hal ini diakibatkan oleh tekanan sosial serta tantangan dalam struktur keluarga.

Berangkat dari pemahaman bahwa peran sekolah sebagai bagian dari *micro-system* yang penting dalam mendukung perkembangan anak (Bronfenbrenner, 1979;

Fullan, 2014; PUSPAKA, 2023), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sekolah dapat berperan lebih efektif dalam mendukung AMPK. Dengan mengidentifikasi peran sekolah, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi berbasis temuan untuk mengembangkan sistem dukungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Saat ini, sebagian besar penelitian yang membahas dukungan bagi AMPK cenderung fokus pada pendekatan individu, yaitu peran guru atau orang tua secara terpisah (Davies & Hayes, 2014; UNICEF, 2020; Thompson, 2015). Namun, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi pentingnya kolaborasi lintas lembaga, terutama antara sekolah dan pekerja sosial, yang dapat memberikan dukungan lebih komprehensif. Penelitian yang mengupas implementasi dukungan psikososial di lingkungan sekolah perkotaan seperti Kota Bontang pun masih terbatas. Di sinilah kesenjangan penelitian ini muncul, di satu sisi, peran sekolah sangat strategis, namun belum ada panduan terstruktur mengenai kolaborasi yang efektif antara guru, pekerja sosial, dan keluarga dalam mendukung AMPK.

Urgensi penelitian ini semakin jelas mengingat meningkatnya angka anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus di sekolah. Sebagaimana Save the Children (2023) menggarisbawahi Perlindungan anak menjadi semakin penting di daerah

yang terpengaruh oleh masalah sosial dan ekonomi, terutama di perkotaan dengan jumlah penduduk yang meningkat, yang dapat membahayakan kesejahteraan psikososial anak-anak yang sudah dalam situasi rentan. Dengan begitu, tanpa dukungan yang memadai, anak-anak ini berisiko mengalami hambatan psikososial dan penurunan motivasi belajar yang dapat berdampak jangka panjang pada masa depan mereka (Werner & Smith, 1992). Penelitian ini berupaya memberikan solusi melalui pengembangan sistem dukungan yang terstruktur di sekolah, yang mencakup pelatihan bagi guru, mekanisme pelaporan yang efektif, dan kolaborasi erat antara sekolah dan lembaga sosial (UNICEF, 2020; Fullan, 2014, PUSPAKA, 2023; Epstein, 2009; Davies & Hayes, 2014). Dengan memahami kebutuhan dan tantangan di lapangan, diharapkan rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan AMPK dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya penting bagi pengembangan sistem dukungan di sekolah tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak di Bontang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih baik dalam mendukung AMPK, sekaligus membuka jalan bagi kolaborasi

lintas lembaga yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran sekolah dalam mendukung AMPK di Bontang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, angket terbuka, dan observasi lapangan yang melibatkan guru, orang tua, dan pekerja sosial, guna memahami proses identifikasi, dukungan, dan kolaborasi bagi AMPK. Analisis data dilakukan dengan metode tematik, mulai dari koding awal hingga pengelompokan tema-tema utama yang dianalisis lebih lanjut menggunakan teori yang relevan. Untuk validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan member checking. Etika penelitian dijaga dengan memastikan kerahasiaan responden dan partisipasi sukarela. Pendekatan ini diharapkan memberikan wawasan menyeluruh untuk pengembangan kebijakan dukungan bagi AMPK di sekolah.

B. LANDASAN TEORI

1. Peran Observasi Guru dalam Identifikasi AMPK

Menurut teori *Ecological Systems* oleh Bronfenbrenner (1979), anak dipengaruhi oleh sistem-sistem sosial yang saling berkaitan, termasuk sekolah sebagai lingkungan mikro yang berperan langsung dalam perkembangan anak. Peran observasi oleh guru merupakan bagian dari “*micro-system*” yang berinteraksi langsung dengan

anak dan membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus.

Wardle (2013) menyatakan bahwa guru memiliki posisi yang unik untuk mengamati perubahan perilaku anak di lingkungan yang terstruktur seperti sekolah. Dengan keterampilan observasi, guru dapat mendeteksi tanda-tanda awal ketidakberfungsian emosi atau perilaku yang mungkin menunjukkan adanya masalah di rumah atau lingkungan sosial anak lainnya. Hal ini juga relevan dengan konsep “*situational awareness*” dalam pendidikan, di mana pengamatan aktif adalah langkah awal dalam memberikan intervensi yang tepat.

2. Kebutuhan Pelatihan yang Mendalam dan Berkesinambungan

Dalam teori *Adult Learning atau Andragogy* oleh Malcolm Knowles, Holto & Swanson (2014) pelatihan untuk orang dewasa, termasuk guru, perlu difokuskan pada aplikasi langsung di lingkungan kerja dan relevan dengan kebutuhan yang mereka hadapi. Pelatihan yang berkesinambungan juga penting untuk memenuhi tantangan-tantangan baru, seperti menangani perlindungan khusus bagi anak di sekolah.

Menurut Davies dan Hayes (2014), pelatihan bagi guru untuk menangani kasus kekerasan dan penelantaran anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membangun keterampilan praktis. Pelatihan yang berkesinambungan dapat membantu guru

lebih siap secara mental dan emosional untuk menangani AMPK, terutama yang mengalami trauma atau kesulitan psikologis.

3. Kurangnya Kolaborasi antara Sekolah dan Pekerja Sosial

Teori *Collaborative Social Work* oleh Bronstein (2003) menyatakan bahwa kolaborasi antarprofesi sangat penting dalam menangani masalah kompleks, termasuk perlindungan khusus bagi anak. Kolaborasi antara pekerja sosial dan guru dalam lingkungan sekolah dapat menciptakan *multidisciplinary approach* yang memperkuat jaringan dukungan untuk anak.

Pendapat dari UNICEF (2020) menunjukkan bahwa sinergi antara sekolah dan layanan sosial dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus-kasus AMPK, karena pekerja sosial memiliki keterampilan khusus dalam intervensi sosial yang mungkin tidak dimiliki oleh guru. Ahli lain, Thompson (2015), menyebutkan bahwa kolaborasi lintas profesi, seperti yang dilakukan dalam model layanan kesehatan mental berbasis sekolah, telah terbukti meningkatkan hasil bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

4. Tantangan dalam Membangun Dukungan Psikososial bagi AMPK

Teori *Psychosocial Development* oleh Erikson (1959) menjelaskan pentingnya membangun rasa percaya diri dan

identitas yang sehat pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang mungkin mengalami trauma atau ketidakstabilan dalam hidup mereka, memerlukan dukungan tambahan untuk membangun aspek psikososial yang sehat.

Menurut Werner dan Smith (1992), anak-anak yang tumbuh dalam kondisi sulit lebih rentan mengalami gangguan perkembangan psikososial. Mereka berpendapat bahwa intervensi yang berfokus pada peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan sosial anak dapat membantu mereka menghadapi tantangan hidup. Di lingkungan sekolah, penting bagi guru untuk menjadi *supportive adults* yang menyediakan dukungan psikososial melalui interaksi yang positif dan penuh empati.

5. Rekomendasi untuk Sistem Pendukung yang Lebih Efektif

Menurut *Systems Theory* oleh Bertalanffy (1968), organisasi atau sistem (seperti sekolah) harus berfungsi secara sinergis dan responsif terhadap lingkungan eksternal. Pengembangan sistem pendukung yang efektif di sekolah akan memungkinkan respons yang cepat dan terkoordinasi ketika seorang AMPK teridentifikasi.

Epstein (2009) menjelaskan bahwa sistem pendukung yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memberikan intervensi yang komprehensif bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan

memiliki sistem pelaporan yang jelas, dukungan lintas lembaga, dan kolaborasi yang terstruktur, sekolah dapat memberikan layanan yang lebih responsif. Ahli pendidikan sosial, Fullan (2014), menekankan bahwa sistem pendukung berbasis sekolah harus dirancang agar fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak untuk meningkatkan efektivitas dukungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 mencakup dukungan holistik bagi AMPK yang memerlukan keterlibatan aktif dari tiga aktor utama: sekolah/guru, keluarga, dan pekerja sosial. Setiap aktor memiliki peran spesifik dalam identifikasi, intervensi psikososial, kolaborasi, pelatihan, serta sistem pelaporan dan respons. Dukungan yang efektif memerlukan sinergi di antara peran-peran ini, sehingga setiap aspek kebutuhan anak dapat terpenuhi secara komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah di Kota Bontang memegang peran penting dalam mendukung anak-anak rentan, namun membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan sistem pendukung internal yang lebih kuat. Dukungan dari pekerja sosial dan lembaga perlindungan anak secara berkelanjutan sangat penting untuk membangun lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi anak-anak rentan.

Peran	Sekolah/Guru	Keluarga	Pekerja Sosial
Identifikasi	Guru memiliki peran utama dalam observasi awal terhadap perubahan perilaku dan emosional anak di lingkungan sekolah.	Keluarga diharapkan berperan dalam memberikan informasi awal terkait kondisi anak untuk mendukung proses identifikasi.	Pekerja sosial membantu dalam analisis yang lebih mendalam dan menyediakan perspektif profesional terhadap situasi anak.
Intervensi Psikososial	Guru berperan sebagai <i>supportive adults</i> yang memberikan dukungan emosional dan pengembangan kepercayaan diri anak.	Keluarga menjadi sumber utama dukungan emosional dan stabilitas bagi anak di luar lingkungan sekolah.	Pekerja sosial bertindak sebagai mediator yang menyusun program intervensi khusus sesuai dengan kebutuhan psikososial anak.
Kolaborasi	Sekolah menginisiasi kerjasama lintas lembaga dan memastikan guru terlibat aktif dalam pembentukan tim dukungan.	Keluarga bekerja sama dengan pihak sekolah dan pekerja sosial untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara holistik.	Pekerja sosial mengkoordinasi kolaborasi antara sekolah dan keluarga, memastikan sinergi dalam implementasi dukungan.
Pelatihan dan Kesiapan	Sekolah menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk menangani kasus AMPK dengan keterampilan yang tepat.	Keluarga diberdayakan untuk memahami dan mengelola kondisi anak dengan bimbingan dari pekerja sosial.	Pekerja sosial menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi sekolah dan keluarga untuk meningkatkan kesiapan mereka.
Sistem Pelaporan dan Respons	Guru di sekolah memainkan peran penting dalam melaporkan kasus AMPK dan berperan dalam sistem respons yang cepat.	Keluarga terlibat dalam memberikan umpan balik kepada sekolah dan pekerja sosial terkait efektivitas dukungan yang diberikan.	Pekerja sosial memfasilitasi proses pelaporan dan memastikan tindak lanjut cepat melalui jaringan layanan sosial.

Tabel 1. Hasil Analisis Peneliti Tahun 2024

Analisis ini menggarisbawahi bahwa sinergi antara sekolah, orang tua, dan pekerja sosial merupakan faktor utama yang dapat memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang rentan di lingkungan sekolah.

a. Identifikasi Anak Rentan

Para informan, terutama dari kalangan guru, menggunakan observasi terhadap sikap dan perilaku sebagai metode utama dalam mengenali siswa yang mungkin rentan atau

memerlukan perlindungan khusus. Beberapa indikasi awal yang diidentifikasi meliputi sikap anak yang cenderung menyendiri, perubahan dalam ekspresi emosional, serta penurunan motivasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan observasi perilaku adalah elemen penting dalam identifikasi awal risiko pada anak-anak rentan di sekolah.

b. Kebutuhan Pelatihan dan Kesiapan Guru

Guru menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Informan mengungkapkan bahwa pengetahuan mereka dalam menangani kasus-kasus tersebut masih terbatas, dan mereka membutuhkan pelatihan tambahan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerentanan secara lebih efektif dan menanggapi dengan tepat. Beberapa guru juga menyebutkan bahwa mereka pernah mendapatkan pelatihan dari lembaga pemberdayaan perempuan, tetapi belum cukup dalam konteks dukungan khusus anak.

c. Kolaborasi dengan Pekerja Sosial

Kolaborasi antara sekolah dan pekerja sosial diakui masih sangat terbatas. Guru mengungkapkan bahwa selama ini belum ada mekanisme atau prosedur yang efektif untuk bekerja sama

dengan pekerja sosial atau lembaga perlindungan anak ketika seorang anak teridentifikasi sebagai rentan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama lintas lembaga untuk memperkuat sistem dukungan bagi anak-anak rentan. Beberapa informan merekomendasikan agar pekerja sosial lebih sering melakukan kunjungan ke sekolah untuk memberikan panduan langsung kepada guru dalam menangani kasus-kasus rentan.

d. Tantangan dalam Mendukung Anak Rentan

Tantangan terbesar yang dihadapi guru adalah membangun motivasi dan kepercayaan diri anak-anak rentan. Selain itu, guru juga kesulitan dalam memahami dan menangani masalah yang berasal dari lingkungan keluarga atau komunitas anak, yang memengaruhi kesejahteraan anak di sekolah. Tantangan lain termasuk kurangnya akses terhadap sumber daya atau dukungan eksternal, seperti pelatihan khusus dan akses langsung ke lembaga perlindungan anak.

e. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan temuan ini, para responden mengusulkan beberapa strategi untuk meningkatkan peran sekolah dalam mendukung anak-anak rentan:

- 1) Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan khusus yang lebih mendalam bagi guru dan staf sekolah tentang

cara mengidentifikasi dan mendukung anak-anak rentan, termasuk pengetahuan tentang tanda-tanda kekerasan, penelantaran, dan risiko pernikahan dini.

- 2) Peningkatan Kolaborasi: Perlunya integrasi antara sekolah dan lembaga sosial, dengan kunjungan rutin dari pekerja sosial untuk memberikan dukungan langsung dan konsultasi kepada guru dalam menangani kasus anak rentan.
- 3) Sistem Pelaporan yang Efektif: Pengembangan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses dan responsif di tingkat sekolah, untuk segera menindaklanjuti kasus anak rentan yang teridentifikasi.
- 4) Pendekatan yang Mendukung Psikososial Anak: Pengembangan pendekatan berbasis sekolah yang mendukung kesehatan mental dan emosional anak, seperti kegiatan yang meningkatkan rasa percaya diri dan keberhargaan diri anak-anak rentan.

D. PENUTUP

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dukungan holistik dari sekolah, keluarga, dan pekerja sosial sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikososial AMPK di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas

lembaga, pelatihan berkelanjutan untuk guru, dan sistem pelaporan yang efektif menjadi elemen kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. *Pertama*, guru memainkan peran penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda kerentanan pada anak melalui observasi perilaku. Namun, diperlukan pelatihan tambahan untuk memastikan identifikasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, guru dan pekerja sosial harus menjadi “supportive adults” yang mampu membangun rasa percaya diri anak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma atau ketidakstabilan emosional.

Kedua, sinergi antara sekolah, keluarga, dan pekerja sosial perlu ditingkatkan. Saat ini, mekanisme kerja sama lintas lembaga masih terbatas, sehingga membutuhkan prosedur yang lebih terstruktur. Sekolah membutuhkan sistem pelaporan yang cepat, responsif, dan terintegrasi untuk menangani kasus anak rentan secara efektif. Selain itu, keluarga perlu diberdayakan untuk memahami kebutuhan anak dan terlibat aktif dalam strategi intervensi, sehingga mendukung stabilitas emosional dan psikososial anak.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/>

- 18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2023, Februari 28). *Kota Bontang dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://bontangkota.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/65fd09a091bf933f2e6ec709/kota-bontang-dalam-angka-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2024, Maret 13). *Ekonomi Kota Bontang Tahun 2023 Tumbuh Sebesar 4,16%*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://bontangkota.bps.go.id/id/presrelease/2024/03/13/756/ekonomi-kota-bontang-tahun-2023-tumbuh-sebesar-4-16-persen.html>
- Bertalanffy, L. V. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Bronstein, L. R. (2003). A model for interdisciplinary collaboration. *Social Work*, 48(3), 297–306.
- Davies, L., & Hayes, D. (2014). *Global education in schools: Rethinking schools' commitment to social cohesion and citizenship*. Routledge.
- Erikson, E. H. (1959). *Identity and the life cycle*. International Universities Press.
- Epstein, J. L. (2009). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (3rd ed.). Corwin Press.
- Fullan, M. (2014). *The principal: Three keys to maximizing impact*. Jossey-Bass
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). (2023). *Data kasus kekerasan pada anak melalui Simfoni PPA*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2014). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA). (2023). *Peluncuran Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023: Memastikan perlindungan anak di lingkungan sekolah*. Diakses dari <https://www.puskapa.org>
- Save the Children. (2023). *Laporan kesejahteraan anak di Indonesia*. Save the Children Indonesia.
- Thompson, R. A. (2015). *The development of children*. Worth Publishers.
- UNICEF. (2020). *Guidelines on strengthening collaboration between schools and child protection services*. UNICEF Publications.
- Wardle, F. (2013). *Introduction to early childhood education: A multicultural approach* (7th ed.). Pearson.
- Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). *Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood*. Cornell University Press.

Strategi Graduasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kota Surakarta

Muhtar¹ Syofiyurrahman² Muhammad Alfaridzi³

¹) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas - BRIN

^{2,3}) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kementerian Sosial R.I.

Korespondensi, email: much.ngano17@gmail.com

Abstrak

Tulisan hasil kaji cepat ini bertujuan memahami strategi percepatan graduasi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surakarta. Kaji cepat dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan bulan Juli 2024 selama empat hari. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dinilai mengetahui secara baik pelaksanaan PKH. Mereka adalah: Penerima Manfaat PKH, Pendamping PKH, Koordinator PKH, dan Pejabat Intansi Sosial setempat. Disamping itu, dilakukan observasi dan studi dokumen bahan yang dinilai relevan. Hasil kaji cepat menunjukkan, strategi yang dilakukan oleh pendamping PKH adalah: (i) pendekatan personal terhadap penerima manfaat; (ii) bekerja sama dengan petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, serta dengan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat; (iii) memanfaatkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara guna menstimuli kesadaran penerima manfaat untuk graduasi; (iv) menginformasikan kepada penerima manfaat, wisuda graduasi dilakukan oleh walikota/wakil walikota. Di samping itu, pelaksana PKH melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat, antara lain dengan Gojek Tokopedia untuk pengembangan usaha, dan pemberian nomor induk berusaha serta sertifikasi halal hasil usaha dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Temuan tersebut penting untuk terus dikembangkan dan dapat diadopsi daerah lain.

Kata Kunci: Strategi; Graduasi; Program Keluarga Harapan.

Abstract

The paper of this rapid study aims to understand the strategy for accelerating the graduation of beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Surakarta City. The qualitative approach of this study was conducted in July 2024 for four days. Data collection was carried out through interviews with informants who were considered to have good knowledge of the implementation of PKH. They are: PKH Beneficiaries, PKH Companions, PKH Coordinators, and Local Social Agency Officials. In addition, observations and document studies of materials that were considered relevant were carried out. The results of the study show that the strategies carried out by PKH companions are: (i) a personal approach to beneficiaries; (ii) collaborating with Integrated Service and Referral System officers, as well as with the head of the local Neighborhood Association/Resident Association; (iii) utilizing the Nusantara Economic Heroes Program to stimulate beneficiary awareness for graduation; (iv) informing beneficiaries that graduation is carried out by the mayor/vice

mayor. In addition, PKH implementers synergize and collaborate with local stakeholders, including Gojek Tokopedia for business development, and the provision of business registration numbers and halal certification of PKH beneficiary business results with the Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises Service. These findings are important to continue to be developed and can be adopted by other regions.

Keywords: Strategy; Graduation; Family Hope Program.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan, masih menjadi permasalahan sosial besar dunia hingga saat ini khususnya bagi negara berkembang, meskipun berbagai upaya penanggulangan-nya telah dilakukan. Hal itu setidaknya terlihat dari data Indeks Kemiskinan Multi-dimensi Global (MPI) yang menunjukkan bahwa Bank Dunia memperkirakan, sekitar 690 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim, yakni mereka yang bertahan hidup yang kurang dari \$1,90 per hari, angka yang mencerminkan kemunduran signifikan akibat pandemi Covid-19 dan krisis global lainnya. Data lain menunjukkan, sekitar 1,2 milyar orang dianggap miskin multidimensi, mereka menghadapi berbagai kekurangan di luar pendapatan, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai (Bernards, 2023).

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 1 Juli 2024 menunjukkan, persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2024 sebesar 9,03 persen (25,22 juta orang), menurun 0,33 persen poin (0,68 juta orang) pada bulan Maret 2023. Turunannya, persentase penduduk miskin perkotaan di angka 7,09 persen

(11,64 juta orang) pada bulan Maret 2024, turun dibandingkan bulan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen (11,74 juta orang). Sementara penduduk miskin perdesaan di bulan Maret 2024 sejumlah 11,79 persen (13,5 8 juta orang), menurun dibandingkan pada bulan Maret 2023 sebesar 12,22 persen 14,16 juta orang).

Di Kota Surakarta, berdasarkan data BPS kota setempat, yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2024, jumlah penduduk miskin sebesar 43.28 ribu orang (8,31 persen), turun 0,61 orang (0,13 persen) dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut, angka kemiskinan di Kota Surakarta sesungguhnya menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kemiskinan nasional. Kondisi tersebut merupakan hasil kerja keras dan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama para pemangku kepentingan, dan juga kolaborasi/sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta dengan Pemerintah Pusat, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan sejak tahun 2007, dan di Kota Surakarta dilaksanakan tahun 2015.

Kemiskinan, makna secara luas, terlihat dari pendapat Case & Fair (2007) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat lain, Chambers (2006), misalnya memaknai kemiskinan sebagai: (i) kondisi di mana kepemilikan pendapatan rendah; (ii) ketidakberdayaan, di mana seseorang memiliki kekuatan sosial yang rendah, seperti ketidakadilan dan kurangnya persamaan hak untuk memperoleh hidup yang layak; (iii) rentan, di mana seseorang dan/atau masyarakat seringkali tidak siap jika dihadapkan dalam kondisi/keadaan tak terduga yang memerlukan alokasi tabungan, seperti bencana alam dan biaya untuk pengobatan ke rumah sakit; (iv) ketergantungan pada pihak lain yang tinggi; (v) keterasingan, seperti tempat tinggal yang jauh dan minim akses dalam segala hal.

Dalam perspektif sosiologis, kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang multiparameter yang dapat diukur dengan berbagai cara baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif, seperti mengukur kemampuan individu, keluarga, dan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok, baik dalam perhitungan penghasilan per bulan, satuan kecukupan pengeluaran bahan pokok. Sedangkan perhitungan secara kualitatif, seperti mendeskripsikan realitas kemiskinan secara naratif dengan visualisasi data yang baik, berupa foto, video, dan

rekaman yang biasanya digunakan oleh peneliti konvensional (Siahaan, 2011).

Berdasarkan konsep tersebut, dalam konteks ini, kemiskinan yang dimaksud adalah sebagai kondisi di mana seseorang, keluarga, dan masyarakat tidak atau belum mencapai taraf kesejahteraan akibat akumulasi dari keterbatasan kepemilikan atau pendapatan, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan dan keterasingan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penulisan naskah ini didasari kaji cepat dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan bulan Juli 2024 selama empat hari di Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dinilai mengetahui dengan baik pelaksanaan PKH. Mereka adalah penerima manfaat PKH, Koordinator PKH Kota Surakarta, Pendamping PKH, dan pejabat Instansi sosial setempat. Disamping itu juga dilakukan observasi terhadap jenis usaha penerima manfaat PKH ketika melakukan wawancara di rumah/tempat tinggal mereka, dan studi dokumen bahan yang dinilai relevan.

Permasalahan utama yang mendasari penulisan ini adalah bahwa penerima manfaat enggan graduasi dari kepesertaannya sebagai anggota PKH karena merasa nyaman dengan bantuan PKH yang diterimanya selama ini. Bertolak dari permasalahan pokok tersebut, tujuan tulisan ini adalah untuk memahami strategi graduasi penerima manfaat PKH di Kota Surakarta.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Marrus, 2002). Pendapat lain menyatakan bahwa strategi adalah sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh (Quinn, 1999).

Adapun graduasi adalah berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH. Graduasi terdiri dari: (i) graduasi alamiah, yaitu berakhirnya masa kepesertaan penerima manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan, dan (ii) graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi, yakni berakhirnya masa kepesertaan penerima manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi (Permensos No. 1/2018 Tentang PKH).

Berdasarkan pengertian tersebut, strategi graduasi PKH yang dimaksud dalam konteks ini adalah upaya terencana

yang dilakukan oleh unit pelaksana PKH dalam upaya mengakhiri masa kepesertaan penerima manfaat PKH secara humanis.

Beberapa riset terkini terkait dampak positif pelaksanaan PKH dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga kurang mampu, banyak sekali pihak yang melakukannya dengan beragam tujuan dan kebutuhannya, diantaranya, Nova *et al.* (2022) menurutnya, PKH telah memberikan hasil yang diharapkan sesuai tujuan program. Muluk dan Rahmawati (2024), PKH efektif menurunkan angka kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial. Kemudian, Julfani dan Mirzaya (2023), bahwa PKH memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan tunai, mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang ditargetkan. Tuharea dan Soumokil (2023), PKH berdampak positif bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pendapatan, perilaku, dan kemandirian, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. PKH juga memainkan peran transformatif dalam memenuhi kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat (Sihotang & Sihotang, 2022).

Kaji cepat ini secara spesifik untuk memahami strategi akselerasi graduasi

penerima manfaat PKH di Kota Surakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dinilai sebagai nilai kebaruan atau *novelty* dari tulisan ini.

B. PROGRAM KELUARGA HARAPAN

PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat memperoleh berbagai manfaat dalam upaya membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan diharapkan terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi, melalui intervensi sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selama masa kepesertannya, penerima manfaat PKH memperoleh berbagai manfaat, antara lain: bantuan sosial berupa uang, program komplementaritas [Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), program afirmasi sekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), rumah sejahtera terpadu (RST), bantuan pangan non tunai (BPNT)/program Sembako, pendampingan sosial berupa pelatihan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping PKH. Melalui berbagai kemanfaatan tersebut diharapkan penerima manfaat PKH perlahan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan menjadi mandiri, dan oleh karenanya muncul kesadaran dari dirinya untuk graduasi dari sebagai anggota PKH.

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan*, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial R.I. dan ditetapkan sebagai penerima manfaat. Tujuan PKH adalah: (1) meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (5) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada penerima manfaat

PKH yang diluncurkan tahun 2007, sampai dengan tahun 2022 telah menjangkau 10 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota, 37 provinsi. Kriteria penerima manfaat PKH adalah: (1) komponen kesehatan, dengan kategori ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun); (2) komponen pendidikan, yang meliputi kategori anak usia sekolah dasar/madrasah ibtidiyah (satuan pendidikan keagamaan atau sederajat), anak usia sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (satuan pendidik-

an keagamaan atau sederajat), anak usia sekolah menengah atas/madarah aliyah (satuan pendidikan keagamaan atau sederajat), serta anak usia 6-12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahu; (3) komponen kesejahteraan sosial, dengan kategori penyandang disabilitas dan lanjut usia yakni 75 tahun keatas (Juknislak PKH, 2024).

Sebagai bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan kepada penerima manfaat untuk: (1) memeriksakan kesehatan secara rutin khususnya bagi ibu hamil dan bayinya; (2) presensi hadir anak sekolah melebihi 85 persen; (3) lanjut usia dan penyandang disabilitas mengikuti penyuluhan. Disamping itu, penerima manfaat PKH juga wajib mengikuti pertemuan secara rutin sebulan sekali yang dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah penerima manfaat PKH. Pertemuan tersebut dikenal dengan sebutan “Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga” (P2K2), yang bertujuan: (1) meningkatkan pengetahuan penerima manfaat bahwa anak-anak usia sekolah, wajib bersekolah dan pentingnya memberikan perlindungan bagi mereka; (2) meningkatkan kesadaran hidup dan berperilaku sehat dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan/atau di desa/kelurahan setempat; (3) meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan keluarga tentang pentingnya pengalokasian dana untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan

tidak pokok; (4) menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya bagi warga lanjut usia dan disabilitas. Dalam perkembangannya terkini (Modul P2K2) disempurkan dengan ditambahkan praktik pengasuhan dan pendidikan anak/menjadi orang tua yang lebih baik (Modul 1), Merencanakan/merintis usaha (Modul 2), pentingnya asupan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui, pencegahan stunting (modul 3), perlindungan terhadap kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak dan disabilitas (Modul 4).

C. SELAYANG PANDANG KOTA SURAKARTA

Surakarta, yang juga sering disebut Kota Solo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Batas administratif Kota Surakarta: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar di bagaian utara, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan. Kabupaten Sukoharjo, di bagian timur, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo merupakan perbatasan di sebelah barat. Terdapat lima wilayah kecamatan di Kota Surakarta, yaitu: Kecamatan Laweyan, Kecamatan Laweyan Serengan, Kecamatan Laweyan Pasar Kliwon, Kecamatan Laweyan Jebres, dan Kecamatan Laweyan Banjarsari. Di lima wilayah kecamatan tersebut terdapat 51 kelurahan, 592 RW, 2.645 RT, dan 129.380 KK jumlah keseluruhannya. Jumlah penduduknya sebanyak 578.350

jiwa, yang terdiri dari 285.591 jiwa laki-laki dan 292.759 jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, angka kemiskinannya 8,31 persen di tahun 2023 (BPS Kota Surakarta, 2023).

Dalam kondisi demikian, tetap relevan PKH dilakukan di Kota Surakarta sebagai intervensi sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Koordinator PKH Kota Surakarta, dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan 2023 terdapat 400 penerima manfaat graduasi, masing-masing tahun 200 penerima manfaat.

D. STRATEGI GRADUASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOTA SURAKARTA

Strategi graduasi penerima manfaat PKH bidang ekonomi yang dilakukan oleh pelaksana PKH Kota Surakarta adalah:

1. Pendekatan Personal

Pendekatan personal terhadap penerima manfaat PKH dilakukan oleh pelaksana PKH dalam hal ini pendamping PKH melalui berbagai media, diantaranya melalui pertemuan P2K2 yang dilakukan secara kelompok sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya, dianjurkan bertempat di rumah/tempat tinggal penerima manfaat PKH secara bergantian. Bagi pendamping PKH, pertemuan P2K2 di rumah atau tempat tinggal penerima manfaat PKH berfungsi sebagai pendekatan personal dan dapat

melihat secara langsung kondisi kehidupan (sosial dan ekonomi) senyatanya penerima manfaat PKH. Selanjutnya, juga dimaksudkan untuk terus membina, merawat dan menjaga hubungan baik dan kekeluargaan sesama penerima manfaat PKH.

Namun, sering kali rumah penerima manfaat PKH tidak memungkinkan sebagai tempat pertemuan P2K2, karena tidak cukup menampung sejumlah anggota kelompok, yang berkisar antara 25-30 orang. Hal itu terlihat dari penuturan salah satu pendamping PKH berikut:

Solo itu kota, meskipun tidak sebesar Semarang, Surabaya, atau bahkan Jakarta, Pak. Tetapi, seperti kota-kota lain di Indonesia umumnya, permukiman warga padat, jalan ke rumah penerima manfaat PKH sempit, dan juga seringkali kondisi tempat tinggal/rumah mereka serbaguna. Maksudnya, karena rumah penerima manfaat PKH yang tidak luas, sehingga banyak fungsi, ya sebagai ruang keluarga, sebagai tempat tidur, dan juga sebagai tempat makan (AW, 18 Juli 2024).

Untuk itu, pertemuan P2K2 sering dilaksanakan di tempat lain, seperti di tempat pertemuan RT/RW dan di balai kelurahan. Bagi pendamping PKH, tidak menjadi masalah dan tentu menyesuaikan, yang penting kegiatan pertemuan P2K2 tetap dapat terselenggara sebagai media pembelajaran bersama. Pendekatan personal lainnya yang dilakukan oleh pendamping PKH terhadap penerima manfaat PKH adalah

datang langsung ke rumah. Terkait hal ini diperoleh informasi menarik, seperti dikemukakan salah satu pendamping PKH:

“... ketika kami mendatangi rumah penerima manfaat PKH, sering mereka menyembunyikan atau menutupi barang-barang yang dinilai berharga miliknya, seperti: mesin cuci, kulkas, motor ‘barunya’, dan lainnya agar tidak diketahui oleh kami, karena mereka takut digraduasi. Ya, mereka was-was kalau kami didatangi” (DR, 18 Juli 2024).

Memperoleh informasi tersebut untuk memastikan kebenarannya, pendamping PKH mengatur cara dengan mendatangi ke rumah penerima manfaat PKH secara berulang, dengan berbagai alasan, dan tetap menjaga perasaan mereka, serta tetap menyemangati/memotivasi untuk kemandirian mereka.

2. Sinergi dan Kolaborasi

Melalui kegiatan pertemuan P2K2 dan mengunjungi penerima manfaat PKH secara langsung ke rumahnya sebagai pendekatan personal merupakan keharusan bagi pendamping PKH. Namun, sering kali cara tersebut tidak cukup. Seperti dikemukakan, penerima manfaat PKH seringkali menyembunyikan barang yang dinilai berharga miliknya untuk tidak diketahui atau terlihat oleh pendamping PKH. Untuk menyiasatinya, pendamping PKH membangun komunikasi dengan para pihak di ting-

kat lokal, antara lain perangkat kelurahan dan lainnya yang dinilai mengetahui secara baik kondisi penerima manfaat PKH yang dimaksud, bahkan dengan pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pihak-pihak tersebut antara lain petugas Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), yang di bangun dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial R.I. yaitu sistie layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.

Di samping itu, pendamping PKH juga memanfaatkan hubungan baik/jejaring dengan ketua RT/RW untuk memperoleh validitas data kondisi sosial ekonomi penerima manfaat PKH terkini yang dinilai sudah mampu. Hal itu terlihat dari penerutan Koordinator PKH Kota Surakarta berikut:

... seperti disampaikan oleh teman kami pendamping PKH, bahwa graduasi sudah sering didengar dan diketahui oleh penerima manfaat PKH. Oleh sebab itu, sewaktu pendamping PKH berkunjung ke rumah mereka, ada kekhawatiran mereka untuk digraduasi. Menyiasati hal itu, kami menjalin komunikasi dengan perangkat SLRT dan para ketua RT/RW setempat (PR, 18 Juli 2024).

Cara tersebut dilakukan oleh pendamping PKH setelah banyak memperoleh

informasi bahwa penerima manfaat PKH dinilai kurang jujur dalam memberikan informasi secara langsung yang diperlukan. Ketidakjujuran penerima manfaat PKH dapat dipahami karena graduasi menjadi sesuatu yang dihindari, karena mereka selama ini nyaman menerima bantuan sosial secara rutin melalui PKH. Kemudian, juga menurut penerima manfaat PKH, mereka memperhatikan bahwa ada penerima manfaat yang secara ekonomi lebih baik dari dirinya tetapi masih menerima bantuan PKH.

3. Memanfaatkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpendek, dan/atau korban bencana. Program PENA dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantuan Sosial melalui usaha yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk: (a) meningkatkan pendapatan penerima manfaat untuk kesejahteraan keluarga; dan (b) meningkatkan kemampuan sosial ekonomi penerima manfaat secara berdiskusi. Bentuk bantuan Program PENA berupa: bantuan usaha, pelatihan, dan pendampingan (Permensos. No. 7/2023).

Sesungguhnya PENA merupakan pengganti Program Pengentasan Fakir Miskin (PPFM) Kementerian Sosial sebelum-

nya yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin (fakir miskin) melalui pendekatan kelompok dan yang dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE). PENA dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaksana PKH Kota Surakarta untuk memotivasi penerima manfaat PKH agar bersedia graduasi dari kepesertaan sebagai anggota PKH.

Terkait program PENA sebagai strategi untuk menstimuli penerima manfaat PKH agar bersedia graduasi, diperoleh informasi dari pendamping PKH: “Melalui pertemuan P2K2 dan kunjungan ke rumah penerima manfaat PKH dan khususnya yang sudah memulai usaha atau merintis usaha, kami selalu sampaikan tentang program PENA (AW, 18 Juli 2024). Informasi tersebut sejalan dengan penjelasan salah satu penerima manfaat PKH melalui penuturannya: “Kami sebenarnya tidak keberatan berhenti dari PKH. Kami sudah ada usaha kecil-kecilan. Naaa, bagaimana agar usaha kami tetap berjalan dan dapat berkembang, bantuan modal atau uang dan pelatihan melalui program PENA, cocok buat kami” (LC, 18 Juli 2024).

4. Wisuda Graduasi Dilakukan Wali Kota/Wakil Wali Kota

Strategi yang juga dilakukan oleh pendamping PKH dalam upaya graduasi penerima manfaat PKH adalah selalu memberikan informasi kepada mereka dalam setiap kesempatan baik melalui P2K2 mau-

pun kunjungan ke rumah mereka bahwa wisuda graduasi dilakukan oleh Walikota /Wakil Walikota Surakarta.

Terkait itu, diperoleh informasi dari Korkot Surakarta melalui penuturannya sebagai berikut:

Di antara upaya untuk menstimuli penerima manfaat PKH agar bersedia graduasi dan agar kesediaan tersebut muncul dari mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun adalah bahwa wisuda graduasi dilakukan oleh mas wali/wakil wali kota. Hal tersebut penting agar mereka, secara psikologis, merasa dihargai dan diapresiasi oleh pejabat tertinggi Kota Surakarta (PR, 18 Juli 2024).

Strategi pelaksana PKH Kota Surakarta dalam upaya graduasi penerima manfaat PKH tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial, seperti terlihat dari penjelasan berikut:

Dukungan dinas sosial berupa tempat /ruangan dan perlengkapan sekretariat Koordinator Kota (Korkot) PKH, peralatan pelaksanaan P2K2 berupa *projector* meskipun baru satu buah untuk 57 pendamping PKH di lima wilayah kecamatan. Kemudian, bantuan printer untuk lima wilayah kecamatan di Kota Surakarta, tiga buah di sekretariat Koorkot. Juga bantuan HP dan Laptop untuk semua SDM PKH, bantuan alat tulis kantor (ATK) secara reguler, serta fasilitasi akomodasi pertemuan bulanan SDM PKH. Di Dinas Sosial Kota Surakarta (LS, 17 Juli 2024).

Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Koordinator Kota PKH Surakarta berikut:

Sejak tidak ada biaya operasional untuk PKH, bantuan Dinas Sosial Kota Surakarta berupa ruang sekretariat atau *base-camp* kami dan teman-teman pendamping, kemudian peralatan pelaksanaan P2K2, bantuan HP dan Laptop untuk semua SDM PKH, bantuan alat tulis kantor (ATK) secara reguler, serta fasilitasi akomodasi pertemuan bulanan SDM PKH di dinas sosial membuat kami cukup terbantu dan nyaman bekerja (PR, 19 Juli 2024).

Dukungan Dinas Sosial Kota Surakarta juga dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Di bidang ekonomi antara lain dilakukan dengan Gojek Tokopedia (GOTO) untuk mengembangkan usaha penerima manfaat PKH dalam bentuk pelatihan, dan pemberian nomer induk berusaha dan sertifikasi halal, dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

Terkait penerima manfaat PKH yang telah mengikuti pelatihan dengan GOTO, diperoleh informasi berikut:

Sebanyak 80 penerima manfaat PKH telah mengikutinya, di mana 50 KPM pada bulan Februari dan 30 KPM di bulan Agustus tahun 2023. Di bidang non ekonomi (pendidikan), Dinas Sosial Surakarta menjalin kerjasama dengan Universitas ABA PIGNTELLI, berupa beasiswa (gratis kuliah) bagi putra/i penerima manfaat PKH. Terdapat 23 anak KPM PKH Kota

muan kelompok, sebulan sekali. Saya senang mengikutinya karena dapat rutin bertemu tetangga, dan mendapat pengetahuan yang bermanfaat yang sebelumnya saya tidak tahu yang diberikan oleh mbak pendamping. Pengetahuan yang bermanfaat tersebut, seperti pentingnya pendidikan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak, pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan, juga



Gambar 1. Dokumentasi 2024

Surakarta yang sudah terdaftar sebagai Mahasiswa ABA PIGNTELLI tahun 2023 ini” (PR, 18 Juli 2024).

Gambaran graduasi penerima manfaat PKH Kota Surakarta di bidang ekonomi terlihat dari penuturan berikut:

Saya menerima bantuan PKH tahun 2018. Sebagai penerima bantuan PKH ada kewajiban mengikuti perte-

gizi. Kemudian, merawat, menghar-gai, dan melindungi orang tua dan kelompok disabilitas, serta tidak kalah penting mengatur keuangan keluarga, dengan membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Di pertemuan kelompok tersebut juga disampaikan adanya bantuan lain namanya program pahlawan ekonomi nusantara, yang diutamakan untuk yang sudah ada atau merintis usaha. Kebetulan saya sudah lama merintis usaha

jualan makan dan minum meskipun kecil, karena saya dulu pernah bekerja di rumah makan. Saya tertarik mendapat bantuan yang disampaikan mbak pendamping, katanya jumlah bantuan tersebut Rp. 2.400.000,- meskipun bantuan PKH akan dihentikan nantinya. Bantuan tersebut bisa buat nambah beli peralatan seperti: piring, mangkok, sendok dan lainnya. Disampaikan juga oleh mbak pendamping, wisuda graduasi akan dilakukan mas wali/wakil wali kota (ES, 18 Juli 2024).

Informasi lain menarik yang disampaikan oleh Ibu ES melalui penuturannya sebagai berikut:

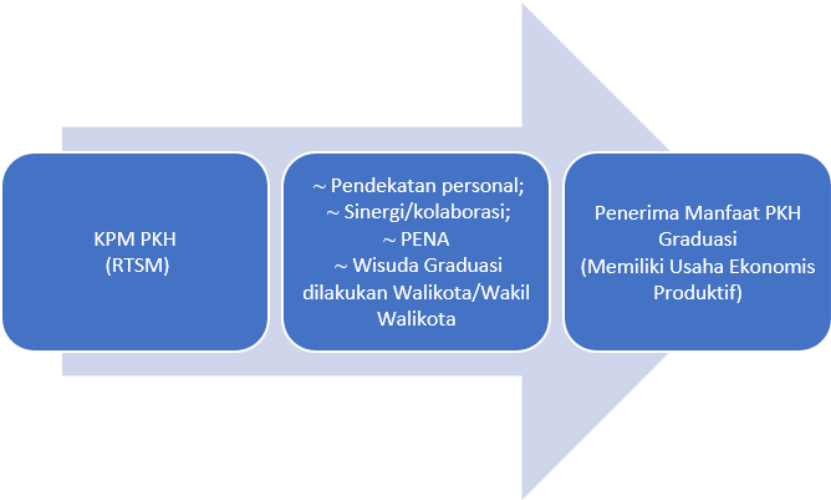
... sekarang, saya tidak mau lagi ditawari pinjaman harian pak, sebelum menjadi anggota PKH saya lakukan, karena tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Di pertemuan kelompok

PKH, saya dapat ilmu itu pak, dan itu penting sekali. Harapan punya penghasilan dan usaha sendiri, yang tidak bergantung dari orang lain, membuat saya senang, meskipun pendapatan saya belum seberapa, ya kurang lebih antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,-/hari.

Strategi graduasi penerima manfaat PKH bidang ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

E. PENUTUP

Bertolak dari diskusi temuan lapangan seperti dikemukakan dapat disimpulkan, bahwa strategi graduasi penerima manfaat PKH bidang ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pelaksana PKH Kota Surakarta adalah:



Gambar 2. Strategi graduasi KPM PKH

Pertama, pendekatan personal yang dilakukan secara berulang, dan dengan cara humanis terhadap penerima manfaat; *Kedua*, bekerja sama dengan pihak lain, yaitu dengan petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di kelurahan serta dengan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) setempat; *Ketiga*, memanfaatkan PENA untuk menstimuli penerima manfaat agar fokus pada usaha yang dilakukan dan bersedia graduasi dari PKH; *Keempat*, menginformasikan kepada penerima manfaat pada berbagai kesempatan bahwa wisuda graduasi dilakukan oleh walikota/wakil walikota Surakarta.

Di samping itu, juga dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat, yaitu dengan Gojek Tokopedia (GOTO) untuk bidang pengembangan usaha berupa pelatihan usaha, dan pemberian nomor induk berusaha dan sertifikasi halal dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut menjadi poin penting untuk terus dikembangkan dan disempurnakan, dan dapat dikembangkan di daerah lain.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: BPS.
- Bernards., N. (2023). *From Multiple Deprivations to Exploitation: Politicizing the Multidimensional Poverty Index*. Journal Development and Change.
- BPS. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. Diakses 8 Agustus 2024.
- BPS Kota Surakarta. (2024). *Kemiskinan Kota Surakarta 2024*. <https://surakartakota.bps.go.id/pressrelease/2024/07/29/284/kemiskinan-kota-surakarta-2024>. Diakses 8 Agustus 2024.
- Case dan Fair. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Chamber, R. (2010). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Semarang: Undip.
- Julfani, L., Mirzaya, I. (2023). *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun*. Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. Vol. 5, Iss: 6, pp 42-58.
- Kemensos R.I. Ditjen. Linjamsos. (2024). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKH*. ----- Ditjen. Pemberdayaan Sosial. (2017). *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu*.
- Krisye Heidi Elias, K.H., Tuharea, J., Soumokil, A. (2023). *The Government's Role in the Family Hope Program (PKH) as an Effort*

- for Poverty Alleviation in Kamarian Village, Kairatu District, West Seram Regency.* Jurnal Pendidikan Amarta. Vol. 2 No. 1 May 2023.
- Marrus. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta: PT. Bumi Aksa.
- Muluk, F.A., Rahmawati, I.D. (2024). *Efektivitas PKH Dalam Mengurangi Garis Kemiskinan di Sidoarjo.* Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2, No.7 Juli 2024. PT. Media Akademik Publisher.
- Nova, H.N., Budi Puspo Priyadi, B.P., Hartuti Purnaweni, H. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kel. Rejosari Kota Semarang.* Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.*
- Poverty.*<https://www.worldbank.org/en/topic/poverty>. Diakses 3 Agustus 2024.
- Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.*
- Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.*
- Quinn. (1999). *Strategi Pemasaran.* Jakarta: UI.
- Sihotang, D., and Sihotang, M.M. (2022). <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/index> Article Investigating the Transformative Impact of the Family Hope Program (PKH) on Basic Needs and Community Development in Pardomuan I Village, Pangururan District, Samosir Regency. Institute for Law and Economics Studies Law and Economics. Law and Economics ISSN 3026-1929 (Online). Vol. 16, No. 1, 2022, pp. 51-68. Diakses 2 September 2024.

Implikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow terhadap Budaya Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pegawai

Sri Tjahjorini Sugiharto

Widyaiswara Ahli Utama, Pusdiklatbangprof Kementerian Sosial E-mail:
tjahyorini@yahoo.com

Abstrak

Dalam manajemen organisasi, teori motivasi Maslow memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan budaya, teknologi, dan informasi. Sumber daya manusia merupakan kunci yang dapat menggerakkan roda organisasi sehingga bisa berjalan secara dinamis dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori motivasi Maslow dapat membantu seorang pimpinan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memotivasi bawahan. Sebab perbedaan motivasi akan berdampak pada perbedaan tujuan individual, yang pada akhirnya akan mengganggu terwujudnya cita-cita kolektif organisasi. Budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia harus membantu memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri mereka. Ketika pegawai merasakan bahwa organisasi mereka sangat peduli terhadap status perkembangan mereka, maka pegawai akan meningkatkan kinerjanya secara maksimal serta memberikan yang terbaik untuk melayani organisasi. Kehadiran teori Maslow dapat menjadi satu rujukan ilmiah dalam membangun motivasi sumber daya manusia yang ada.

Kata Kunci: Teori Motivasi Maslow, Budaya Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, Kinerja pegawai.

Abstract

In organizational management, Maslow's theory of motivation pays considerable attention to the development of human resources in the face of cultural, technological and information developments. Human resources are the key that can move the wheels of the organization so that they can run dynamically and effectively in achieving the goals that have been set. Maslow's theory of motivation can help a leader to determine the right strategy in motivating subordinates. Because differences in motivation will have an impact on differences in individual goals, which will ultimately interfere with the realization of the collective goals of the organization. Organizational culture and human resource management must help motivate employees to improve their performance to achieve their self-actualization needs. When employees feel that their organization cares deeply about their development status, employees will maximize their performance and give their best to serve the organization. The presence of Maslow's theory can be a scientific reference in building the motivation of existing human resources.

Keywords: *Maslow's Motivation Theory, Organizational Culture, Human Resources, Maslow's Hierarchy of Needs Theory, employee performance.*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya sehari-hari, kebutuhan itu menjadi landasan yang akan memotivasi segala perilaku manusia. Kebutuhan manusia ini berlaku sama dalam semua kebudayaan serta bersifat fisiologis dan psikologis. Teori Motivasi Abraham Maslow menyatakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam menentukan kebutuhan manusia, Maslow sangat menekankan pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat internal yang muncul dalam diri manusia dengan menempatkan faktor fisiologis pada posisi yang sangat mendasar yang harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan yang bersifat eksternal yang berhubungan dengan dunia luar ditempatkan pada posisi yang terakhir. Maslow lebih menekankan kebutuhan yang membuat individu cenderung lebih statis. Pada kebutuhan akan rasa aman, pengakuan dari orang lain, dan kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menunggu umpan balik dari orang lain disekitarnya. Sedangkan kebutuhan akan aktualisasi diri dibiarkan bergerak secara dinamis untuk berhubungan dengan dunia luar.

Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan yang disebutnya sebagai *teori*

hierarki kebutuhan. Maslow menggambarkan kebutuhan ini sebagai bersifat hierarki atau berjenjang, dimana kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.

Manusia dikelilingi oleh rangkaian kebutuhan yang berulang dalam hidupnya, yang menjadikannya kebiasaan untuk terus menerus memenuhi setiap kebutuhan yang muncul. Namun, di balik setiap kebutuhan dalam siklus manusia, ada pengindekan yang menentukan kebutuhan mana yang mendapat prioritas untuk dipenuhi. Tingkah laku yang disertai dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diartikan sebagai motif, atau daya yang mendorong seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Konsep motivasi tertanam dalam serangkaian teori motivasi, yang mempengaruhi hierarki kebutuhan, menentukan kebutuhan mana yang memerlukan tingkat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dengan kata lain, teori motivasi secara signifikan akan mempengaruhi tingkat motivasi.

Motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut kehidupan, di mana variasi bentuk motivasi yang pernah ada dapat dievaluasi untuk membantu memahami dasar-dasar motivasi.

Teori Maslow sepenuhnya merupakan perwujudan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan bagi manusia. Dalam bidang apapun teori ini memiliki peran yang sentral. Ketika kebutuhan dalam satu tingkat sudah terpenuhi maka keinginan untuk memenuhi tingkat lain akan muncul. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan dapat membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan segala macam aktivitasnya dalam suatu lingkungan kerja organisasi. Motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu pada umumnya dilandasi adanya kebutuhan serta keinginan orang itu sendiri.

Dalam manajemen organisasi, teori Maslow memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai jembatan untuk menghadapi perkembangan budaya, teknologi dan informasi.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan, teori Maslow ini tidak memiliki standar capaian yang paten. Dalam artian bahwa standar keberhasilan dalam melewati satu tingkatan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Misalnya kepuasan pegawai A dalam pencapaian tingkat kebutuhan akan berbeda dari pegawai B. Pegawai A merasa telah mencapai kebutuhan aktualisasi dirinya (kebutuhan tingkat ke-5)

ketika telah menjadi bagian dari sebuah tim kerjadan menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang baik (kebutuhan tingkat ke-4). Sedangkan untuk pegawai B baru akan merasa mencapai kebutuhan ke-5 setelah ia berhasil memenuhi kebutuhan ke-4 dengan menjadi ketua tim dan menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi di dalam organisasi, seorang pimpinan harus memahami konsep motivasi secara menyeluruh. Teori motivasi Maslow dapat membantu seorang pimpinan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memotivasi bawahan. Sebab perbedaan motivasi akan berdampak pada berbedanya tujuan individual, yang pada akhirnya akan mengganggu terwujudnya cita-cita kolektif organisasi itu sendiri.

Kehadiran teori Maslow tentang motivasi dapat menjadi satu rujukan ilmiah dalam membangun motivasi sumber daya manusia yang ada. Motivasi akan mendorong sumber daya manusia yang ada untuk bekerja secara maksimal. Sehingga untuk membangun motivasi dalam konteks ini membutuhkan kerangka teori yang membahas kebutuhan manusia secara menyeluruh.

B. TEORI HIERARKI KEBUTUHAN

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya

untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara Robbins (2003) mendefinisikan bahwa motivasi sebagai satu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Dari definisi tersebut terdapat tiga kunci utama, yakni: intensitas, arah dan ketekunan. *Intensitas*, menyangkut seberapa kerasnya seseorang berusaha. Ini adalah unsur yang paling difokuskan oleh kebanyakan orang bila membicarakan tentang motivasi. Intensitas yang tinggi tidak akan memberikan hasil yang diinginkan kecuali jika upaya itu *diarahkan* ke suatu tujuan yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan kualitas maupun intensitas dari upaya tersebut. Upaya yang terarah, dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi adalah upaya yang seharusnya dilakukan. Pada akhirnya, motivasi akan memiliki dimensi *ketekunan* yang merupakan ukuran kemampuan seseorang dalam mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi akan tetap bertahan pada pekerjaan dalam waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuannya, tetap tekun dengan pekerjaannya.

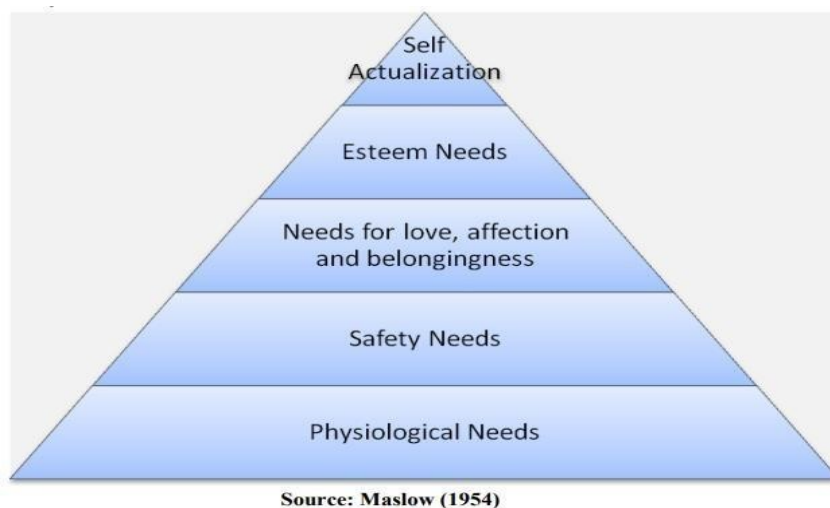
Menurut Maslow (1970) untuk memotivasi seseorang, organisasi harus mengetahui posisi orang tersebut sedang

berada pada tahap kebutuhan yang mana dan organisasi harus memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu atau kebutuhan di atas tingkat itu.

Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan keamanan digambarkan sebagai kebutuhan tingkat rendah dan kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri digambarkan sebagai kebutuhan tingkat tinggi.

Maslow mempresentasikan gagasan bahwa tindakan manusia diarahkan pada pencapaian tujuan (Maslow, 1970). Setiap perilaku tertentu dapat memenuhi beberapa fungsisekaligus; misalnya, pergi ke Kampus dapat memuaskan kebutuhan seseorang akan harga diri dan interaksi sosial.

Menurut teori Maslow, seseorang tidak akan merasakan kebutuhan kedua sampai tuntutan yang pertama terpenuhi atau yang ketiga sampai yang kedua terpenuhi dan seterusnya. Abraham Harold Maslow mengemukakan teori yang menguraikan lima kebutuhan hierarki yang juga dapat diterapkan pada organisasi dan kinerja pegawai.



Gambar 1. Hierarki kebutuhan Maslow.
Sumber: Maslow (1970)

Hierarki Kebutuhan Maslow direpresentasikan dalam piramida hierarki dengan lima tingkatan piramida dimana urutan terbawah menjadi urutan pertama yang harus terpenuhi seperti terlihat pada Gambar 1.

Maslow membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi dua kelompok utama yaitu kebutuhan defisiensi (*deficiency needs*) dan kebutuhan perkembangan (*growth needs*).

Empat tingkat pertama dianggap sebagai kebutuhan defisiensi (*deficiency needs*). Apabila kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan defisiensi tidak terpenuhi maka akan memberi energi pada manusia untuk memenuhinya. Dimulai dari kebutuhan paling dasar (kebutuhan fisik) hingga kebutuhan lain di tingkatan atasnya. Jika kebutuhan bawah belum terpenuhi maka

manusia tidak akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan di atasnya.

Perilaku manusia tidak dimotivasi oleh adanya kekurangan melainkan oleh keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan kebutuhan untuk menjadi seseorang yang mampu melakukan semua hal (Maslow, 1970).

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan perkembangan (*growth needs*). Kebutuhan untuk mengaktualisasi potensi diri secara utuh. Berbeda dengan kebutuhan defisiensi yang memilikibatas pemenuhan, kebutuhan perkembangan tidak memiliki batas, sepanjang hidup manusia. Begitupun kebutuhan pegawai untuk melakukan perkembangan dan untuk mengaktualisasi potensi dirinya secara utuh, tidak memiliki batas sepanjang yang bersangkutan menjadi pegawai, bahkan setelah tidak menjadi

pegawai atau pensiun. Kebutuhan untuk berkembang dan mengaktualisasi potensi diri secara utuh ini tetap ada, yang kemudian diwujudkan dalamkiprahnya di masyarakat.

Penjelasan mengenai konsep motivasi manusia menurut Abraham Maslow (1970) mengacu pada lima kebutuhan pokok, sebagai berikut:

1. *Physiological Needs*: Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar yang bersifat primer. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Manifestasi kebutuhan ini terlihat dalam tiga hal pokok yaitu: sandang, pangan dan papan. Orang yang kebutuhannya masih di level 1 tidak peduli dengan penghormatan, uang tabungan dan sebagainya, yang mereka butuhkan hanya makanan, tempat tinggal agar kebutuhan utama mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhanselanjutnya.

Dalam lingkungan kerja modern, kebutuhan ini berupa keinginan pegawai untuk menda-

patkan pembayaran upah/gaji, libur, uang lembur, perangsang, rencana pensiun, periode-periode istirahat, lingkungan kerja yang menyenangkan, penerangan yang baik, hadiah-hadiah dan fasilitas lainnya seperti rumah, kendaraan, dan lain lain. Hal ini akan menjadi motif dasar bagi pegawai untuk bekerja, menjadi efektif dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi bagi organisasi/organisasi. Peningkatan kesejahteraan harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan. Kesejahteraan dapat menjadi penentu motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Cascio (1995) pemberian kompensasi adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisiologis. Pemberian kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, terutama kaitannya dengan peningkatan motivasikerja dari para pegawai. Kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, uang transport, tunjangan hari raya, uang lembur, dan tunjangan langsung lainnya. Sedangkan kompensasi tidak langsung terdiri daripromosi

jabatan, asuransi, tunjangan jabatan, dan mutasi. Perhatian terhadap kesejahteraan pegawai melalui pemberian kompensasi akan berdampak pada kinerja serta kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugasnya.

2. *Safety Needs*: Kebutuhan akan keamanan merefleksikan keinginan untuk melindungi diri sendiri terhadap bahaya, cedera, ancaman, kecelakaan, kerugian atau kehilangan. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk rentang usia anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga sangat diperlukan pendampingan orang yang lebih tua. Sementara orang dewasa memiliki sedikit kesadaran akan kebutuhan keamanan kecuali pada saat darurat atau periode disorganisasi dalam struktur sosial (seperti kerusakan yang meluas).

Di dunia kerja, kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, kepastian pekerjaan, serikatpekerja, kondisi kerja yang aman, imbalan tambahan, asuransi,

kemungkinan pensiun, tabungan, dan uang tunggu apabila terjadi hal-hal tertentu, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatannya, wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai pegawai. Seorang pegawai dapat bekerja secara maksimal dengan antusias dan penuh dedikasi bila dirasakan adanya jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya. Pegawai harus mendapatkan kepastian dalam proses kenaikan pangkat, pengumpulan angka kredit, serta perlindungan keamanan dalam bekerja.

Robbins (2003) berpendapat bahwa pegawai biasanya sangat memperhatikan lingkungan tempat kerja mereka demi kenyamanan pribadi dan untuk mendukung pekerjaan mereka. Mereka cenderung lebih menyukai fisik yang aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman juga akan berdampak pada pola hubungan antara pegawai yang satu dengan lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Menurut Robbins (2003), bagi kebanyakan pegawai, tempat kerja juga merupakan tempat untuk melakukan sosialisasi, sehingga sangat penting bagi mereka untuk memiliki rekan kerja yang mendu-

kung dan dapat bekerjasama dengan baik.

3. *Social Needs* : Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, ia membutuhkan kasih sayang dari kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Menurut Abraham Maslow seorang individu mencari cinta dilatar belakangi oleh adanya rasa kesepian, kesendirian, depresi, stress, serta kecemasan berlebihan. Ditahapan ini manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Meliputi cinta, persahabatan, keintiman, keluarga dan lain lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senang apabila mereka disenangi dan berusaha memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja dengan jalan membantu kelompok-kelompok formal maupun informal, melakukan kerja sama dengan rekan-rekan sekerja mereka, dan mereka turut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi dimana mereka bekerja.

4. *Esteem Needs* : Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidak selalu berupa piala atau hadiah. Kebutuhan individu disini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan mendapatkan perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dari hal itu, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan ini berkaitan dengan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki, pangkat, gelar serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stress, tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna dan lain sebagainya.

Mendapatkan penghargaan bagi setiap manusia adalah capaian yang membanggakan. Banyak orang yang bekerja bertahun-tahun hanya untuk meraih satu penghargaan untuk membuktikan kepada khalayak bahwa dia bisa. Tidak sedikit juga orang yang mundur

dari pekerjaan atau bekerja tanpa motivasi, hanya karena tidak mendapatkan perhatian dari atasan atau *reward* selama dia menjadi pegawai.

Faktor penghargaan harus menjadi pilar untuk membangun motivasi kerja sehingga tujuan organisasi bisa dilaksanakan secara kolektif dari atasan hingga kepada struktur yang paling bawah.

Penghargaan dari organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pegawai. Semakin banyak pegawai yang memiliki prestasi kerja akan membuat perkembangan organisasi menjadi semakin pesat dan tujuan organisasi dapat dicapai.

5. *Self Actualization*: Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri dan menjadi orang yang lebih baik. Tingkat aktualisasi diri ini merupakan tingkat dimana seseorang harus menjadi individu yang bisa diandalkan. Pada tingkatan ini manusia cenderung ingin menjadi pemimpin suatu golongan agar mempunyai *power* atau kekuatan melakukan perubahan dengan segala yang dimilikinya. Termasuk moralitas,

kreativitas, pemecahan masalah dan lain lain. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginannya

Kebutuhan aktualisasi diri dalam dunia pekerjaan dapat dipenuhi dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk tumbuh, mengembangkan kreativitas serta memberikan pelatihan untuk mendapatkan tugas yang menantang. Motivasi kerja pada tingkat ini memerlukan kemampuan manajemen untuk dapat mensinkronisasikan antara kebutuhan pegawai dan kebutuhan organisasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Memberi ruang kebebasan kepada pegawai untuk mengekspresikan potensi yang dimiliki bisa menjadi salah satu langkah untuk memotivasi dalam bekerja dan dapat mengurangi tekanan psikologis. Dalam konteks

ini pegawai akan berpikir lebih luas dan tidak ingin ditekan dengan aturan-aturan yang mengikat.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Robbins (1996) yang menyatakan bahwa pegawai cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk membuktikan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya, serta menyediakan tugas-tugas yang bervariasi, kebebasan dan umpan balik terhadap hasil kerja yang dilakukannya.

Pekerjaan yang memiliki sedikit tantangan akan cepat membosankan mereka, sebaliknya, yang terlalu banyak tantangan akan menimbulkan frustrasi dan kegagalan. Kondisi pekerjaan yang memiliki tantangan yang moderat akan menumbuhkan kepuasan dalam diri pegawai.

Kebutuhan akan kekuasaan adalah bagian dari usaha pegawai untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mewujudkan tujuan pribadi yang masih sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu harus mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang

terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder dan lain sebagainya.

Ada berbagai karakteristik yang cenderung dikaitkan dengan aktualisasi diri. Berikut penggambaran Abraham Maslow (1970) terhadap orang-orang yang mencapai tingkat aktualisasi diri, yaitu:

1. *Acceptance and realism*, orang yang berhasil memahami diri sendiri serta menerima semua kenyataan, mengenai diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.
2. *Problem centering*, mempunyai pribadi yang suka menolong terhadap sesama, dapat mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang tengah dihadapi. Meskipun masalah tersebut di luar kendali dan lingkungan pribadinya.
3. *Spontaneity*, mampu bertindak spontan dan dapat beradaptasi dalam berbagai kondisi.
4. *Autonomy and Solitude*, memiliki tingkat kebebasan serta privasi yang lebih tinggi.
5. *Continued freshness of appreciation*, memandang dunia dengan pandangan penuh rasa syukur serta kekaguman yang tidak pernah terhentikan. Mereka akan mudah untuk bersyukur sekalipun hanya menerima atau mengalami hal yang kecil, mereka juga dengan sangat mudah menjadikan setiap kejadian di kehidupannya sebagai

- inspirasi dan sumber kesenangannya.
6. *Peak experiences*, memiliki puncak kesenangan yang oleh Abraham Maslow disebut sebagai suka cita. Mereka akan memandang semua hal yang telah terjadi padanya dengan pandangan yang positif. Setiap kejadian yang baik maupun buruk digunakan dengan bijak sebagai pembelajaran, inspirasi, pengalaman serta kekuatan untuk menjadi lebih baik dan semakin baik.
 7. *Live independently*, tidak tergantung pada orang lain dan mereka tidak selalu membutuhkan teman.
 8. *Have a good-natured sense of humor*, memiliki selera humor yang baik. Mereka dapat menertawakan diri sendiri ketika melakukan kesalahan dan membantu orang lain untuk humor dalam situasi yang menantang.
 9. *Have a sense for reality and truth*, memiliki kepekaan terhadap realitas dan kebenaran.
 10. *Are comfortable with the unknown*, merasa nyaman untuk tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan.
 11. *Have compassion, kindness and acceptance*, memiliki rasa kasih sayang, kebaikan dan penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain yang ditemui.
 12. *Enjoy meaningful friendships*, cenderung membangun hubungan jangka panjang dengan beberapa orang daripada persahabatan biasa dengan banyak orang.

13. *Are creative*, memiliki bakat untuk melihat masalah dengan cara baru atau berpikir dengan cara yang berbeda dari orang lain.
14. *Focus on things bigger than themselves*, cenderung melihat gambaran secara luas daripada hanya mementingkan hidupnya sendiri dan mendedikasikan hidupnya untuk misi atau tujuan yang lebih luas.
15. *Have a sense of justice*, memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap semua orang, serta berusaha untuk mencegah tindakan ketidakadilan atau perilaku tidak etis.

C. IMPLIKASI TEORI HIERARKI KEBUTUHAN TERHADAP BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi adalah jaringan nilai dan norma yang kompleks yang memandu perilaku individu dalam organisasi. Hal ini melibatkan seperangkat keyakinan, nilai, asumsi, dan pengalaman yang diperoleh melalui pembelajaran, sosialisasi dan saling berbagi antara anggota unit sosial seperti orang-orang dalam organisasi.

Budaya organisasi adalah proses yang dipelajari, disosialisasikan dan diadopsi oleh pendiri organisasi, manajemen puncak, dan pegawai dari waktu ke waktu. Budaya organisasi adalah perekat normatif yang dapat menyatukan organisasi (Robbins & Judge, 2013).

Menurut Alvesson & Berg (1992), sebuah konsep baru diperlukan untuk menggambarkan dan menjelaskan tindakan individu dalam suatu organisasi sehingga kapasitas pekerjaan mereka dapat ditingkatkan. Menurut Schein (2004), budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok saat memecahkan masalah, adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah berjalan cukup baik dan dianggap valid, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir dan merasakan masalah-masalah tersebut. Budaya organisasi adalah hasil belajar dari pengalaman kelompok dan sebagian besar tidak disadari.

Alvesson & Berg (1992) menyatakan bahwa, budaya adalah seperangkat karakteristik yang menggambarkan suatu organisasi dan membedakannya dari yang lain, budaya organisasi adalah alat manajemen yang membantu dalam rasionalisasi kerja dan pemikiran efisiensi upaya untuk mengembangkan mekanisme kontrol yang tidak didasarkan pada paksaan atau arahan.

Kerangka budaya organisasi harus mencerminkan fakta bahwa kebutuhan fisiologis dan keamanan pegawai adalah yang terpenting; oleh karena itu, ketika kebutuhan tersebut menjadi terfokus secara budaya, kinerja akan sangat meningkat dalam organisasi tersebut (Maslow, 1970).

Budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia harus membantu pegawai mencapai harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri mereka. Ketika pegawai menemukan bahwa organisasi sangat peduli terhadap status perkembangannya, maka pegawai akan memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi.

Implikasi teori hierarki kebutuhan terhadap budaya organisasi, di antaranya:

1. *Menciptakan budaya organisasi yang unik.* Setiap organisasi harus bekerja untuk menciptakan budaya uniknya sendiri melalui penerapan teori hierarki kebutuhan secara tepat, elemen budaya yang tepat harus dipilih, dikombinasikan dan disesuaikan dari waktu ke waktu agar memiliki keunikan.
2. *Menghubungkan budaya organisasi dengan manajemen sumber daya manusia* Beberapa pemimpin memuji budaya tertentu, namun ketika menyangkut insentif, pegawai yang mempraktekkan budaya tersebut tidak diakui usahanya. Organisasi harus memetakan elemen budaya kedalam fungsi sumber daya manusia untuk memotivasi pegawai agar mengambil bagian dalam budaya organisasi yang telah didukung manajemen.
3. *Memastikan bahwa budaya organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai.* Tidak ada gunanya mempraktikkan budaya tertentu demi tradisi usang yang tidak bermanfaat yang mungkin telah berkembang secara informal di antara pegawai dari waktu ke waktu. Manajemen harus

memberikan saran atau alternatif yang lebih baik sebagai penggantinya.

4. *Pimpinan harus membimbing pegawai tentang pentingnya budaya organisasi.* Organisasi memerlukan seorang pimpinan untuk membimbing bawahan, mereka juga harus memastikan bahwa manajer atau pimpinan berurusan secara khusus dengan budaya organisasi.

Salah satu faktor yang menentukan maju dan mundurnya suatu organisasi adalah keberadaan sumber daya manusia-nya. Sumber daya manusia merupakan kunci yang dapat menggerakkan roda organisasi sehingga bisa berjalan secara dinamis. Sumber daya manusia dapat menjadikan suatu organisasi efektif dalam merancang seluruh operasional organisasi, menghasilkan produk, jasa, mengendalikan mutu, memasarkan, mengalokasi sumber-sumber daya lain serta menetapkan strategi tujuan organisasi. Keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun sikap, akan membuat suatu organisasi mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Storey (1992) manajemen sumber daya manusia adalah fungsi organisasi multidisiplin yang mengambil teori dan ide dari berbagai bidang seperti manajemen, psikologi, sosiologi dan ekonomi. Manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perencanaan, rekrutmen,

seleksi, orientasi, pelatihan, motivasi, penilaian dan remunerasi (Storey, 1992).

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan orang melalui pekerjaan (Bratton & Gold, 1999).

Robbins dan Judge (2013) meringkas manajemen sumber daya manusia dalam lima konsep utama, yaitu: memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, penempatan staf dan pelatihan. Sedangkan Storey (1992) menjelaskan lima bidang fungsional manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari kepegawaian, penghargaan, pengembangan pegawai, pemeliharaan pegawai, dan hubungan pegawai. Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat sebagai pendekatan khusus untuk manajemen ketenagakerjaan yang berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui strategi penempatan tenaga kerja yang berkomitmentinggi dan memiliki kemampuan (Storey, 1992).

Demikian pula, Armstrong (2006) mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan strategis dan rasional untuk mengelola aset organisasi yang paling berharga, yaitu pegawai yang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran mereka.

D. IMPLIKASI TEORI HIERARKI KEBUTUHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI

Kinerja pegawai merupakan isu yang mendapat perhatian luas dalam literatur dan

penelitian karena setiap organisasi bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi (Ojo, 2009). Untuk lebih jelasnya, kedua konsep tersebut, pegawai dan kinerja, didefinisikan secara terpisah sebagai berikut:

1. Pegawai adalah orang-orang yang dipekerjakan, bekerja atas dasar paruh waktu atau penuh waktu di bawah pengaturan kerja, baik secara tertulis maupun lisan. Ini juga mencakup kesepakatan tentang remunerasi dan jenis tugas yang diharapkan dari pegawai dalam jangka waktu tertentu (Shumen dalam Jerome, 2013)
2. Kinerja adalah pencapaian serangkaian tugas yang diberikan yang terikat waktu, dengan indikator hasil yang akan mengukur tingkat pencapaian tugas yang diberikan, yang hanya dapat diukur ketika standar kinerja telah ditetapkan (Shumen dalam Jerome, 2013).

Manfaat organisasi dapat memainkan peran penting dalam hal kepuasan dan kinerja pegawai. Beberapa organisasi menawarkan bonus atau tunjangan tambahan kepada pegawai tertentu yang berupaya meningkatkan kinerja mereka. Ini dapat mencakup kinerja biaya kuliah atau alokasi untuk menghadiri konferensi khusus. Manfaat tambahan semacam ini dapat merangsang pegawai untuk mengambil peluang baru untuk meningkatkan diri

mereka sendiri dan sebagai hasilnya, meningkatkan kinerjanya di posisinya.

Metode yang digunakan oleh organisasi untuk tinjauan dan evaluasi kinerja dapat memiliki pengaruh besar pada kinerja pegawai. Organisasi yang gagal meninjau kinerja atau mengenali pekerjaan pegawai yang dilakukan dengan baik akan segera menemukan pegawai yang tidak puas. Selain itu, organisasi yang secara ketat memantau pekerjaan pegawai tanpa memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan umpan balik juga dapat mengakibatkan pegawai tidak termotivasi. Tinjauan kinerja berfungsi untuk menjaga agar pegawai tetap termotivasi dan berkinerja baik mencakup umpan balik berkala, teratur, jujur, dan objektif kepada pegawai (Collins, 1998). Hal ini dilakukan dengan cara absensi kehadiran dan pembuatan SKP bulanan maupun tahunan, yang merupakan laporan terkait kegiatan yang dilakukan beserta bukti dukungnya.

E. IMPLIKASI TEORI HIERARKI KEBUTUHAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Implikasi teori terhadap sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDMPenyelenggara Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
3. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
4. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial

di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh organisasi tempat mereka bekerja, dalam hal ini Kementerian Sosial, baik kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam kaitannya dengan kebutuhan tersebut, dapat dipenuhi dalam bentuk:

1. Kebutuhan fisiologis

Menawarkan bonus atau tunjangan tambahan kepada pegawai yang berupaya meningkatkan kinerja, dapat merangsang pegawai untuk mengambil peluang baru untuk meningkatkan diri sendiri dan sebagai hasilnya, akan meningkatkan kinerjanya di posisinya dan di lingkungan

Kementerian Sosial. Pemberian kompensasi adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisiologis. Pemberian kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam memotivasi pegawai. Kompensasi dapat berupa promosi jabatan, tunjangan jabatan, dan mutasi. Pemberian kompensasi akan berdampak pada kinerja serta kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan menjadi motif dasar bagi pegawai untuk bekerja, menjadi efektif dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi bagi organisasi.

2. Kebutuhan rasa aman

Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, kepastian pekerjaan, kondisi kerja yang aman, jaminan asuransi, tunjangan pensiun, tabungan pensiun, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatannya, wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai pegawai PNS/ASN maupun non ASN/PNS di lingkungan Kementerian Sosial. Seorang pegawai dapat bekerja dengan antusias dan penuh dedikasi bila dirasakan adanya jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya. Pegawai harus mendapatkan kepastian terhadap proses kenaikan

pangkat, pengumpulan angka kredit, serta perlindungan keamanan dalam bekerja.

3. Kebutuhan sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia merasa senang apabila mereka disenangi dan mereka berusaha memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja dengan jalan membantu kelompok-kelompok formal maupun informal/non formal. Termasuk membantu sesama rekan kerja secara vertikal maupun horizontal yang merupakan kelompok formal. Disamping membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial yang merupakan kelompok informal/non formal.

Juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Menciptakan kondisi dan semangat kerja sama tim, membangkitkan rasa diterima serta memiliki dengan menyelenggarakan kegiatan dan program Kementerian Sosial atau menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan pelatihan/*workshop*, webinar, seminar, lokakarya dan lain-lain.

Upaya pemenuhan kebutuhan sosial ini juga dipenuhi dengan adanya tugas kedinasan bagi pegawai yang bertugas ke tempat lain, baik dalam batas negara maupun luar negeri.

4. Kebutuhan penghargaan

Organisasi dalam hal ini Kementerian Sosial harus menetapkan dan memberikan penghargaan khusus dalam pencapaian tujuan dan tugas dari pegawainya. Penghargaan tidak hanya menjadi motivasi finansial tetapi juga motivasi mental seperti pemberian Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai yang sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Bisa juga berupa pujian atau penugasan di dalam dan ke luar negeri. Organisasi juga harus melakukan promosi berdasarkan prestasi bukan senioritas dan memberikan status agar pegawai merasa dihargai.

Mendapatkan penghargaan bagi setiap manusia adalah capaian yang membanggakan. Banyak orang yang bekerja bertahun-tahun hanya untuk meraih satu penghargaan untuk membuktikan kepada khalayak bahwa dia bisa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mikander (2010) yang mengatakan bahwa penghargaan

dari organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang meningkat kinerjanya akan berdampak pada prestasi kerja. Semakin banyak pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi maka perkembangan organisasi akan semakin pesat dan tujuan organisasi dapat dicapai sehingga menjadi *High Performance Organization*. Pemimpin harus mengakui pencapaian pegawai, baik secara finansial maupun mental.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Memberikan kesempatan kepada pegawai Kementerian Sosial untuk tumbuh, mengembangkan kreativitas dan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan tugas yang menantang. Memberi ruang kebebasan kepada pegawai untuk mengekspresikan potensi yang dimiliki, hal ini bisa menjadi salah satu langkah untuk memotivasi pegawai dalam bekerja dan mengurangi tekanan psikologis.

Dalam konteks ini pegawai akan berpikir lebih luas dan tidak ingin ditekan oleh aturan-aturan yang mengikat. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu harus

mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder dan lain sebagainya.

Pemimpin yang dapat memuaskan kebutuhan aktualisasi diri pegawai adalah pemimpin yang paling efektif. Hal ini memungkinkan organisasi Kementerian Sosial untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan dan potensi pegawainya, dengan meningkatkan produktivitas dan efektivitas secara keseluruhan. Kementerian Sosial dapat menawarkan tugas yang menantang dan bermakna untuk mendorong serta mengeksplorasi kemampuan kreativitas dan inovasi pegawai secara maksimal.

Implikasi teori terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang selanjutnya disingkat PPKS sebagai pengganti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 2, ayat 2 yang berbunyi “Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi: 1) Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial; 2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Pada dasarnya definisi PPKS ini sama dengan definisi PMKS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012.

Adapun PPKS seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, untuk penjelasan dan kriterianya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam), meliputi: 1) Anak Balita Telantar; 2) Anak Terlantar; 3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum; 4) Anak Jalanan; 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK); 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah; 7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; 8) Lanjut Usia Telantar; 9) Penyandang Disabilitas; 10) Tuna Susila; 11)

Gelandangan; 12) Pengemis; 13) Pemulung; 14) Kelompok Minoritas; 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP); 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA; 18) Korban Trafficking; 19) Korban Tindak Kekerasan; 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); 21) Korban Bencana Alam; 22) Korban Bencana Sosial; 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; 24) Fakir Miskin; 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis; dan 26) Komunitas Adat Terpencil.

Core bisnis Kementerian Sosial yaitu kesejahteraan sosial yang direalisasikan ke dalam berbagai bentuk program kegiatan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RTS), program permakanan bagi lansia, program permakanan bagi disabilitas dan lain-lain, sedianya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan PMKS/PPKS. Terutama kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan fisiologis terkait dengan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan tingkat rendah. Hal ini disebabkan untuk dapat masuk ke dalam kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi, terlebih dahulu kebutuhan dasar kebutuhan fisiologis ini harus terpenuhi. Hal ini sesuai dengan teori Maslow (1970), seseorang tidak akan merasakan kebutuhan kedua sampai tuntutan yang pertama terpuaskan

atau yang ketiga sampai yang kedua terpuaskan dan seterusnya.

Dalam menganalisa permasalahan sosial yang terjadi dan dialami oleh PMKS/PPKS pada saat SDM Penyelenggara Kesejahteraan mengikuti sertifikasi terkait dengan posisi dan jabatannya, teori inipun dapat digunakan sebagai dasar teori dalam membuat dan menyusun Deskripsi Diri sehingga penanganan dan solusi dari permasalahan PMKS/PPKS dapat dilakukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan.

F. PENUTUP

Pemikiran Abraham Maslow memberi satu petunjuk yang komprehensif dalam mengkaji kebutuhan yang bisa memotivasi manusia dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam organisasi Kementerian Sosial. Teori hierarki kebutuhan menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara fisik berupa gaji, honor dan tunjangan-tunjangan. Berlanjut pada kebutuhan yang bersifat eksternal yang berhubungan dengan dunia luar secara vertikal maupun horizontal dalam bingkai hierarki organisasi berupa penghargaan dan pengakuan. Pada prinsipnya pemikiran Maslow sangat terstruktur dalam mengurai kebutuhan manusia. Teori ini sesungguhnya

menyentuh pada kerangka pengembangan organisasi dengan penekanan pada pemberian kepercayaan yang lebih kepada sumber daya manusia yang dimiliki, yang akhirnya organisasi akan berkembang dan berinovasi secara dinamis karena organisasi akan terus diwarnai oleh dinamika yang menjadi ciri organisasi modern. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow masih dianggap penting dan relevan dalam organisasi pemerintah maupun swasta hingga saat ini, karena setiap organisasi berusaha memperoleh kesuksesan dan keunggulan.

Referensi

- Alvesson, M. & Berg, P.O. (1992). *Corporate Culture and Organizational Symbolism*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Armstrong, M. (2006), *A handbook of Human Resource Management Practice*, 10th ed. London, Kogan Page Limited.
- Bratton, J. & Gold, J. (1999). *Human Resource Management Theory and Practice*. 2nd ed. London, Basingstoke, Hampshire, Hound Mills, Palgrave MacMillan Press Ltd.
- Cascio, F.W. (1995) *Managing Human Resources, Productivity, Quality of Work Life, Profits*. New York: McGraw Hills.
- Collins, D. (1998). *Organizational Change: Sociological Perspectives*, London: Routledge.
- Jerome, N. (2013), Application of the Maslow's Hierarchy of Need Theory, *International Journal of Business and Management Invention*, www.ijbmi.org Volume 2 Issue 3 | March. 2013.
- Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Originally Published in *Psychological Review*, 50.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and Personality*, 3rd ed, New York: Harper & Row, Publishers, Inc.
- Mikander, C. (2010), *The Impact of a Reward Sytem on Employee Motivation*, Degree Thesis International Business, Finland, Motonet-Espoo.
- Ojo, O. (2009). Impact Assessment of Corporate Culture on Employee Job Performance, *Business Intelligence Journal* - August, 2009 Vol. 2 No. 2.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Robbins S.P. (1996), *Organizational*

- Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. Seventh Edition, New Jersey: Prentice Hall.
- Robbins S.P. (2003), *About Managing People and Nothing But the Truth*, Upper Saddle River New Jersey : Prentice Hall PTR Pearson Education Inc..
- Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2013). *Organizational Behavior*. 15th ed, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education, Inc.
- Schein, E.H. (2004). *Organizational Culture and Leadership* (3rd ed.). San Francisco: Jossey- Bass.
- Storey, J. (1992). *Developments in the Management of Human Resources*. Oxford: Blackwell.

PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL PUSDIKLAT KESOS

Jurnal Pusdiklat Kesos menerima naskah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah merupakan hasil penelitian lapangan atau kelas pembelajaran, kajian teori/konsep, dan pengalaman praktik terkait isu kesejahteraan sosial dan bidang kediklatan.
2. Asli karya penulis.
3. Belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak di-*submit* pada saat bersamaan ke jurnal lain.
4. Naskah harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah.
5. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
6. Tema yang diangkat bersifat baru dan menunjukkan perkembangan terkini dari suatu bidang atau isu.
7. Rujukan (referensi) diambil dari sumber primer mutakhir dan tidak menggunakan referensi yang kurang kredibel. Jumlah referensi minimal 10 buah, berasal dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan lain-lain.
8. Format naskah menggunakan MS Word, *font* Times New Roman, *fontsize*: 11, spasi 1,5.
9. Jumlah halaman naskah sepanjang 8 - 15 halaman atau total 2500 - 4000 kata (dari halaman judul sampai daftar referensi)
10. Struktur atau format tulisan dapat dilihat dalam “Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos” pada bagian akhir panduan ini.
11. Tabel dan Gambar diberi keterangan dengan penomoran urut dan menyertakan sumber. Ukuran font 11.
12. Naskah dapat dikirim ke alamat e-mail: jurnal.pusdiklat@kemosos.go.id
13. Tata cara penulisan referensi mengacu ke APA style dengan sejumlah penyesuaian. Berikut ini adalah contoh penyusunan referensi:

▪ **Buku dengan satu atau lebih pengarang**

Cameron, L.J. (2019). *Everyday Mindfulness: Finding Focus, Calm, and Joy*. Washington: National Geographic Partners, LLC.

Christensen, C.M., Horn, M.B. & Johnson, C.W. (2008). *Disrupting Class: How Disruptive Innovation will Change the Way the World Learns*. New York: McGraw Hill.

▪ **Buku terjemahan**

Marcuse, H. (2000). *Manusia Satu Dimensi*. Terj. Silvester G. Sukur & Yusup Priasudiarja. Yogyakarta: Bentang Budaya.

▪ **Buku bunga rampai atau antologi (book chapters)**

Collins, L. M. (2014). Optimizing Family Intervention Programs: The Multiphase Optimization Strategy (MOST). Dalam A. Booth, P. Amato, & S. M. McHale (Eds.).

Emerging Methods in Family Research (pp. 231-244). New York: Springer International Publishing.

▪ **Jurnal dan/atau e-journal atau *proceeding***

Bah, A., Bazzi, S., Sumarto, S., & Tobias, J. (2019). Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, Volume 33, Issue 3, pp. 573-597. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx020>

Morawska, A. & Sanders, M. (2011). Parental Use of Time Out Revisited: A Useful or Harmful Parenting Strategy? *Journal of Child and Family Studies*, 20 (1), 1-8. doi:[10.1007/s10826-010-9371-x](https://doi.org/10.1007/s10826-010-9371-x)

▪ **Buku atau artikel *online***

ADB (2019). *Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework*. Manila: ADB. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TIM199901-2>

▪ **Artikel dari koran/majalah cetak & *online***

Nadia, A. (2020). *Aku Bangga Jadi Rakyat Indonesia*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q88kas440/aku-bangga-jadi-rakyat-indonesia> (15 April 2020)

Salahudin, A. (2018). *Melampaui Narasi Kebencian*. Kompas, 26 Februari 2018.

Zakaria, R.Y. (2019). *Omnibus Law untuk Masyarakat Adat*. Tempo, 9-15 Desember 2019.

▪ **Berita dari koran/majalah cetak & *online***

Grab Gelontorkan Investasi Rp 9,1 Triliun. Koran Tempo, 3 Februari 2017.

Jumlah Kasus HIV/AIDS di Padang Tertinggi di Sumbar (18 Januari 2020). Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q4atf1383/jumlah-kasus-hivaid-5-di-padang-tertinggi-di-sumbar> (7 April 2020)

Tajuk Rencana: Pesan di Balik Bencana. Kompas, 26 Februari 2018.

▪ **Ensiklopedia atau kamus *online***

“Learning Management System” dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System (28 Januari 2020)

“Stereotype” dalam *Encyclopaedia Britannica*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/stereotype-social> (7 April 2020)

▪ **Laporan, modul, seminar/diklat, dan skripsi/thesis/disertasi**

Ariyanto, S. (2020). *Tantangan Pengelolaan Talenta Indonesia*. Bahan tayang pada Knowledge Sharing di Pusdiklat DPR, 11 Februari 2020.

Cahyono, E.D. (2014). *Challenges Facing Extension Agents in Implementing the Participatory Extension Approach in Indonesia: A Case Study of Malang Regency in the East Java Region*. Disertasi di The Ohio State University.

Hariadi, S.S. (2012). *History and Experiences of Agricultural Extension in Indonesia*. Paper yang dipresentasikan pada Roundtable “Agricultural Extension in Asia” di Beijing, 15-17 Maret 2012.

LAN (2011). *Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut*. Modul Diklat Calon Widyaiswara.

UNESCO (2007). *Report of the 10th UN Inter-Agency Round Table on Communication for Development*. 12-14 Februari 2007, Addis Ababa, Ethiopia.

▪ **Peraturan & perundang-undangan**

Kementerian Sosial (2016). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*. Jakarta: Direktorat PSKBA, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.

▪ **Media sosial (youtube, twitter, facebook, instagram, dll.)**

Facebook Pusdiklat Kesos. Diakses dari <https://www.facebook.com/search/top?q=pusdiklat%20kesos> (30 Mei 2021)

Karikatur Budaya Restorasi Sosial, 4 Januari 2016. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=cJwcFoXfmoo> (30 Juni 2017)

Twitter @KemensosRI, 2 April 2020. Diakses dari <https://twitter.com/juliaribatubara/status/1247831661426819073> (12 April 2020)

Judul Naskah
(Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos)

Nama Penulis (tanpa gelar)

Jabatan dan nama instansi

Alamat e-mail

Abstrak

Bahasa Indonesia, 100 sampai 150 kata, dan 3-5 kata kunci.

Abstract

Abstract in English version with 3-5 keywords.

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan dapat berupa latar belakang, perumusan masalah (*presenting problems*), alur berpikir, signifikansi artikel, dan/atau penjelasan sistematika penyajian naskah.

B. POKOK BAHASAN SATU

1. Subpokok Bahasan Satu

2. Subpokok Bahasan Dua

- a. Tema subpokok bahasan poin 2a
- b. Tema subpokok bahasan poin 2b

C. POKOK BAHASAN DUA

1. Subpokok Bahasan Satu

2. Subpokok Bahasan Dua

3. Subpokok Bahasan Tiga

D. POKOK BAHASAN TIGA

E. PENUTUP

Penutup dapat berisi kesimpulan, rekomendasi, dan/atau saran.

Referensi

Penulisan daftar referensi secara umum mengacu ke *APA Style* dan disusun secara alfabetis.



JURNAL PUSDIKLAT KESOS

diterbitkan oleh:

**Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI**

ISSN 1907-5677



9 771907 567781